



JURNAL PENELITIAN

SEJARAH DAN BUDAYA

**Kolonialisme Mencengkram *Tellu Limpoe*:
Perubahan Politik dan Tatahan Birokrasi Pemerintahan
di Sinjai, Sulawesi Selatan, 1861-1942**
Khaerul Amri

**Leksikon Pertanian Tradisional Suku Sasak
di Pulau Lombok: Kajian Etnolinguistik**
Dian Mahendra

**Kompetisi dan Kolaborasi: Strategi Hotel-hotel Pegunungan
(*Berghotel*) di Garut pada Masa Kolonial (1890-1942)**
Irfal Mujaffar

**Filosofi dan Nilai-Nilai Islam dalam Gaya Bangunan Rumah
Adat Kampung Naga Tasikmalaya: Sebuah Analisis Terhadap
Rumah Adat dengan Pendekatan Studi Islam**
Andri Nurjaman, Dadan Rusmana, Doli Witro

**Membayangkan Bandung dalam Satu Dasawarsa
Pasca-Konferensi Asia Afrika: Konektivitas Global,
Modernitas, dan Perubahan Sosial (1955-1965)**
Ayu Wulandari

**Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam
Berdarah Dengue di Indonesia (2004-2019)**
Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kepada Allah, tuhan yang maha luas ilmuNya. Berkat rahmat dan ridhoNya Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Volume.7 nomor. 2 bulan November 2021 sampai di tangan pembaca. Penerbitan jurnal ini merupakan kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya. Untuk edisi ini penerbitan jurnal penelitian merupakan kali yang empat belas. Seperti edisi sebelumnya, jurnal ini memuat hasil penelitian sejarah dan budaya di pelbagai daerah di Indonesia. Edisi ini memuat enam artikel, empat artikel tentang sejarah dan dua artikel tentang budaya.

Tulisan pembuka pada edisi ini adalah karya **Khaerul Amrin** yang berjudul **Kolonialisme Mencengkram Tellu Limpoe: Perubahan Politik dan Tataan Birokrasi Pemerintahan di Sinjai, Sulawesi Selatan 1861-1942**. Dalam tulisan ini Penulis menjelaskan bagaimana perubahan politik di wilayah *Ooster Districten* pada masa Kolonial Belanda.

Leksikon Pertanian Tradisional Suku Sasak di Pulau Lombok: Kajian Etno linguistik merupakan judul Tulisan **Dian Mahendra**. Penulis mengidentifikasi pola pikir susu Sasak yang tercermin dalam leksikon leksikon pertanian tradisional dengan pendekatan etnolinguistik.

Kompetisi dan Kolaborasi: Strategi Hotel – Hotel Pegunungan (berghotel) di Garut Pada Masa Kolonial (1890 – 1942) adalah judul tulisan **Irfal Mujaffar**. Tulisan ini mengkaji bagaimana strategi hotel hotel pegunungan (berghotel) di Garut untuk memenangkan persaingan dalam menarik wisatawan untuk menggunakan fasilitas akomodasi yang mereka sediakan.

Andri Nurjaman, Dadan Rusmana dan Doli Witro melalui tulisan yang berjudul **Filosofi dan Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Gaya Bangunan Rumah Adat Kampung Naga Tasikmalaya: Sebuah Analisis Terhadap Rumah Adat Dengan Pendekatan Studi Islam**. Tulisan Kolaborasi tiga orang Penulis ini mengungkapkan filosofi dan nilai nilai Islam dalam gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga Tasikmalaya.

Ayu Wulandari melalui tulisannya yang berjudul **Membayangkan Bandung Dalam Satu Dasawarsa Pasca Konfrensi Asia Afrika: Konektifitas Global, Modernitas, Dan Perubahan Sosial (1955 – 1965)** mengkaji Kota Bandung dan masyarakatnya pasca Konfrensi Asia Afrika (KAA) dengan metode kajian sejarah.

Tulisan terakhir pada edisi ini adalah **Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Indonesia (2004 – 2019)**. Tulisan ini di sajikan oleh Joshua Jolly Sucanta Cakranegara. Penulis mengkaji

bagaimana usaha dan upaya yang dilakukan dari waktu ke waktu dalam penanganan penyakit demam berdarah dengue di awal abad 21.

Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya volume 7 nomor 2 tahun 2021 ini tentunya tidak sempurna, untuk itu, redaksi berharap saran dan kritik dari pembaca demi tercapainya jurnal yang lebih baik untuk edisi berikutnya. Akhirnya redaksi menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini. Besar harapan kami kehadiran jurnal ini bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Dewan Redaksi

ISSN: [2502-6798](#) (print)

ISSN: [2655-8254](#) (online)

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	iii
Khaerul Amri	Kolonialisme Mencengkram Tellu Limpoe: Perubahan Politik dan Tataan Birokrasi Pemerintahan di Sinjai, Sulawesi Selatan, 1861-1942 (151-172)
Dian Mahendra	Leksikon Pertanian Tradisional Suku Sasak di Pulau Lombok: Kajian Etnolinguistik (173-202)
Irfa Mujaffar	Kompetisi dan Kolaborasi: Strategi Hotel-hotel Pegunungan (Berghotel) di Garut pada Masa Kolonial (1890-1942) (203-236)
Andri Nurjaman Dadan Rusmana Doli Witro	Filosofi dan Nilai-Nilai Islam dalam Gaya Bangunan Rumah Adat Kampung Naga Tasikmalaya: Sebuah Analisis terhadap Rumah Adat dengan Pendekatan Studi Islam (237-258)
Ayu Wulandari	Membayangkan Bandung dalam Satu Dasawarsa Pasca-Konferensi Asia Afrika: Konektivitas Global, Modernitas, dan Perubahan Sosial (1955-1965) (259-288)
Joshua Jolly Sucanta Cakranegara	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Indonesia (2004-2019) (289-320)

**KOLONIALISME MENCENGKRAM *TELLU LIMPOE*:
PERUBAHAN POLITIK DAN TATANAN BIROKRASI
PEMERINTAHAN DI SINJAI, SULAWESI SELATAN,
1861-1942**

***COLONIALISM HOLDING OF TELLU LIMPOE: POLITICAL CHANGES
AND THE GOVERNMENT BUREAUCRACY ORDER IN SINJAI, SOUTH
SULAWESI AT 1861-1942***

Khaerul Amri

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kota Makassar, 90245

Email: pmaloloe@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.240

Naskah Diterima: 04 Januari 2021 Naskah Direvisi: 16 Agustus 2021

Naskah Disetujui: 06 September 2021

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Perubahan politik di wilayah *Ooster Districten* pada masa kekuasaan kolonial. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya meliputi empat tahapan, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (seleksi data), interpretasi (penafsiran), dan penyajian atau penulisan sejarah (historiografi). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolonialisme telah merubah wajah *Tellu Limpoë*. Sistem kerajaan serta wilayahnya diubah menjadi lebih modern ala Belanda yang kemudian diikuti dengan hilangnya kedudukan kaum pribumi. Keadaan ini berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Sinjai.

Kata Kunci: Politik, Pemerintahan, *Ooster Districten*, Sinjai

Abstract

This research discusses the political changes that occurred in the Ooster Districten area during colonial domination. The historical method was used in this study to explain the research problem from a historical standpoint. The procedure consists of four stages: source search and collection (heuristics), source criticism (data selection), and interpretation, as well as the presentation or writing of history (historiography). According to the findings of this study, colonialism has altered the image of Tellu Limpoe. The royal system and territory were changed to a more modern Dutch style, which resulted in the natives losing their position. This situation persists until the end of Netherland Indie's reign in Sinjai.

Keywords: *Politics, Government, Ooster Districten, Sinjai*

LEKSIKON PERTANIAN TRADISIONAL SUKU SASAK DI PULAU LOMBOK: KAJIAN ETNOLINGUISTIK

TRADITIONAL AGRICULTURE LEXICONS OF SASAK TRIBE IN LOMBOK ISLAND: ETHNOLINGUISTIC STUDIES

Dian Mahendra

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Buluksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Email: henndra94@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.243

Naskah Diterima: 24 Januari 2021 Naskah Direvisi: 21 Juni 2021

Naskah Disetujui: 09 Juli 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pikir suku Sasak yang tercermin dalam leksikon-leksikon pertanian tradisional yang mereka gunakan. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan etnolinguistik. Data berupa leksikon-leksikon tradisional suku Sasak diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Dengan metode distribusional teknik bagi unsur langsung, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan satuan-satuan kebahasaan yang membentuknya. Setelah itu, data dianalisis dengan teori semantik leksikal, gramatikal, dan kultural. Hasil analisis data menunjukkan bahwa aktivitas pertanian bagi suku Sasak tradisional tidak hanya dipandang sebagai mata pencaharian. Akan tetapi, mereka memandang aktivitas bertanam padi sebagai sesuatu yang sakral yang berhubungan dengan keharmonisan hubungan antara manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Melalui leksikon-leksikonnya, suku Sasak mengajarkan tentang bagaimana manusia mengelola kebersamaan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, mereka juga mengajarkan melalui mantra-mantra yang digunakan tentang bagaimana menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan.

Kata Kunci: Leksikon, Pertanian Tradisional, Suku Sasak, Etnolinguistik

Abstract

This study aims to identify the mindset of the Sasak tribe which is reflected within traditional agricultural lexicon they use. An ethnolinguistic approach is used to achieve this goal. Data in the form of the conservative vocabulary of the Sasak tribe were obtained through literature study and interviews. With direct constituent technique, the obtained data are classified based on the linguistic units that make it up. After that, the data were analyzed using lexical, grammatical and cultural semantic theory. The results show that agricultural activities for the traditional Sasak tribe are not only seen as a livelihood. However, they view rice cultivation as something sacred related to the harmonious relationship between humans and all of God's creatures. The Sasak tribe teaches us about how humans manage togetherness among God's creatures to achieve a goal through their lexicon. In addition, they also teach us through the mantras used on how to maintain a vertical relationship with God.

Keywords: *Lexicon, Traditional Agriculture, Sasak Tribe, Ethnolinguistics*

**KOMPETISI DAN KOLABORASI: STRATEGI HOTEL-
HOTEL PEGUNUNGAN (*BERGHOTEL*) DI GARUT PADA
MASA KOLONIAL (1890-1942)**

***COMPETITION AND COLLABORATION: THE STRATEGY OF
MOUNTAIN HOTELS (*BERGOTEL*) IN GARUT IN THE COLONIAL
PERIOD (1890-1942)***

Irfal Mujaffar

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Kampus UI Depok Jawa Barat 16424

Email: irfalmujaffar2711@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.255

Naskah Diterima: 31 Maret 2021 Naskah Direvisi: 13 September 2021

Naskah Disetujui: 13 September 2021

Abstrak

Popularitas Garut sebagai tujuan utama pariwisata pada periode akhir kolonial menarik minat para pelaku usaha akomodasi untuk merintis usaha-usaha mereka di kawasan ini. Semenjak itu Garut berkembang menjadi salah satu episentrum persebaran hotel-hotel pegunungan (*berghotel*) yang menawarkan akomodasi bagi para wisatawan. Kondisi tersebut memicu terjadinya persaingan di antara mereka. Artikel ini berfokus pada strategi hotel-hotel pegunungan di Garut dalam menjaring lalu lintas wisatawan. Sumber yang digunakan adalah buku-buku, surat kabar, majalah, buku panduan wisata, dan catatan perjalanan sezaman. Dengan menggunakan metode sejarah, hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam menyiasati tekanan persaingan untuk mendapatkan wisatawan, hotel-hotel pegunungan di Garut menempuh berbagai strategi melalui pengembangan inovasi dan bentuk-bentuk kolaborasi.

Kata Kunci: Hotel Pegunungan, Akomodasi Pariwisata Kolonial, Garut.

Abstract

Garut's popularity as a tourist destination in the late colonial period has caused many accommodation entrepreneurs to set up business within the city. From that moment, Garut has become one of the centers for the existence of mountain hotels (berghotels) for tourists. This article will be focused on the strategy of mountain hotels in Garut to attract tourists. The sources are used from books, newspapers, magazines, the guide books of tourism as well as travelogues from that time. By using the historical method, the results shows that mountain hotels in Garut develop a mixture of competing strategies to attract tourists by innovating and collaborating.

Keywords: *mountain hotel, colonial tourism accommodation, Garut*

**FILOSOFI DAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM GAYA
BANGUNAN RUMAH ADAT KAMPUNG NAGA
TASIKMALAYA: SEBUAH ANALISIS TERHADAP RUMAH
ADAT DENGAN PENDEKATAN STUDI ISLAM**

***PHILOSOPHY AND ISLAMIC VALUES IN TRADITIONAL HOUSE
BUILDING STYLES IN KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA: AN ANALYSIS
OF TRADITIONAL HOUSES WITH AN ISLAMIC STUDY APPROACH***

Andri Nurjaman^a, Dadan Rusmana^b, Doli Witro^c

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa
Barat

Email: ^a andrienurjaman99@gmail.com, ^b dadan.rusmana@uinsgd.ac.id,
^c doliwitro01@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.258

Naskah Diterima: 28 April 2021 Naskah Direvisi: 14 September 2021

Naskah Disetujui: 16 September 2021

Abstrak

Rumah adat merupakan peninggalan kebudayaan masyarakat tradisional yang harus dijaga keberadaannya sebagai cagar budaya oleh masyarakat yang hidup saat ini. Di Indonesia, terdapat banyak terdapat rumah yang ada hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat yang berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang dikenal Kampung Naga. Gaya arsitektur rumah adat di Kampung Naga tersebut adalah berupa rumah panggung seperti layaknya rumah tradisional masyarakat Sunda. Karena itu, gayanya yang unik, di sisi rumah adat di Kampung Naga ini juga memiliki filosofi dan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tulisan ini bertujuan mengungkap filosofi dan nilai-nilai Islam dalam gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan filosofi bangunan rumah adat Kampung Naga dengan bahan alami mencerminkan hubungan baik antara masyarakat adat Kampung Naga dengan alam. Tidak hanya itu, bangunan panggung yang mencerminkan kesederhanaan menunjukkan kehidupan masyarakat Kampung Naga. Nilai-nilai Islam dalam bangunan rumah adat Kampung Naga dilihat dari struktur bangunan dan bentuk (model) rumah yang mengandung nilai-nilai hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan. Dalam Islam disebut dengan istilah *habluminallah*, *habluminanas* dan *habluminalalam*.

Kata Kunci: Rumah Adat, Kampung Naga, Filosofi, Nilai-Nilai Islam

Abstract

*Traditional houses are cultural relics of conventional communities that must be preserved as cultural heritage by today's people. In Indonesia, many houses exist today. One is a traditional house located in Neglasari Village, Salawu District, Tasikmalaya Regency, West Java Province, known as Kampung Naga. The architectural style of the traditional house in Kampung Naga is a house on stilts like a traditional Sundanese society. Because of its unique style, this traditional house in Kampung Naga also has Islamic philosophy and values. This paper aims to reveal Islamic philosophy and values in building traditional houses in Kampung Naga, Tasikmalaya. Data was collected through field observations, interviews, and literature studies. The used data analysis technique is data condensation, data presentation, and drawing conclusion (verification). The results show that the philosophy of building traditional houses of Kampung Naga with natural materials reflects the excellent relationship between the indigenous people of Kampung Naga and nature. Not only that, the stilted building that reflects the simplicity shows the life of the people of Kampung Naga. Islamic values in the traditional house-building of Kampung Naga are seen from the structure of the building and the shape (model) of the house, which contains the importance of a harmonious relationship between humans, nature, and God. In Islam, it is called *habluminallah*, *habluminanas*, and *habluminalalam*.*

Keywords: *Traditional House, Kampung Naga, Philosophy, Islamic Values*

**MEMBAYANGKAN BANDUNG DALAM SATU DASAWARSA
PASCA-KONFERENSI ASIA AFRIKA: KONEKTIVITAS
GLOBAL, MODERNITAS, DAN PERUBAHAN SOSIAL
(1955-1965)**

***IMAGINING BANDUNG IN A DECADE AFTER THE ASIAN-AFRICAN
CONFERENCE: GLOBAL CONNECTIVITY, MODERNITY, AND SOCIAL
CHANGES (1955-1965)***

Ayu Wulandari

Alumnus S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Email: wulandrayu.99@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.273

Naskah Diterima: 20 Juli 2021 Naskah Direvisi: 28 Agustus 2021

Naskah Disetujui: 06 September 2021

Abstrak

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung memiliki dampak yang sangat luas. Bagi Indonesia, KAA memberikan warisan posisi yang terhormat dalam diplomasi pascakolonial, khususnya di Asia dan Afrika atau “Dunia Ketiga”. Namun demikian, dampak konferensi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia secara umum. Konferensi ini juga mengubah citra Bandung yang merupakan kota penyelenggaraan konferensi. Oleh karena itu, kajian ini membahas kondisi Kota Bandung dan masyarakatnya pasca-KAA. Kajian ini disusun menggunakan metode sejarah yang memanfaatkan arsip, majalah, dan surat kabar sebagai sumber primer. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pasca-KAA, Bandung bertransformasi menjadi “Kota Konferensi Internasional”, diikuti oleh pembangunan dan terbentuknya citra Bandung sebagai kota politik global sehingga kota ini juga menjadi ruang terkoneksi aktor politik global. Ironisnya, prestasi dan modernitas ini justru diikuti oleh perubahan sosial yang menunjukkan sisi lain Kota Bandung. Berbagai masalah sosial dan ekonomi meluas di kota ini mulai dari kemiskinan hingga degradasi moral.

Kata kunci: Konferensi Asia Afrika, Kota Bandung, Kota Konferensi Internasional, Modernitas, Perubahan Sosial.

Abstract

The holding of the Asian-African Conference (AAC) in 1955 in Bandung had a very big impact. For Indonesia, the AAC gave a legacy of an honorable position in post-colonial diplomacy, particularly in the Asia and Africa region or known as the “Third World”. However, the impact of this conference was not only felt by Indonesia in general. But this conference also changed the image of Bandung, which is the city where the conference is held. Therefore, this study discusses the condition of Bandung City and its people after the AAC. This study is compiled using historical methods with archives, magazines, and newspapers as primary resources. The results of this study indicate that after the AAC, Bandung was transformed into an “International Conference City”, followed by the development and the increase of Bandung’s image as global political city so this city also became as connected space for global political actors. Ironically, these achievements and modernity were actually followed by social changes that showed a different side of Bandung City. Many social and economic problems were widespread in this city, ranging from poverty to moral degradation.

Keywords: Asian African Conference, Bandung City, International Conference City, Modernity, Social Changes.

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA (2004-2019)¹

THE EFFORTS TO PREVENT AND CONTROL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN INDONESIA (2004-2019)

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

Alumnus Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Email: joshua.jolly.s.c@mail.ugm.ac.id

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.274

Naskah Diterima: 24 Juli 2021 Naskah Direvisi: 30 September 2021

Naskah Disetujui: 01 Oktober 2021

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia pada awal abad ke-21 (2004-2019) beserta dampaknya. Hal ini menjadi penting sebab DBD dinilai sebagai salah satu ancaman ketika Indonesia sedang melawan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, DBD menjadi salah satu penyakit yang telah berada dalam sejarah panjang Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah kesehatan masyarakat. Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber primer berupa surat kabar dan publikasi resmi pemerintah serta sumber sekunder berupa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status DBD yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 2004 menyebabkan perhatian pemerintah atas DBD makin besar. Pemerintah menetapkan kebijakan kesehatan yang meliputi upaya pencegahan dan pengendalian dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian, dampak atas upaya ini adalah jumlah kasus DBD bergerak secara fluktuatif selama lima belas tahun, bahkan meningkat tajam pada 2019.

Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Upaya Pencegahan dan Pengendalian, Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kolaborasi Lintas Sektor

¹ Makalah ini, dengan pengubahan seperlunya, pernah dipresentasikan dalam International Conference on Indonesian Culture (ICONIC) 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10-13 November 2020 secara daring. Makalah ini belum pernah dipublikasikan dalam Prosiding ICONIC 2020 dan publikasi lainnya. Apabila di kemudian hari makalah ini dipublikasikan di luar jurnal ini, hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin penulis.

Abstract

This article aims to examine efforts to prevent and control dengue hemorrhagic fever (DHF) in Indonesia at the beginning of the 21st century (2004-2019) and their impacts. This is important because DHF is considered as one of the threats when Indonesia is fighting the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. In addition, DHF is a disease that has existed in Indonesia's long history. This research is historical research with a public health history approach. The sources used are primary sources in the form of newspapers and government official publications and secondary sources in the form of related literature. The results shows that the status of DHF which had been designated as an Extraordinary Event (EE) in 2004 caused the government to pay more attention to DHF. The government establishes health policies that include prevention and control efforts by involving cross-sectoral collaboration. However, the impact of this effort is that the number of dengue cases has fluctuated for fifteen years, even increasing sharply in 2019.

Keywords: *Dengue Hemorrhagic Fever, Prevention and Controlling Effort, Health Policy, Public Health, Cross-Sectoral Collaboration*

**KOLONIALISME MENCENGKRAM TELLU LIMPOE: PERUBAHAN
POLITIK DAN TATANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DI SINJAI,
SULAWESI SELATAN, 1861-1942**

**COLONIALISM HOLDING OF TELLU LIMPOE: POLITICAL CHANGES
AND THE GOVERNMENT BUREAUCRACY ORDER IN SINJAI, SOUTH
SULAWESI AT 1861-1942**

Khaerul Amri

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kota Makassar, 90245

Email: pmaloloe@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.240

Naskah Diterima: 04 Januari 2021 Naskah Direvisi: 16 Agustus 2021

Naskah Disetujui: 06 September 2021

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang Perubahan politik di wilayah *Ooster Districten* pada masa kekuasaan kolonial. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya meliputi empat tahapan, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (seleksi data), interpretasi (penafsiran), dan penyajian atau penulisan sejarah (historiografi). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kolonialisme telah merubah wajah *Tellu Limpoe*. Sistem kerajaan serta wilayahnya diubah menjadi lebih modern ala Belanda yang kemudian diikuti dengan hilangnya kedudukan kaum pribumi. Keadaan ini berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Sinjai.

Kata Kunci: Politik, Pemerintahan, *Ooster Districten*, Sinjai

Abstract

This research discusses the political changes that occurred in the Ooster Districten area during colonial domination. The historical method was used in this study to explain the research problem from a historical standpoint. The procedure consists of four stages: source search and collection (heuristics), source criticism (data selection), and interpretation, as well as the presentation or writing of history (historiography). According to the findings of this study, colonialism has altered the image of Tellu Limpoe. The royal system and territory were changed to a more modern Dutch style, which

resulted in the natives losing their position. This situation persists until the end of Netherland Indie's reign in Sinjai.

Keywords: *Politics, Government, Ooster Districten, Sinjai*

PENDAHULUAN

Historiografi mengenai sejarah lokal di Indonesia, masih banyak menyimpan obyek kajian yang belum terungkap hingga sekarang. Penelitian sejarah lokal dengan kemajemukan masyarakat Indonesia, diharapkan mampu memperkaya khasanah sejarah nasional dari belahan Nusantara. Penelitian sejarah lokal biasanya menyangkut asal-usul pertumbuhan dan perkembangan ataupun kemunduran dari kelompok masyarakat lokal termasuk berbagai etnis kultural yang ada didalamnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sejarah lokal mempunyai ruang lingkup yang terbatas dan biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah. Wilayah yang relatif sempit biasanya lebih penting sejarahnya jika dibandingkan dengan daerah yang lebih luas (Abdullah, 1985: 18).

Begitupun dengan dinamika kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan pada masa kolonial. Pemerintah kolonial mulai menduduki kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan didasarkan pada Perjanjian Bongaya yang diperbaharui pada tahun 1824. Salah satu pasal dari perjanjian tersebut mengisyaratkan adanya tuntutan pemerintah Belanda atas pengakuan kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan monopoli perdagangan di kepulauan Maluku tidak lagi diutamakan. Untuk merealisasikan perjanjian tersebut, pemerintah Belanda berhasil menguasai negeri-negeri bagian timur Sulawesi Selatan. Sebagaimana termaktub dalam pasal enam perjanjian tersebut yang berbunyi bahwa batas-batas daerah kepentingan Gubernemen akan ditetapkan kemudian. Dengan demikian daerah kekuasaan Belanda setiap saat bisa diperluas termasuk kerajaan-kerajaan dalam konfederasi Tellu Limpoe sebagaimana maksud dari potongan pasal tersebut (Patunru, 1989: 95).

Pemerintah Hindia Belanda berhasil menaklukkan Tellu Limpoe dan menjadikan daerah ini berstatus *Gouvernementlanden* (daerah taklukan) dan memasukkan seluruh bekas wilayahnya kedalam *Ooster Districten* (Distrik-distrik Bagian Timur) pada 1861. Pemerintah Hindia Belanda baru bisa menanamkan kekuasaannya secara menyeluruh di Sulawesi Selatan kurun waktu

antara 1906-1942. Pada masa itu, pemerintah Kolonial Belanda melakukan usaha penguasaan dengan mengirim pasukan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pengiriman pasukan tersebut dikenal dengan istilah Ekspedisi Militer (*militaire expeditie*) 1905. Ekspedisi ini dilakukan berdasarkan kebijakan politik eufinis yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Joannes Benecditus van Heutzs (1904-1909). Ekspedisi ini dikenal juga dengan sebutan “politik perdamaian” (*pasficatie politiek*) pada masa Gubernur Sulawesi Cornelis Alexander Kroesen (1903-1906). Ekspedisi ini bertujuan untuk memaksa penguasa-penguasa di wilayah Sinjai khususnya dan wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya untuk tunduk, patuh dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah Kolonial Belanda (Poelinggomang, 2004: 2).

Adapun tujuan pemerintah kolonial Belanda menguasai secara langsung wilayah tersebut adalah ketenangan dan ketertiban (*rust en orde*). Hal ini dinyatakan oleh petinggi pemerintah Kolonial Belanda seperti J. H. van Kol, van Deventer dan Cremer. Pemerintah Kolonial selanjutnya menempatkan diri sebagai penguasa yang sah dan melakukan tugas-tugas pemerintahan. Dengan kata lain pemerintah kolonial juga melakukan kekuasaan langsung terhadap rakyat yang dinyatakan melalui *Korte Verklaring* (surat pernyataan pendek). Setelah penandatanganan surat pernyataan pendek dilakukan, pemerintah Hindia Belanda sudah menjadi penguasa seutuhnya di wilayah *Tellu Limpoe* (Sulistyo, 2007:11).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tiga permasalahan utama. Permasalahan pokoknya adalah “Bagaimana dinamika dan efek kolonialisme dalam penataan pemerintahan di Tellu Limpoe 1861-1942?”. Dalam membahas artikel ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang sekaligus menjadi rumusan masalah agar mempermudah dalam mengarahkannya. Pertanyaan tersebut antara lain: (1) Bagaimana proses terbentuknya *Ooster Districten*?; (2) Bagaimana penataan pemerintahan setelah pemerintah kolonial menanamkan pengaruhnya di Tellu Limpoe?; (3) Bagaimana perkembangan pemerintahan setelah Sulawesi Selatan ditaklukkan secara utuh? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses terbentuknya *Ooster Districten*; (2) mengetahui penataan pemerintahan setelah pemerintah kolonial menanamkan pengaruhnya di Tellu Limpoe; dan (3) untuk mengetahui

perkembangan pemerintahan setelah Sulawesi Selatan ditaklukkan secara utuh.

Bertolak dari permasalahan tersebut, hal ini perlu diungkapkan dan dijelaskan secara utuh. Tulisan ini diharapkan menjadi bahan renungan kemudian memahaminya secara saksama. Dengan demikian kita bisa lebih arif dalam berdialog dengan masa lampau itu; membuka diri secara jujur dan penuh toleransi agar kita dapat menjadi lebih arif dan bijaksana dalam membangun kekinian dan hari esok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian yang dimaksud adalah menganalisis kejadian sejarah secara kritis dengan merekonstruksi kembali kejadian masa lalu sesuai kaidah-kaidah ilmiah dari ilmu sejarah. Adapun metode tersebut disebut sebutan metode sejarah dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan dalam bentuk narasi sejarah.

Dalam menulis artikel ini, dimulai dengan studi arsip dan kepustakaan (*library research*) serta mengumpulkan sumber primer berupa arsip-arsip yang erat kaitannya dengan Sinjai pada masa kolonial. Sumber primer berupa arsip yang digunakan adalah dokumen-dokumen pemerintah pada periode 1900-an. Setelah mengumpulkan berbagai arsip dan dokumen kemudian menganalisisnya melalui tahapan kritik sumber. Setelah kritik sumber, dilakukan interpretasi data untuk memperoleh kumpulan fakta sejarah kemudian merekonstruksinya menjadi narasi sejarah Kolonialisme mencengkrum Tellu Limpo: Perubahan Politik dan Tataan Birokrasi Pemerintahan dari Konfederasi Menuju *Onderafdeling* Sinjai 1861-1942.

PEMBAHASAN

Terbentuknya *Ooster Districten*

Tellu Limpo merupakan suatu federasi kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan yang kini wilayahnya menjadi satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai. Federasi *Tellu Limpo* secara etimologis terdiri atas dua kata yaitu *Tellu* yang berarti tiga, dan *Limpo* (*Limpu*) yang berarti tempat. Federasi ini merupakan

daerah atau wilayah pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Arung* atau Raja. Kerajaan *Tellu Limpoe* meliputi tiga buah kerajaan otonom yang mempunyai perserikatan yaitu Kerajaan *Tondong*, Kerajaan *Bulo-Bulo*, dan Kerajaan *Lamatti*. Pada akhir abad XV ketiga negeri ini mengikrarkan diri sebagai negeri bersaudara dalam konfederasi *Tellu Limpoe* (Mattulada, 1994: 8).

Sebagai kerajaan yang berserikat, ketiga kerajaan dalam konfederasi ini masing-masing memiliki wilayah kekuasaan sebagaimana yang tertuang dalam Lontara *Bulo-Bulo*. Dalam Lontara tersebut disebutkan bahwa Kerajaan *Tondong* memiliki wilayah kekuasaan yang terdiri dari Kampala, Pao, Salohe, Lengkesa, Tokka, Kolasa, dan Camba. Adapun wilayah Kerajaan *Bulo-bulo* adalah Saukang, Rombo, Mattoanging, Bontopale, Kaloling, Maroanging, Biringere, Pattalassang, Sanjai, Bua, Pattongko, Mannanti, Biroro, Bikeru, Talle, Bulu, Takkuro, Saoanging, Ammessing, Serre, Nangka, Baringeng, dan Kalaka. Sedangkan Kerajaan *Lamatti* yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Bone ini terdiri dari Bongki, Panreng, Lappa, Balangnipa, Aruhu, Jerrung, Bulupoddo, Mangngopi, Sereng, Barang, Cenrana, Raja, dan Kading. (Kamaruddin, 1966: 3-5)

Pada awal tahun 1859 Sinjai menjadi tempat agresi perang antara pasukan Belanda dengan Kerajaan Bone. Pada periode itu, Bone masih memiliki pengaruh yang kuat di Sinjai. Sehingga sebelum Belanda menaklukkan Bone yang dikenal memiliki pengaruh besar terhadap beberapa kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu harus menaklukkan Sinjai. Terlebih kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai secara administratif berbatasan langsung dengan Kerajaan Bone seperti yang telah digambarkan sebelumnya. Penaklukan Sinjai juga bertujuan untuk mengurangi bantuan kepada kerajaan Bone jika Belanda melancarkan ekspedisi di kerajaan tersebut.

Pada akhirnya pertempuran hebat terjadi di Sinjai. Pertempuran tersebut oleh masyarakat lokal dikenal dengan istilah *Rumpa'na Mangarabombang*. Pada peristiwa ini, Belanda mengirim pasukan dibawah pimpinan Colonel Waleson. Pasukan Waleson dilengkapi dengan kapal-kapal “Johanna Gertruida”, “Elizabet”, “Alblaserdam” (kapal ini mengangkut batalion III infantry), kapal perawatan medis “Arcadia”, dan kapal Vivres, kapal perbekalan “Neptunus”

meninggalkan Bantaeng. Colonel Waleson bertugas untuk mengadakan pengintaian, terutama kekuatan musuh yang ada di Sinjai. Ada dua hal yang diharapkan dengan pengintaian ini. Pertama untuk mendapatkan kepastian bahwa semua kapal angkut dapat tiba di Teluk Bone tanpa hambatan. Kedua agar Kerajaan Bone tidak mengetahui secara pasti sasaran serangan apakah Sinjai atau Bone, sehingga Kerajaan Bone harus memecah kekuatan tempurnya untuk mengawasi kedua tempat tersebut (Mappangara, 1996: 190-191).

Setelah seluruhnya berjalan lancar dan sesuai dengan perkiraan semula, seluruh pasukan Belanda bertolak meninggalkan Bantaeng dan tiba di Sinjai pada tanggal 3 Februari 1859. Keesokan harinya konvoi pasukan ini bergerak menuju Bajoe. Setelah sampai di sana pada tanggal 6 Februari pasukan Belanda memberikan surat ultimatum kepada Raja Bone agar mengakui kekuasaan Belanda dan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya yang telah diperbaharui 1824 (Perelaer, 1872:186).

Ultimatum itu tidak diindahkan oleh Kerajaan Bone, sehingga terjadi penyerangan yang dipimpin oleh Mayor Jendral Steinmentz. Penyerangan dilakukan di dua tempat yaitu Lona, dan Cenrana. Usaha keras yang dilakukan oleh Belanda terhambat oleh kondisi alam yang tidak bersahabat. Selain karena keadaan geografis yang sulit, juga diperparah dengan datangnya musim hujan. Musim hujan menyebabkan keadaan kesehatan pasukan Belanda sangat memprihatinkan, ditambah pula dengan merebaknya penyakit kolera. Keadaan itu melandasi keputusan pasukan Belanda untuk meninggalkan Bajoe dan kembali ke Makassar (Mappangara, 1996: 196).

Pada tanggal 19 November 1859 pasukan Belanda kembali dipersiapkan di Bulukumba kemudian diberangkatkan menuju Kajang dan Sinjai. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jendral Jan van Swieten, komandan *Indische leger* dan kepala stafnya Mayor Inf. Staring. Pasukan yang dikirim terdiri atas (angkatan darat) batalion 4 yang dipimpin oleh Mayor Kroesen, batalion 11 yang dipimpin oleh Mayor Jallink, dan batalion 5 dipimpin oleh Mayor Heisterkemp. Pasukan ini juga dilengkapi dengan battalio *Garnisum Celebes* dan Manado. Kesatuan Kavaleri terdiri dari kavaleri Salatiga dan pasukan kavaleri *Celebes* yang dipimpin oleh Mayor Wolff. Selain pasukan angkatan darat, agresi militer ini

dilengkapi juga dilengkapi dengan kekuatan angkatan laut yang terdiri dari kapal uap Gedeh, Admiral van Kinsbergen, Madura dan juga Phoenix, *korvet* uap Madusa, kapal uap baling-baling Sumbing dan Bali, *korvet* Rembang Padang, dan Lansier (Perelaer, 1872: 79-80).

Serangan atas Kerajaan Bone tidak lagi bertumpu pada laut. Kali ini Belanda memutuskan untuk mengikuti cara yang yang digunakan pada agresi militer yang pertama ditahun 1825. Sesuai dengan rencana tersebut, pasukan Belanda yang ditugaskan bergerak dengan berjalan kaki menuju Sinjai. Agresi militer ini menempuh jalan darat menuju Sinjai dan berhasil menaklukkan Sinjai. (Mappangara, 1996: 199-200).

Kekalahan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian Bongaya yang telah diperbaharui. Berdasarkan Perjanjian Bongaya, daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Hindia Belanda pada waktu perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian wilayah yang dahulunya dibawah pengaruh konfederasi Tellu Limpoe kemudian melebur dengan turut bergabung kedalam Distrik-Distrik Bagian Timur (*Ooster-Districten*) meliputi: Tondong, Bulu-Bulu, Lamatti, Gantarang, Ujung Loe, Bulukumpa, Manimpahoi, Manipi, Turungeng, Kajang, Bira, dan Jojolo. Selain itu, daerah pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan juga meliputi: Afdeling Makassar yang berpusat di Makassar, Afdeling Noorden districten berpusat di Maros, dan Afdeling Zuider Districten berpusat di Takalar, serta Afdeling Ooster Districten yang berpusat di Balangnipa (Limbugau, 1985: 64).

Penataan Pemerintahan

Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya menanamkan kekuasaan di Sinjai setelah terbentuknya *Ooster Districten*. Pemerintah kolonial menjadikan daerah ini sebagai *Gouvernementlanden* (daerah taklukan) setelah melantik Abd. Gani sebagai regent I Bulu-Bulu pada tahun 1861. Tak hanya itu, pada bulan April 1862, pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Balang Nipa ke Manipi sebagai simbol otoritas pemerintahan yang baru. Pemindahan tersebut disebabkan oleh perlawanan sejumlah dewan adat di daerah tersebut. Distrik Manipi dan

Turungan belum mau mengakui kewenangan Pemerintah Hindia Belanda. Para pimpinan kerajaan terus menolak bahkan tidak mau tunduk terhadap pemerintah. Dewan adat juga berusaha membujuk Kerajaan Lamatti yang telah ditaklukkan untuk melawan.

Untuk mengakhiri gejolak tersebut, pada bulan April, Gubernur berangkat dengan kekuatan militer yang cukup kuat melintasi Balangnipa ke Manipi. Sementara itu, pangeran Gowa dengan kekuatan yang cukup besar juga bergerak melalui darat ke wilayah kekuasaannya di Suka dan Balasuka untuk melumpuhkan Manipi dan Turungan yang terus menentang Pemerintah Hindia Belanda. Sebelum menggunakan kekerasan, Gubernur mendesak pimpinan kerajaan untuk terakhir kalinya agar tunduk secara langsung. Untuk itu sang komisaris kembali ke Manipi dan berhasil menjalankan misinya. Keesokan harinya, pimpinan kerajaan dan seluruh dewan adat meminta maaf atas nama *Wanau* (wilayah) Manipi dan berjanji akan tunduk terhadap pemerintah. (Kolonial Verslaag tahun 1862).

Otoritas pemerintahan yang baru ini begitu mempengaruhi. Para raja di wilayah Tellu Limpoe yang dulunya sebagai pemegang pucuk pimpinan dan menentukan segala kebijakan, kini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hak kekuasaan yang dimiliki oleh raja sedikit-demi sedikit berkurang. Dalam hal pengambilan keputusan harus seizin pemerintah kolonial. Struktur pemerintahan yang baru jelas menampakkan jurang pemisah antara pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda dan pelaksanaan pemerintahan bumiputra. Dipihak pemerintah Hindia Belanda, kontroleur ditempatkan sebagai pejabat terendah dan dipihak lainnya penguasa lokal dijadikan sebagai pejabat tertinggi bumiputra. Bentuk penataan administrasi pemerintahan ini menunjukkan adanya penumpangan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di atas kekuasaan Bumiputra.

Perubahan tatanan birokrasi juga diikuti oleh hilangnya kedudukan politik, ekonomi dan sosial pada kaum bangsawan dan pejabat lokal yang berakibat pada hilangnya sumber pendapatan. Jika dahulunya pejabat lokal bisa mengambil alih pajak atas tanah rakyat atau memungut upah pertanian maka setelah “pembajakan” kekuasaan mereka tidak bisa lagi melakukannya. Hak-hak istimewa yang dimilikinya dicabut sehingga kedudukannya sama seperti orang

pribumi. Dengan kata lain, pemerintah Kolonial Belanda hanya menjadikan raja dan bangsawan sebagai simbol dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal inilah yang memicu berbagai perlawanan di Sinjai.

Perlawanan terhadap kolonialisme di Sinjai salah satunya dipelopori oleh Massalinri Dg. Mallira pada tahun 1871. Perlawanan ini sebagai simbol keresahan atas tatanan pemerintahan gaya kolonial yang baru. Betapa tidak, dari ayahnya Salolang Dg. Palili yang merupakan Aru Pangasa dan ibu yang bernama Ipada Daeng Tamene, seorang putri Arung Tondong berhasil melahirkan seorang putra yang gagah berani. Darah bangsawan yang mengalir dalam diri Massalinri memaksanya untuk mempertahankan haknya. Hal ini dapat dibuktikan melalui perlawanan Massalinri bersama para pengikutnya dalam melancarkan serangan terhadap militer Belanda. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 24 Mei 1871 bertempat di Cakkempong. Massalinri berhasil memenangkan pertempuran tersebut sehingga pasukan Belanda terpaksa mundur ke pusat pangkalan militer yang ada di Balang Nipa (Rasyid, 1989: 39-44).

Perang tersebut memicu kemarahan pemerintah Belanda yang juga berpusat di Balang Nipa. Mengetahui hal tersebut, Massalinri bersama pengikutnya akhirnya memutuskan berperang secara bergerilya sebab kalah dalam persenjataan. Militer Belanda terus mengejar Massalinri yang melarikan diri ke arah selatan kerajaan Bulu-Bulu tepatnya di Wae Pellae. Selanjutnya menuju ke selatan sampai di daerah Bikeru. Di daerah inilah kemudian terjadi pertempuran hebat antara Massalinri dengan pasukan Belanda dalam jumlah besar pada tanggal 26 Mei 1871. Massalinri bersama pengikutnya berhasil dipukul mundur hingga ke Cappa Galung Bola Roman. Massalinri akhirnya berhasil dibunuh oleh pasukan Belanda. Dengan terbunuhnya Massalinri, Pemerintah kolonial dengan bebas mengatur jalannya roda pemerintahan di Sinjai. Hal ini dapat dilihat melalui pemecahan Keregenan Bulu-bulu menjadi Bulu-Bulu Timur dan Bulu-Bulu Barat sebagaimana tertuang dalam Besluit nomor 18 tanggal 1 Februari 1872 (Staatblad No. 20).

Penataan pemerintahan dimulai dengan menghapus status kerajaan yang ada di Sinjai dan menjadikan bekas wilayah kekuasaanya sebagai *lanschap*. Jika pada masa kerajaan, wilayah Sinjai terdiri dari beberapa kerajaan dengan wilayah

tersendiri, kini wilayah itu ditiadakan. Sejumlah daerah *vassal*/taklukan, banua ataupun kampung digabungkan menjadi satu dengan sebutan *lanschap*. Tiap *lanschap* dikepalai seorang pemimpin yang disebut *Puatta*, biasanya berasal dari keluarga raja maupun tuan tanah serta orang-orang pilihan. Dalam penataan ini sedapat mungkin memperhatikan ikatan-ikatan historis yang ada diantara gabungan banua-banua tersebut (TIM Badan Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015: 135-136)

Adapun *lanschap-lanschap* di Sinjai pada masa itu adalah:

1. Lanschap Tondong.
2. Lanschap Bulu-Bulu Timur.
3. Lanschap Bulu-Bulu Barat.
4. Lanschap Lamatti.
5. Lanschap Manimpahoi.
6. Lanschap Manipi (Kamaruddin, 1996: 2-3).

Selain penataan pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda juga mulai mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang dimaksud adalah pertambangan, perkebunan, hasil hutan, dan hasil laut. Hal yang diharapkan dari kebijakan itu adalah pendapatan dalam bentuk pajak. Pajak merupakan salah satu strategi politik ekonomi demi mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil hasil eksplorasi tersebut. Namun, masyarakat juga merasakan hasil pajak melalui pembangunan jalan, pelabuhan, pasar, alat transportasi baik laut maupun darat (Melamba, 2011: 33).

Sejak masuknya kolonial Belanda, pajak merupakan sumber utama dalam pengisian kas negara (Hindia Belanda). Langkah awal yang ditempuh adalah dengan mengadakan pencacahan jiwa atas penduduk yang memasuki arus balik (dewasa). Selain itu, seluruh penduduk diwajibkan memiliki surat kampung (Kartu Penduduk) sehingga akan dikenakan pajak kepala, pajak usaha atau pencaharian (Bigalke, 2016: 35).

Pemerintah Kolonial menerapkan sistem pajak perorangan (*sima ulu*) dan pajak penghasilan. Penduduk diwajibkan menyeter pajak sebesar 1/10 dari pajak penghasilan untuk sekali panen seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Tiap Kearungan Distrik Bulu-Bulu Timur

No	Nama Kampung	Gelar	Jumlah Wajib Pajak
1	Biringere	Aru	516
2	Bontopale	Aru	986
3	Sanjai	Aru	746
4	Rombo	Aru	356
5	Biroro	Aru	136
6	Mannati	Aru	147
7	Pattongko	Aru	488
8	Buwa	Aru	309
9	Erolohe	Kepala	244
10	Tongke-Tongke	Kepala	472
11	Buwakang	Kepala	89
12	Pattalassang	Kepala	430
13	Kaloling	Aru	170
14	Maroanging	Aru	160
Jumlah Wajib Pajak			6259

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Tiap Kearungan Distrik Bulu-Bulu Barat

No	Nama Kampung	Gelar	Jumlah Wajib Pajak
1	Takkuro	Aru	233
2	Nangka	Aru	360
3	Sompong	Gella	365
4	Lempangeng	Aru	264
5	Kalamisu	Aru	249
6	Bongkong	Aru	209
7	Talle	Aru	735
8	Ammessing	Aru	405
9	Gareccing	Aru	112
10	Kanrung	Aru	237
11	Buwakang	Kepala	89
12	Siri	Aru	241
Jumlah Wajib Pajak			3410

Dari data tersebut diatas dapat dipahami bahwa pada akhir abad ke-19 seluruh wilayah yang tergabung dalam kearungan Distrik Bulu-Bulu telah wajib membayar pajak. Wajib pajak tersebut merupakan indikator positif dalam penerimaan pemasukan Hindia Belanda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regent Bulu-Bulu berhasil menerapkan pajak kolonial dilain pihak begitu memberatkan rakyat (Limbugau, 1985: 76).

Perkembangan Pemerintahan

Pada dasarnya bekas wilayah konfederasi *Tellu Limpoë* mulai merasakan dampak perubahan politik dan kekuasaan kolonial pada tahun 1906. Pada saat itu, perubahan sistem pemerintahan tradisional diubah menjadi lebih modern. Perubahan ini sangat berdampak kepada kepada bangsawan utamanya dalam hal perpolitikan. Hak-hak istimewa yang dimiliki pada masa kerajaan semakin pudar dan mulai tersingkirkan. Peran dalam pemungutan hasil-hasil pajak masyarakat

juga berangsur-angsur berubah sebab perluasan kekuasaan kolonial merambah segala sektor.

Perluasan kekuasaan tersebut dilandasi oleh berbagai berbagai landasan seperti halnya pada daerah-daerah lain di Indonesia bahwa perluasan kekuasaan itu dilakukan dengan maksud antara lain:

1. Belanda berusaha menciptakan keamanan dan ketentraman untuk menjamin keberhasilan dari usaha-usaha penanaman modal swastanya dan modal asing lainnya di Indonesia.
2. Berusaha menguasai tanah yang potensial untuk usaha pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal swasta.
3. Berusaha mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya di kerajaan-kerajaan di luar Jawa. (Poelinggomang, dkk, 2005: 14).

Oleh karena itu, dengan menggunakan kekuatan militernya Belanda berusaha memerangi kerajaan-kerajaan, baik yang masih merdeka maupun yang sudah terikat dengan perjanjian persahabatan atau yang sudah mengaku tunduk pada kekuasaan Hindia Belanda. Selain alasan-alasan resmi tersebut, sesungguhnya ada pula kepentingan lain didalamnya. Kepentingan itu berlaku bagi para pemegang modal yang ingin mengambil keuntungan lebih besar dari daerah yang potensial terutama dalam bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Raja-raja yang berhasil ditaklukkan dipaksa untuk menandatangani pernyataan takluk kepada Pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian ini dikenal dengan nama *Korte Verklaring* atau Pernyataan Pendek yang isinya bahwa:

1. Raja-raja tersebut mengaku tunduk kepada Pemerintah Belanda.
2. Mengakui daerah kerajaannya sebagai bagian dari pada wilayah Hindia Belanda.
3. Tidak akan berhubungan dengan pemerintahan asing tanpa seizin pemerintah Belanda (Abduh, 1981: 96-97).

Perubahan tatanan birokrasi juga diikuti oleh hilangnya kedudukan politik, ekonomi dan sosial pada kaum bangsawan dan pejabat lokal yang berakibat pada hilangnya sumber pendapatan. Jika dahulunya pejabat lokal

bisa mengambil alih pajak atas tanah rakyat atau memungut upah pertanian, maka setelah pengambil alihan kekuasaan mereka tidak bisa lagi melakukannya. Hak-hak istimewa yang dimilikinya dicabut sehingga kedudukannya sama seperti orang pribumi. Berbagai tuntutan dan reaksi politikpun marak terjadi akibat sedikit sekali kesempatan yang diberikan penduduk pribumi (Tashadi dkk, 1991: 36).

Derajat kepemimpinan kelompok bangsawan dalam sistem pemerintahan kolonial begitu memprihatinkan bahkan menjurus kearah pelecehan. Sebagai abdi kolonial, tak banyak yang dapat dilakukan sebab sanksi militer yang sangat keras telah menanti sebagaimana ungkapan Baron berikut ini:

Meskipun pada masa pemerintahan Gubernur A. J. Baron Quarlesde Quarles (1908-1910) ada tawaran kepada bangsawan tinggi seperti Karaeng Mappanyukki dan Karaeng Bontonompo untuk bersama-sama melaksanakan pemerintahan dengan tugas sebagai mata-mata, sebagai pengawal atau bertugas mempengaruhi bangsawan lainnya agar dapat mengakui kekuasaan Belanda, akan tetapi ajakan itu justru sangat melukai perasaan mereka karenanya mereka menolak. (A.J. Baron).

Dengan kondisi yang seperti ini, para bangsawan Bersama para pengikutnya sedikit demi sedikit berani untuk melawan dan merebut kembali hak yang telah hilang. Ini juga merupakan pernyataan sikap perjuangan anti kolonial. Pada awalnya, para bangsawan melancarkan aksinya secara tersembunyi kemudian secara terang-terangan. Semangat patriotik terus menggelora meskipun mereka sadar akan berhadapan dengan kekuatan militer yang jauh lebih kuat dan terorganisir dengan baik.

Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berjuang. Perjuangan yang mereka lakukan sedikit mebuahkan hasil menjelang tahun 1930-an. Gejolak para bangsawan yang haknya telah ditiadakan mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah berusaha untuk mendekati kelompok tersebut dengan tujuan untuk mencegah kelompok bangsawan terlibat dalam organisasi sosial maupun organisasi politik. Pemulihan hak kelompok bangsawan bekas kerajaan menjadi tawaran pemerintah kolonial dalam mewujudkan keinginan itu (Kadir, 1984: 89).

Sinjai yang pada saat itu merupakan *onderafdeling* di bawah *afdeling* Bonthain juga mengalami hal yang sama. Pada awal pendudukan Belanda di Sinjai regen merupakan pejabat tertinggi kemudian mengalami perubahan menjadi adat *gemenschap* dengan kepala pemerintahannya adalah Aru atau pemerintah kepala adat. Pemerintahan kepala adat tidak bertahan lama dengan bergantinya menjadi distrik. Sinjai pada saat itu terdiri dari empat distrik dan masing-masing distrik memiliki distrik bawahan yang berbeda-beda tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya. Pembagian distrik-distrik tersebut sebagai berikut:

1. Distrik Tondong terdapat tujuh distrik bawahan, terdiri dari:
 - a. Salohe.
 - b. Pao.
 - c. Kampala.
 - d. Lengkese.
 - e. Tokka.
 - f. Kolasa.
 - g. Tondong.

2. Distrik Bulu-Bulu Timur terdapat empat belas distrik bawahan, terdiri dari:
 - a. Biringere.
 - b. Bontopale.
 - c. Sanjai.
 - d. Rombo.
 - e. Biroro.
 - f. Mannanti.
 - g. Pattongko.
 - h. Buwa.
 - i. Eroluhe.
 - j. Tongke-Tongke.
 - k. Pattalassang.
 - l. Kaloling.

- m. Buakang.
 - n. Maroanging.
3. Distrik Bulu-Bulu Barat terdapat sebelas distrik bawahan, terdiri dari:
- a. Takkuro.
 - b. Nangka.
 - c. Sompong.
 - d. Lempangang.
 - e. Kalamisu.
 - f. Gareccing.
 - g. Biri.
 - h. Bongkong.
 - i. Talle.
 - j. Kanrung.
 - k. Kompany.
 - l. Ammessing.
4. Distrik Lamatti terdapat dua belas distrik bawahan terdiri dari:
- a. Bongki.
 - b. Panreng.
 - c. Lappa.
 - d. Balangnipa.
 - e. Aruhu.
 - f. Jerrung.
 - g. Bulupoddo.
 - h. Mangopi.
 - i. Sereng.
 - j. Barang.
 - k. Cenrana.
 - l. Raja (Rasyid, 1989: 55).

Distrik bawahan tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala adat (adat gemenschap). Adapun pemilihan kepala adat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung yang diwakili oleh masing-masing kepala distrik bawahan (arung). Selain itu, pejabat daerah adat diemban oleh bangsawan lokal yang dipilih oleh dewan hadat setempat. Pemilihan pejabat itu mengikuti aturan kebiasaan, sehingga yang boleh dan dapat dipilih adalah bangsawan yang memiliki kemurnian darah kebangsawanan atau yang tertinggi derajat kebangsawannya di antara anggota bangsawan di daerah itu. Disamping persyaratan ini, pemerintah Belanda menambah persyaratan lain yaitu, kesediaan dan dapat bekerjasama. Persyaratan terakhir ini yang terpenting karena pengangkatan harus mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda (“Memori van Overgave Celebes I”, Bahan Arsip Den Haag: ARA, kotak AA. 205: 4).

Pemilihan kepala adat (adat gemenschap) Tondong misalnya, dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sejak 15 Agustus 1930. Pada saat itu setiap distrik bawahan diwakili oleh dua sampai empat orang yang mewakili daerah atau kampung pada masing-masing-masing distrik bawahan. Setiap distrik bawahan diwakili oleh Arung (Aroe), Gellarang, Halifah (Khalief), ataupun Doja (Chodjah). Dari hasil pemilihan kepala adat tersebut ketujuh distrik bawahan ini menetapkan Bagenda sebagai Aroe Tondong. (Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Bantaeng No Reg. 11).

Pemilihan ini dihadiri langsung oleh Controleur Sinjai (*Controleur van Sindjai*). Distrik bawahan yang memberikan hak suaranya sebagai berikut:

1. Salohe diwakili oleh Batji (Aroe Salohe) dan Siri (Kepala Salohe).
2. Pao diwakili oleh Tjoenke (Gellarang Pao), Mangali (Bidal Pao), dan Leho (Bidal Pao).
3. Bongki diwakili oleh Takka (Gellarang Bongki), Toenrang (Chatib Bongki), Taroeppa (Gellarang Lengkese) dan Bandoe (Chodjah Bongki).
4. Kolasa diwakili oleh Betjeleboe (Gellarang Kolasa), dan Tanja (Bidal Kolasa).
5. Kampala diwakili oleh Lanroeng (Aroe Kampala), Makkareso (Kepala Kampala), dan Sabang (Chodjah Kampala).

6. Tondong diwakili oleh Lessong (Kalief Tondong), Baddoe Kariem (Imam Tondong), dan Hamida (Chatib Tondong).
7. Tokka diwakili oleh Oekkoesoe (Chatib Timbasoang), dan Semmang (Chatib Tokka), (Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Bantaeng No Reg. 22).

Pada saat perubahan atau penataan pemerintahan terdapat total 83 kepala kampung (*Hoofden in rechstreek gebied*) yang dipulihkan. Arsip yang berjudul *Gouvernement Groote Oost Residentie en Onderhoorigheden* menjelaskan pejabat-pejabat *onderafdeling* Sinjai sebagai berikut:

1. Oost Boelo-Boelo oleh Aroeng Mappatoba.
2. Lamatti oleh Aroeng Indara.
3. Tondong oleh Aroeng Genda.
4. West Boelo-Boelo oleh Aroeng Andi Tombang.
5. Manipi oleh Aroeng Djalangkara.
6. Manimpahoi oleh Aroeng Padoeppa (Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Arsip Celebes nomor 16 tahun 1936).

Dengan demikian, usaha pembaharuan struktur pemerintahan Hindia Belanda itu, merubah pengistilahan distrik menjadi daerah adat (*adat gemeenschap*). Setiap pemerintahan daerah adat dibagi-bagi lagi dalam beberapa daerah yang disebut dengan kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung. Jadi, setiap distrik berubah menjadi daerah adat dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda daerah adat dijadikan sebagai wilayah pemerintahan bagi pejabat pemerintah bumiputra, bagian serta bawahan dari wilayah cabang pemerintah dan kontrolir.

Untuk menentukan wilayah daerah adat, secara umum ditentukan berdasarkan pada latar belakang sejarah dari wilayah itu sebagai suatu kesatuan pemerintah lokal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan bangsawan dalam melaksanakan pemerintahan. Kedudukan tersebut berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942.

PENUTUP

Kolonialisme Hindia Belanda di *Tellu Limpoe* layaknya pedang Damaskus yang bersifat superplastis. Pedang fenomenal ini memiliki kemampuan deformasi tetap, tanpa retak hingga seribu persen. Betapa tidak kolonialisme ini berhasil merubah wajah seluruh kerajaan yang ada beserta semua unit penting didalamnya menjadi lebih modern. Sinjai yang dulunya tergabung dalam konfederasi *Tellu Limpoe* ditaklukkan lalu dijadikannya *Gouvernementlanden*. Konfederasi kerajaan yang berdaulat dilebur kedalam distri-distrik bagian timur (*Ooster Districten*).

Ditengah sejumlah penolakan bahkan pertumpahan darah, “cengkraman” kolonialisme tetap saja tak bisa terbendung. Konfederasi *Tellu Limpoe* harus relah “termodernkan” melalui sistem pemerintahan sampai kepada unsur-unsur pejabat terkecil. Sebagai cabang pemerintahan (*Onderafdeling*) dibawah *Afdeling Bonthain*, perubahan ini tentu saja menjadi pukulan telak dimulai sejak menanamkan kekuasaan hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dkk. 1981. *Sejarah Perlawanan Imprealisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Dep: P&K.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 21 Februari 1918. “*Laporan Negara (staatsblaad No. 22)*”.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1862. “*Kolonial Verslaag (lembaran negara Negara)*”.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. *Laporan Controleur atas Pemilihan Bagenda sebagai Adatgemenschap Tondong*. Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 11.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. “*Laporan Pelaksanaan Pemerintahan I. Sinroe Daeng Abang, Tabbo Daeng Mappoeji, dan Bagenda sampai 1940.*” Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 11.

- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Laporan Controleur Sinjai tentang Pemilihan Umum Adatgemenschap Tondong oleh Seluruh Distrik Bawahan*". Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 16.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Pengangkatan Bagenda sebagai Adatgemenschap Dilengkapi dengan Susunan Silsilah Kerajaan*". Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 22.
- Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. "*Pernyataan Adatgemenschap (Verzoeken van Vergunning vragen als bedoeld art. 17 laatste alinea reglement notaries ambt)*". Arsip Afdeling Bantaeng No. Reg. 22,
- Bigalke, W. Terance. 2016. *Sejarah Sosial Tana Toraja*. Yogyakarta: Ombak.
- Christine, Nadia Ayu "*Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942*" AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No 1, Maret 2014, hlm. 140.
- Kamaruddin. 1966. *Perkembangan Kerajaan Tondong, Bulu-Bulu dan Lamatti*. (Terjemahan Lontara).
- Kamaruddin. 1994. "Menelusuri Hari Jadi Sinjai untuk Menyongsong Masa Depan yang Lebih Cerah. *Makalah Seminar "Sinjai"* Sinjai. 2-3 September 1994.
- Limbugau, Daud. 1985. "Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874", *Tesis*, Universitas Gajah Mada Jogjakarta
- Los, M. A. "*Memorie van Overgave Onderafdeling Pangkajene*" (Mei 1933-Juli 1934), (bahan Arsip, Leiden: KITLV, H. 903).
- Mattulada. 2014. "Menelusuri Hari Jadi Sinjai Berdasarkan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan". *Makalah Seminar No Makalah: MU – 02.02*. Sinjai. 2-3 September 2014.
- Melamba, Basrin. 2011. *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906-1942*. Kendari: Penerbit Larasan, Program Studi Sejarah FKIP UNHALU.
- Mappangara, Suriadi. 1996. *Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-160)*, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Patunru, Daeng Abdurrazak. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Perelaer, M.T.H. 1872. *De Bonische Expedition Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 18959-1860*, Leiden: Gualth. Kolft, eerste deel.

- Poelinggomang, L. Edward. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Kota Makassar 1906-1946*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, Makassar: Balitbangda.
- Poelinggomang, “Nasional La Sinrang Tokoh Pejuang Kemerdekaan Dan Kedaulatan”, *Makalah Seminar* Makassar Golden Hotel: 12 Maret 2007.
- Rasyid, Abd. 1989. *Pendudukan Belanda di Kerajaan Bulu-Bulu Pada Abad ke XIX-XX*, Skripsi, Ujung Pandang.
- Studi Kelayakan Benteng Balanipa Kab. Sinjai*. 1985. Ujung Pandang: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan.
- Swaart, H. N. A. “*Momorie van Overgave*” Agustus 1906-Mei 1908, “*Memori van Overgave Celebes I*”. Den Haag: ARA, kotak AA. 205.

LEKSIKON PERTANIAN TRADISIONAL SUKU SASAK DI PULAU LOMBOK: KAJIAN ETNOLINGUISTIK

TRADITIONAL AGRICULTURE LEXICONS OF SASAK TRIBE IN LOMBOK ISLAND: ETHNOLINGUISTIC STUDIES

Dian Mahendra

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Buluksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: henndra94@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.243

Naskah Diterima: 24 Januari 2021 Naskah Direvisi: 21 Juni 2021

Naskah Disetujui: 09 Juli 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pikir suku Sasak yang tercermin dalam leksikon-leksikon pertanian tradisional yang mereka gunakan. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan etnolinguistik. Data berupa leksikon-leksikon tradisional suku Sasak diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Dengan metode distribusional teknik bagi unsur langsung, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan satuan-satuan kebahasaan yang membentuknya. Setelah itu, data dianalisis dengan teori semantik leksikal, gramatikal, dan kultural. Hasil analisis data menunjukkan bahwa aktivitas pertanian bagi suku Sasak tradisional tidak hanya dipandang sebagai mata pencaharian. Akan tetapi, mereka memandang aktivitas bertanam padi sebagai sesuatu yang sakral yang berhubungan dengan keharmonisan hubungan antara manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Melalui leksikon-leksikonnya, suku Sasak mengajarkan tentang bagaimana manusia mengelola kebersamaan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, mereka juga mengajarkan melalui mantra-mantra yang digunakan tentang bagaimana menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan.

Kata Kunci: Leksikon, Pertanian Tradisional, Suku Sasak, Etnolinguistik

Abstract

This study aims to identify the mindset of the Sasak tribe which is reflected within traditional agricultural lexicon they use. An ethnolinguistic approach is used to achieve this goal. Data in the form of the conservative vocabulary of the Sasak tribe were obtained through literature study and interviews. With direct constituent technique, the obtained data are classified based on the linguistic units that make it up. After that, the data were analyzed using lexical, grammatical and cultural semantic theory. The results show that agricultural activities for the traditional Sasak tribe are not only seen as a livelihood. However, they view rice cultivation as something sacred related to the harmonious relationship between humans and all of God's creatures. The Sasak tribe teaches us about how humans manage togetherness among God's creatures to achieve a goal through their lexicon. In addition, they also teach us through the mantras used on how to maintain a vertical relationship with God.

Keywords: *Lexicon, Traditional Agriculture, Sasak Tribe, Ethnolinguistics*

PENDAHULUAN

Bahasa dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat. Nababan (1984: 50) menyebutkan bahwa bahasa merupakan bagian inti dan terpenting dari kebudayaan. Bahasa terlibat dalam semua aspek kebudayaan, paling sedikit dalam hal penamaan atau leksikon dari semua aspek-aspek kebudayaan tersebut. Terkait hal ini, Wierzbicka (1997) menyatakan bahwa leksikon-leksikon yang merangkum kategori-kategori konseptual khusus budaya dapat mencerminkan dan mendorong perspektif tertentu tentang tindakan dan peristiwa manusia. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa leksikon khusus budaya adalah alat konseptual yang mencerminkan pengalaman masa lalu masyarakat dalam melakukan dan berpikir tentang sesuatu dengan cara tertentu. Saat masyarakat berubah, leksikon-leksikon tersebut juga dapat secara bertahap dimodifikasi dan dibuang.

Salah satu kelompok leksikon yang menunjukkan eratnya hubungan bahasa dengan budaya penuturnya adalah leksikon-leksikon di bidang pertanian tradisional suku Sasak di Pulau Lombok. Leksikon ini dianggap menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Pertama, sistem pertanian tradisional suku Sasak yang telah digantikan dengan sistem pertanian modern masih bisa dikenali melalui leksikon-leksikonnya. Misalnya, leksikon-leksikon seperti *kawin pade* [kawin pade] ‘menikahkan padi’, *bau*

inen pade [bawu inən pade] ‘mengambil induk padi’, *dede lowong* [dede lɔwɔŋ] ‘meninabobokan tanaman padi’, *gantong bunge* [gantɔŋ buŋə] ‘menggantung kapas’, dan *gelingen pade* [gəlɪnɪŋan pade] ‘mengelilingi padi’ merupakan leksikon aktivitas pertanian yang hampir tidak pernah dilakukan lagi dalam sistem pertanian modern. Akan tetapi, penutur bahasa Sasak (BS) di masa ini masih bisa mempelajari aktivitas pertanian tersebut melalui leksikon-leksikon yang telah diinventarisasi.

Kedua, tersedianya leksikon-leksikon pertanian tradisional yang dapat dipelajari oleh generasi masa kini membuka peluang untuk meneruskan dan mengembangkan kebudayaan bertani tradisional suku Sasak. Dengan kalimat lain, dengan mempelajari leksikon-leksikon tersebut, petani modern dapat mengadopsi beberapa cara bertani tradisional untuk diterapkan dalam sistem pertanian modern.

Ketiga, banyak masyarakat modern, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, menyatakan bahwa hasil bertani nenek moyangnya dianggap menghasilkan beras yang lebih berkah dibandingkan dengan hasil pertanian modern (Sutarman: narasumber). Sutarman menyatakan:

“Lamun dengan laeq, timaqne ribet tate carene betaletan, laguq ye berkahan hasil berasne ketimbang dengan nane. Kumbeqne ampoq ku kene ngeno? Sengaq dengan laeq ndeqne wah pegat ntanne inget jok Nenek Saq Kuase. Sendeqman betaletan bacene Bismillah, terus betabeq juluq kance tanaq. Sendeqman nenggale, araq acare selamatan sampi. Sewahan nenggale endah araq acare selamatan sampi. Angkaq ye patoh dengan laeq kance alam. Kance sampi ye patoh, kance tanaq masih ye patoh, kance aiq ye patoh, dait saq lain-lain. Ye ampoqne berkah hasilne [...].”

‘Kalau orang dahulu, walaupun cara bertaninya ribet, tetapi beras yang dihasilkan lebih berkah daripada yang sekarang. Kenapa saya berkata demikian? Karena orang dulu tidak pernah putus ingatannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum bercocok tanam, mereka membaca *Bismillah* lalu meminta izin kepada tanah. Sebelum membajak sawah, ada acara selamatan sapi. Sesudah membajak juga ada acara selamatan sapi. Makanya orang dulu akur (harmonis) dengan alam. Akur dengan sapi, akur dengan tanah, akur dengan air, dan sebagainya. Itu sebabnya hasilnya berkah [...].’

Dari pernyataan di atas, sistem pertanian tradisional perlu digali lebih lanjut melalui leksikon-leksikonnya. Dengan demikian, generasi masa kini dapat mengetahui pola pikir petani tradisional Sasak dalam hal bertanam padi. Selain itu, generasi sekarang juga dapat mengetahui cara petani tradisional mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penanaman padi, seperti cara menanggulangi hama tanaman, cara mengobati tanaman yang sakit, dan sebagainya.

Dari beberapa alasan di atas, kajian etnolinguistik perlu dilakukan untuk mengungkap makna tersembunyi di balik leksikon-leksikon yang digunakan oleh penutur BS dalam bertani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pandangan hidup penutur BS dalam bertani yang tercermin dalam bentuk dan makna leksikon pertanian yang digunakannya. Identifikasi bentuk berkaitan dengan aspek formal bahasa yakni satuan lingual apa yang digunakan dalam leksikon tersebut.

Sementara itu, aspek makna leksikon berkaitan dengan aspek formal bahasa dan aspek kultural. Aspek formal akan membicarakan tentang semantik leksikal dan semantik gramatikal leksikon, sedangkan aspek kultural akan membicarakan mengenai makna kultural leksikon. Dari makna kultural tersebut dapat diketahui bagaimana penutur BS memandang aktivitas bertani secara tradisional.

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan oleh para ahli bahasa. Misalnya, dalam bahasa Jawa, leksikon pertanian tradisional pernah dikaji oleh beberapa linguist (seperti Agustina, 2013; Asmara, 2017; Asmara and Khamimah, 2019; Luthfiana, 2018; Riyono, 2014; Suhandono, et al. 2004). Kajian mereka fokus pada leksikon perkakas pertanian tradisional yang saat ini sudah tidak lagi digunakan. Temuan mereka menyatakan bahwa leksikon pertanian tradisional suku Jawa mengalami keterancaman dan harus dilestarikan. Selain di Jawa, leksikon pertanian tradisional juga dikaji di beberapa wilayah Nusantara lainnya, seperti di Bali (Aridawati, 2020; Suryasa and Dewi, 2018), Bima (Umiyati, 2011), NTT (Genua, 2016), dan Sulawesi (Podada, 2018). Aneka ragam kajian tersebut menghasilkan temuan yang beraneka ragam pula.

Selanjutnya, leksikon pertanian tradisional suku Sasak (khususnya leksikon menanam padi) di pulau Lombok juga pernah dikaji oleh beberapa linguist (Saharudin, 2010, 2016, 2019a, 2019b; Syarifuddin, Saharudin, and Syarifuddin, 2012). Hanya saja,

kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli tersebut difokuskan pada topik-topik khusus sehingga jumlah leksikon yang diidentifikasi terbatas. Adapun topik-topik yang mereka kaji meliputi kategori semantik leksikon, simbol dan mitos beras, dan identifikasi pola pikir dan perilaku masyarakat Sasak dalam ranah pertanian. Berangkat dari temuan-temuan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperluas temuan sebelumnya terkait leksikon pertanian tradisional suku Sasak dengan batasan ruang lingkup seputar penanaman padi.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi leksikon dalam penelitian ini, peneliti melakukan investigasi terhadap definisi leksikon yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa. Secara umum, leksikon dapat diartikan sebagai daftar kosakata suatu bahasa (Chaer, 2014:16; Kridalaksana, 2009a:142, 2009b:138–39). Dengan merujuk pada definisi ini, maka bentuk leksikon hanya terbatas pada kata-kata, belum jelas apakah tataran di atas kata juga termasuk ke dalam leksikon atau tidak. Dalam beberapa penelitian yang mengkaji leksikon, sering kali ditemukan leksikon yang berupa kelompok kata.

Dalam hal ini, apa yang dikemukakan oleh Neef dan Vater (2006:226) patut dipertimbangkan. Mereka mendefinisikan leksikon sebagai komponen pra-sintaksis dari tata bahasa. Komponen tersebut dapat berupa kata, baik dasar maupun turunan dan dapat pula berupa kelompok kata (frasa). Pandangan ini didukung oleh beberapa ahli lain (seperti Crystal, 2008; Finch, 2000; Halliday and Yallop, 2007; Heine and Kuteva, 2004; Murphy, 2003; Murphy and Koskela, 2010; Richards and Schmidt, 2010; Trask, 1993) yang memandang leksikon sebagai bagian dari tata bahasa.

Kajian leksikon dalam penelitian ini dibingkai dengan pendekatan etnolinguistik. Etnolinguistik atau linguistik antropologi adalah cabang ilmu linguistik yang menelaah bahasa, baik strukturnya maupun kosakatanya berdasarkan cara pandang dan budaya masyarakat penuturnya yang bertujuan untuk menyibak atau mengungkap budaya masyarakat tersebut (Baehaqie 2017:13–17; Duranti, 1997:1–5; Kridalaksana, 2009a:59; Riley, 2007:11; Sharifian, 2017:1; Völkel, 2010:1–3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnolinguistik untuk mengungkap cara pandang suku Sasak dalam bertani padi yang tercermin melalui leksikon-leksikon yang digunakan. Data yang disajikan berbentuk leksikon-leksikon di bidang pertanian tradisional Sasak. Data tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara (Endraswara, 2006:155). Wawancara dilakukan dengan tiga orang narasumber, yakni Mariah¹, Sarinun², dan Sutarman³.

Setelah data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan satuan-satuan kebahasaan yang membentuknya. Klasifikasi tersebut dilakukan dengan metode distribusional teknik bagi unsur langsung (Kesuma, 2007:55; Sudaryanto, 2015:37). Dengan teknik ini dapat diketahui apakah satuan kebahasaan berupa leksikon tersebut dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil atau tidak.

Setelah diklasifikasi, data tersebut dianalisis dengan teori semantik leksikal, gramatikal, dan kultural. Semantik leksikal digunakan untuk mengidentifikasi makna sentral dari leksikon yang terdiri dari satu morfem (monomorfemis) (Wijana, 2015:28). Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan bantuan beberapa kamus BS (di antaranya Azhar, 1997; Hakim, et al. 2017; dan Thoir, et al. 2001). Sementara itu, semantik gramatikal digunakan untuk mengetahui makna yang timbul akibat bergabungnya satuan kebahasaan yang satu dengan satuan kebahasaan lainnya (lihat Chaer, 2013:62).

Makna ini dimiliki oleh leksikon yang terdiri dari dua morfem atau lebih (polimorfemis). Akhirnya, semantik kultural digunakan untuk mengidentifikasi makna budaya dari leksikon tersebut. Makna semacam ini dianalisis dengan metode studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Setelah dianalisis, data-data tersebut disajikan secara ortografis disertai transkripsi fonetis dan glos.

¹Usia 75 tahun, berdomisili di Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

²Usia 48 tahun, berdomisili di Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

³Usia 75 tahun, berdomisili di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

PEMBAHASAN

Aneka Bentuk dan Makna Leksikon Pertanian Tradisional Suku Sasak

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bentuk dan makna leksikon berdasarkan aspek formal bahasa. Pembahasan ini dipandang penting karena kajian etnolinguistik sangat bertumpu pada dimensi leksikon dan dimensi semantik bahasa beserta budaya pemiliknya (Abdullah, 2014:19). Terkait bentuk leksikon, analisis data menunjukkan bahwa leksikon pertanian tradisional suku Sasak terdiri atas tiga bentuk, yakni leksikon berbentuk kata monomorfemis, kata polimorfemis, dan frasa. Ketiga bentuk leksikon tersebut akan dijabarkan pada bagian berikut.

a. Kata monomorfemis

Leksikon berbentuk kata monomorfemis merupakan leksikon yang terdiri dari satu morfem dan mampu berdistribusi secara bebas (Kentjono 2009: 151). Misalnya, leksikon *alang* [alan] merupakan leksikon yang berbentuk kata monomorfemis karena hanya terdiri dari satu morfem dan morfem ini bersifat bebas. Dikatakan bersifat bebas karena morfem ini tanpa bergabung dengan morfem lain dapat digunakan dalam pertuturan. Dengan kata lain, morfem ini mampu berdiri sendiri secara morfologis dan sintaksis tanpa bergabung dengan morfem lainnya (Chaer, 2015:17; Muslich, 2014: 17; Ramlan, 2001:29; Sukri, 2008:15). Secara morfologis, morfem ini mempunyai makna leksikal, yakni ‘tempat penyimpanan padi’, sedangkan secara sintaksis morfem ini mampu mengisi salah satu fungsi sintaksis, baik sebagai subjek maupun objek.

Selanjutnya, semua leksikon berupa kata monomorfemis tersebut merupakan leksikon yang berkelas nomina. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk kata *lowong* [lowoŋ]. Kata ini mempunyai dua kelas kata, yakni nomina (N) dan verba (V). Sebagai nomina, kata *lowong* bermakna ‘tanaman padi’, sedangkan sebagai verba kata ini bermakna ‘kegiatan menanam padi’. Proses perubahan kelas kata dari nomina menjadi verba ini dilakukan secara *derivasi zero*, yakni proses morfologis yang menghasilkan kata yang memiliki identitas yang berbeda tanpa perubahan bentuk.

Identitas yang berbeda tersebut dapat berupa perbedaan kelas kata maupun perbedaan fitur semantis. Dalam pembentukan kata *lowong* ini, *lowong* (N) dianggap sebagai dasar pembentukan bagi *lowong* (V). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa satuan lingual yang definisi semantisnya bergantung kepada satuan yang lain disebut sebagai keluaran dan yang lainnya disebut sebagai masukan (lih. Subroto 2012:16–17).

Adapun leksikon-leksikon yang tergolong ke dalam kelompok kata monomorfemis dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut juga menyajikan makna leksikal dari leksikon-leksikon tersebut.

Tabel 1. Leksikon berbentuk kata monomorfemis

No	Leksikon	Glos
1	<i>alang</i> [alaŋ]	‘tempat penyimpanan padi yang atapnya berbentuk kerucut’
2	<i>alu</i> [alu]	‘alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu’
3	<i>anat</i> [anaŋ]	‘potongan rumput yang halus’
4	<i>inen</i> [inəŋ]	‘induk’
5	<i>geneng</i> [gənəŋ]	‘wadah penumbuk padi yang terbuat dari kayu’
6	<i>kleong</i> [kleyəŋ]	‘alat untuk menampi beras’
7	<i>lambuk</i> [lambək]	‘dedak halus’
8	<i>lowong</i> [lowoŋ]	‘N: tanaman padi; V: kegiatan menanam padi’
9	<i>lumbung</i> [lumbuŋ]	‘tempat penyimpanan padi’
10	<i>moto</i> [moto]	‘potongan beras’
11	<i>pade</i> [padə]	‘padi’
12	<i>rampak</i> [rampak]	‘wadah penumbuk padi yang terbuat dari kulit kerbau’
13	<i>rendeng</i> [rendeŋ]	‘alat penumbuk padi yang terbuat dari bambu’
14	<i>sambi</i> [sambi]	‘tempat penyimpanan padi yang atapnya berbentuk limas’
15	<i>sendor</i> [səndər]	‘wadah penyimpanan beras yang berbentuk gentong besar’
16	<i>warige</i> [warigə]	‘papan yang berisi sistem kalender tradisional suku Sasak’

b. Kata Polimorfemis

Di samping berbentuk kata monomorfemis, leksikon pertanian tradisional suku Sasak juga ada yang berbentuk kata polimorfemis. Kata polimorfemis merupakan kata yang terdiri dari dua morfem atau lebih sebagai hasil dari proses morfologis (Kentjono

2009:151). Dalam BS, proses morfologis dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni afiksasi, reduplikasi, dan komposisi (lih. Aridawati et al. 1995; Husnan, Raudloh, and Shubhi 2019). Meskipun demikian, leksikon berbentuk kata polimorfemis dalam penelitian ini hanya dibentuk melalui proses afiksasi dan reduplikasi. Adapun leksikon-leksikon yang dibentuk melalui proses afiksasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan beberapa proses afiksasi dalam pembentukan leksikon disertai dengan maknanya. Perlu ditekankan bahwa makna yang disajikan dalam tabel di atas adalah makna gramatikal, yakni makna kata yang muncul akibat pertemuan morfem yang satu dengan yang lain. Adapun proses afiksasi yang terdapat dalam leksikon tersebut antara lain afiksasi prefiks {bə-}, {ŋ-}, {pəŋ-}, dan {sə-}; sufiks {-an}; dan konfiks {kə-an}. Afiksasi dengan prefiks nasal {ŋ-} memiliki beberapa alomorf, seperti alomorf {m-} pada kata *mataq*; {n-} pada kata *naton*, *nempiq*, dan *nujaq*; {ŋ-} pada kata *ngaro*, *ngempes*, *ngirek*, *ngome*, dan *ngungkah*; dan {ŋ-} pada kata *nyaweq*.

Tabel 2. Leksikon Berbentuk Kata Polimorfemis Berafiks

No.	Leksikon	Proses Afiksasi	Glos
1	<i>bebales</i> [bəbələs]	{bə-} + /bales/	‘membalas’
2	<i>berekeng</i> [bərekɛŋ]	{bə-} + /rekeng/	‘berhitung’
3	<i>besiru</i> [bəsiɾu]	{bə-} + /siɾu/	‘bersama-sama’
4	<i>kemberasan</i> [kəmbərasan]	{kə-an} + /beras/	‘wadah penyimpanan beras’
5	<i>mataq</i> [mataʔ]	{ŋ-} + /mataq/	‘memanen’
6	<i>naton</i> [natɔn]	{ŋ-} + /aton/	‘merontokkan padi’
7	<i>nempiq</i> [nəmpiʔ]	{ŋ-} + /tempiq/	‘menampi’
8	<i>nenisan</i> [nənisan]	/nenis/ + {-an}	‘membersihkan padi’
9	<i>ngampar</i> [ŋampar]	{ŋ-} + /ampar/	‘menyemai bibit’
10	<i>ngaro</i> [ŋaro]	{ŋ-} + /aro/	‘mengolah tanah pertanian’
11	<i>ngempes</i> [ŋəmpəs]	{ŋ-} + /empes/	‘menghancurkan bongkahan tanah’
12	<i>ngirek</i> [ŋirək]	{ŋ-} + /irek/	‘mengolah tanah agar berlumpur’
13	<i>ngome</i> [ŋomə]	{ŋ-} + /ome/	‘mengangkat rumput busuk dari tanah’
14	<i>ngungkah</i> [ŋuŋkah]	{ŋ-} + /ungkah/	‘membongkar tanah’
15	<i>nujaq</i> [nujaʔ]	{ŋ-} + /tujaq/	‘menumbuk padi’
16	<i>nyaweq</i> [ɲawəʔ]	{ŋ-} + /saweq/	‘menandai sawah’
17	<i>penyaweq</i> [pəɲawəʔ]	{pəŋ-} + /saweq/	‘alat yang digunakan untuk menandai sawah’
18	<i>sepelepas</i> [səpələpas]	{sə-} + ({pə-} + /lepas/)	‘satu genggam tanaman padi’
19	<i>sepenetep</i> [səpənətəp]	{sə-} + ({pə-} +	‘empat genggam yang diikat menjadi

		/tetep/)	satu'
20	<i>secekel</i> [səcəkəl]	{sə-} + /cekel/	'dua baris yang diikat menjadi satu'
21	<i>segutus</i> [səgutos]	{sə-} + /gutut/	'setiap dua <i>cekel</i> '
22	<i>sedaut</i> [sədawut]	{sə-} + /daut/	'setiap dua puluh ikat'
23	<i>seloq</i> [səloʔ]	{sə-} + /loq/	'setiap sepuluh <i>daut</i> '
24	<i>sememen</i> [səməmən]	{sə-} + /memen/	'satu ikat terdiri dari dua genggam'
25	<i>sekance</i> [səkancə]	{sə-} + /kance/	'setiap dua <i>memen</i> '
26	<i>sepongos</i> [səpəŋɔs]	{sə-} + /pongos/	'satu ikat bibit padi'

Selain itu, tabel 2 juga menunjukkan adanya proses kombinasi afiks, yakni pada kata *sepelepas* dan *sepenetep*. Kedua kata ini dibentuk melalui pelekatan afiks {sə-} pada bentuk dasar *pelepas* dan *penetep*. Bentuk dasar *pelepas* dan *penetep* ini tampaknya merupakan bentuk polimorfemis juga. Oleh karena itu, kedua bentuk dasar tersebut masih bisa dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil, yakni morfem afiks {pe-} dan bentuk dasar *lepas* dan *tetap*.

Selain proses afiksasi, leksikon pertanian tradisional suku Sasak juga dapat dibentuk melalui proses reduplikasi atau perulangan. Dalam hal ini ada dua leksikon yang mencakup fenomena tersebut, yakni kata ulang *ngekis-kis* [ŋəkis-kis] 'kegiatan membersihkan rerumputan yang mengganggu tanaman padi dengan alat berupa *kis-kis*', dan *ngempah-empah* [ŋəmpah-əmpah] 'kegiatan menumbuk padi sampai sebagai padi menjadi beras'. Kedua leksikon berupa kata ulang tersebut dibentuk melalui proses reduplikasi morfemis yang dilakukan secara serentak dengan pengimbuhan prefiks nasal {ŋ-}. Dikatakan serentak karena bentuk *ngekis*, *ngempah*, dan *empah-empah* tidak berterima dalam BS. Sementara itu, bentuk *kis-kis* memang berterima sebagai bentuk ulang. Hanya saja, bentuk tersebut bukanlah kata ulang morfemis, tetapi kata ulang fonologis yang hasil reduplikasinya tidak menghasilkan makna gramatikal. Hasil reduplikasinya hanya melahirkan makna leksikal (Chaer, 2015:179–83).

c. Frasa

Leksikon pertanian tradisional suku Sasak juga ditemukan dalam bentuk frasa. Frasa dari sudut pandang bentuk didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi (Ba'dulu and Herman 2005:58). Adapun makna yang dimiliki oleh sebuah frasa adalah makna gramatikal sebagai akibat

bergabungnya kata yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, leksikon *aiq semel-mel* [aiʔ səməl-məl] terdiri dari dua kata, yakni kata *aiq* dan kata ulang *semel-mel*. Secara leksikal, *aiq* bermakna ‘air’ dan *semel-mel* bermakna ‘sedingin-dingin’. Dengan demikian, makna gramatikal frasa *aiq semel-mel* adalah *aiq sedingin-dingin*.

Selanjutnya, berdasarkan jumlah inti frasa, analisis data menunjukkan bahwa semua leksikon pertanian tradisional suku Sasak termasuk ke dalam frasa endosentris atributif, yakni frasa yang memiliki satu inti frasa atau frasa yang memiliki anggota yang kedudukannya tidak sama (Busri and Badrih, 2018:95). Dalam hal ini, kata-kata yang menyusun frasa tersebut ada yang berfungsi sebagai inti dan yang lainnya berfungsi sebagai penjelas. Misalnya, frasa *moto geles* [moto gələs] ‘potongan beras yang kecil’ terdiri dari inti berupa *moto* ‘potongan beras’ dan penjelas berupa *geles* ‘kecil’.

Identifikasi leksikon berbentuk frasa juga dilakukan berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur intinya. Misalnya, frasa *moto geles* di atas memiliki nomina *moto* sebagai inti frasa. Dengan demikian, frasa tersebut termasuk ke dalam frasa nomina. Dari identifikasi ini diketahui bahwa leksikon pertanian tradisional suku Sasak terdiri dari frasa nomina (FN) dan frasa verba (FV). Untuk gambaran yang lebih jelas, seluruh leksikon yang termasuk frasa disajikan dalam tabel 3 beserta makna gramatikalnya.

Tabel 3. Leksikon berbentuk frasa

No	Leksikon	Jenis Frasa	Glos
1	<i>aiq semel-mel</i> [aiʔ səməl-məl]	FN	‘air sedingin-dingin’
2	<i>bau inen pade</i> [bawu inən pade]	FV	‘mengambil induk padi’
3	<i>bebales nujaq</i> [bəbaləs nujaʔ]	FV	‘membalas menumbuk’
4	<i>bubus sampi</i> [bubus sampi]	FV	‘meluluri sapi’
5	<i>dede lowong</i> [dede lɔwɔŋ]	FV	‘meninabobokan tanaman padi’
6	<i>embot bineq</i> [əmbɔt binɛʔ]	FV	‘mencabut bibit’
7	<i>entunan bineq</i> [əntunan binɛʔ]	FV	‘menurunkan bibit’
8	<i>entunan pade</i> [əntunan pade]	FV	‘menurunkan padi’
9	<i>entunan sampi</i> [əntunan sampi]	FV	‘menurunkan sapi’
10	<i>gantong bunge</i> [gantonɔ buŋɔ]	FV	‘menggantung kapas’
11	<i>gelinegan pade</i> [gəlɪnɪŋan pade]	FV	‘mengitari padi’
12	<i>inen pade</i> [inən pade]	FN	‘induk padi’
13	<i>kaling jauq</i> [kaliŋ jawuʔ]	FV	‘tinggal bawa’

14	<i>kawin pade</i> [kawin pade]	FV	‘mengawinkan padi’
15	<i>moto geles</i> [moto gələs]	FN	‘potongan beras yang kecil’
16	<i>moto kelepe</i> [moto kələp]	FN	‘potongan beras yang terbang’
17	<i>moto pemolak</i> [moto pəmɔlak]	FN	‘potongan beras yang pertengahan’
18	<i>naliq pade</i> [naliʔ pade]	FV	‘mengikat padi’
19	<i>nungkep pade</i> [nuŋkəp pade]	FV	‘menumpuk padi’
20	<i>pajar sampi</i> [pajar sampi]	FV	‘mewejang sapi’
21	<i>penamaq aiq</i> [pənamaʔ aiʔ]	FN	‘pintu masuk air’
22	<i>rendeng penotoq</i> [rɛndɛŋ pənotoʔ]	FN	‘penumbuk perontok’
23	<i>rendeng perempak</i> [rɛndɛŋ pərɛmpak]	FN	‘penumbuk pemisah’
24	<i>selamatan lowong</i> [sələmɔtan lɔwɔŋ]	FV	‘selamatan tanaman padi’
25	<i>selamatan pade</i> [sələmɔtan pade]	FV	‘selamatan padi’
26	<i>selamatan sampi</i> [sələmɔtan sampi]	FV	‘selamatan sapi’
27	<i>timpes pade</i> [timpəs pade]	FV	‘menyimpan padi’
28	<i>tontong suwit</i> [tɔntɔŋ suwit]	FN	‘idiom’

Makna Kultural Leksikon Pertanian Tradisional Suku Sasak

Setelah mengidentifikasi bentuk dan makna leksikon berdasarkan aspek formal bahasa, pada bagian ini akan dibicarakan makna kultural dari leksikon-leksikon tersebut. Makna kultural didefinisikan sebagai makna bahasa yang dimiliki oleh masyarakat dalam hubungannya dengan budaya tertentu (Abdullah 2014; Wahyuni 2017). Dengan kata lain, makna kultural merupakan makna yang bersifat kontekstual dengan konteks berupa budaya penuturnya. Untuk mempermudah pembahasan, leksikon pertanian tradisional suku Sasak akan dikelompokkan menjadi empat, yakni leksikon yang berhubungan dengan aktivitas berhitung, aktivitas sapi, pengolahan tanah, dan pengolahan padi.

a. Makna Kultural Leksikon Aktivitas Berhitung

Leksikon yang berhubungan dengan aktivitas berhitung terdiri dari dua leksikon, yakni leksikon *berekeng* dan *warige*. *Berekeng* atau berhitung merupakan suatu ritual yang bertujuan untuk menemukan dan menentukan hari baik untuk melaksanakan kegiatan pertanian (*betanduran*). Konsep *berekeng* ini merupakan warisan leluhur nenek moyang suku Sasak yang terus digunakan hingga hari ini, baik untuk menentukan waktu bercocok tanam, waktu pesta, waktu membangun rumah, dan sebagainya. Kegiatan

berekeng ini dilaksanakan dengan menggunakan *warige*, yakni sebuah papan yang berisi sistem kalender tradisional suku Sasak yang didasarkan atas peredaran bintang.



Gambar 1. Warige Suku Sasak/Sumber: www.majelisadatsasak.org

Kegiatan *berekeng* dilakukan oleh seorang *pengelingsir* atau orang yang dituakan. Biasanya, di berbagai wilayah pulau Lombok, kegiatan *berekeng* diawali dengan ritual tertentu. Misalnya, di wilayah Lombok Utara, sebelum memulai *berekeng*, masyarakat melaksanakan upacara *liur gama*, yakni upacara yang dilakukan apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan atau hujan yang turun berlebihan (Syarifuddin, et al. 2012). Sementara itu, di Lombok Barat dikenal adanya ritual *perang topat* dan *pujewali* (Hariati, 2018; Sodli, 2010). Ritual adat *berekeng* ini menuntut hadirnya seorang yang ahli *warige*.

Masalahnya, belakangan ini sangat sulit menemukan orang yang ahli di bidang perhitungan menggunakan *warige* tersebut. Selain itu, keberadaan *warige* sebagai warisan budaya juga sudah sangat jarang ditemukan. Hal inilah yang menjadi dasar dikembangkannya Kalender Rowot Sasak yang diinisiasi oleh Lembaga Rowot Nusantara Lombok. Kalender ini menggunakan sistem kalender tradisional suku Sasak yang dikemas secara modern (Awaludin, 2019; Irawan, et al. 2014). Dengan munculnya produk budaya ini, masyarakat suku Sasak semua kalangan bisa melakukan kegiatan

berekeng untuk menemukan hari baik dalam melaksanakan aktivitas tertentu tanpa menggunakan *warige*.

Kedua leksikon yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa petani Sasak (tradisional) memandang aktivitas bertani sebagai sesuatu yang sakral, sama pentingnya dengan upacara pernikahan, kelahiran, atau kematian. Dikatakan demikian karena sebelum memulai aktivitas tersebut, petani Sasak (tradisional) harus menentukan waktu yang baik terlebih dahulu dengan ritual-ritual adat seperti yang disebutkan di atas.

b. Makna Kultural Leksikon Aktivitas Sapi

Leksikon yang termasuk ke dalam aktivitas sapi terdiri dari leksikon *entunan sampi*, *selametan sampi*, *bubus sampi*, *pajar sampi*, dan *aiq semel-mel*. *Entunan sampi* merupakan sebuah ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak untuk memulai pengolahan tanah sawah. Ritual ini dilaksanakan pada saat *entun taun* (musim hujan) dengan serangkaian upacara adat. Ritual ini diawali dengan *selametan sampi*. Setelah itu, sapi di bawa ke *penamaq aiq* ‘tempat masuknya air’ dan dipasangkan perkakas untuk membajak. Setelah itu, sapi akan diarahkan untuk mulai membajak sawah.

Dalam hal ini, kegiatan membajak sawah untuk pertama kalinya dalam tiap musim tanam dilaksanakan minimal tiga kali putaran (bisa juga lima, tujuh, atau sembilan putaran). Setelah selesai, perlengkapan membajak yang terpasang ditubuh sapi dilepaskan, kemudian sapi dimandikan dan dibawa pulang. Perlu dicatat bahwa dalam kegiatan ini, jumlah sapi yang diacarakan minimal sepasang (dua ekor). Apabila pemilik sawah hanya memiliki satu ekor sapi, maka ia harus meminjam sapi orang lain untuk diikutsertakan dalam proses tersebut. Dan apabila jumlah sapi melebihi dua ekor, maka sapi yang diacarakan tetap hanya dua ekor, sisanya hanya akan diberikan bubus oleh *pengelingsir* ‘tetua adat’.

Leksikon *selametan sampi* oleh penutur BS digunakan sebanyak dua kali, yakni sebelum kegiatan pengolahan tanah dan setelah kegiatan pengolahan tanah. *Selametan sampi* yang dilakukan sebelum pengolahan tanah adalah salah satu rangkaian prosesi

adat *entunan sampi* yang bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sapi yang dipakai membajak sawah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa sakit-sakitan. Ritual ini dilaksanakan sebelum acara *entunan sampi*. Rangkaian ritual adat ini diawali dengan membuat berbagai macam jajanan tradisional, seperti *opak-opak*, *ancaq*, *topat* (ketupat), *topat leper*, dan *tikel*. Selain itu, ayam panggang dan makanan-makanan lainnya juga disediakan.

Setelah semua bahan tersedia, ritual ini dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh *pengelingsir*. Setelah itu, sapi yang akan digunakan membajak sawah dikeluarkan dari kandangnya. Pada saat keluar dari kandang, sapi tersebut harus menginjak jajan *ancaq* yang telah disediakan di depan kandang sebagai pijakan pertamanya, baru kemudian dikalungkan ketupat dan ayam panggang di lehernya. Selanjutnya, sapi tersebut dilepas dan dihalau dari kandang untuk kemudian dikejar oleh warga masyarakat untuk memperebutkan ketupat dan ayam panggang yang menggantung di leher sapi tersebut. Setelah ketupat dan ayam panggang tersebut berhasil diambil, sapi tersebut kemudian dibawa ke hadapan *pengelingsir* untuk dipakaikan *bubus*.

Pemakaian *bubus* oleh *pengelingsir* tersebut disebut dengan istilah *bubus sampi*, yakni kegiatan membalurkan *bubus* ke seluruh tubuh sapi. *Bubus* yang dimaksud dalam hal ini merupakan ramuan yang ditumbuk dari berbagai macam bahan, seperti daun *bikar*, daun *jonjoq*, daun *jarak*, dan kunyit yang diberi campuran air rendaman nasi (*aiq rendem*). Proses ini dilaksanakan setelah masyarakat berhasil merebut ketupat dan ayam panggang yang menggantung di leher sapi. Proses ini dilaksanakan oleh *pengelingsir* dengan cara menepuk-nepukkan *bubus* ke kepala sapi (baca *tepupuk* dalam BS) yang dilanjutkan dengan membalurkan *bubus* tersebut ke seluruh bagian tubuh sapi termasuk kakinya.

Setelah sapi diberi *bubus*, proses selanjutnya adalah *pajar sampi*. *Pajar sampi* merupakan kegiatan memberikan nasihat atau pesan kepada sapi yang sedang diselamatkan (menjalani ritual *selametan sampi*). Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan *bubus sampi*. Sambil membalurkan *bubus* ke seluruh tubuh sapi,

pengelingsir akan memberikan nasihat atau pesan kepada sapi. Pesan tersebut adalah sebagai berikut.

Bismillahirrohmanirrohim

Batu picaq batu anyong ‘batu diinjak batu lebur’

Tanaq picaq tanaq anyong ‘tanah diinjak tanah hancur’

Nane ne aran entun taun ‘sekarang telah tiba musim hujan’

E jaq ku kadu kamu ngaro ‘akan saya pakai kamu mengolah tanah’

(Suhardi, Yasri, and Mursip 2010:19–20)

Sementara itu, kegiatan *selamatan sampi* yang dilaksanakan setelah pengolahan tanah dimaknai sebagai acara selamatan yang ditujukan untuk kesehatan sapi yang telah lelah membajak sawah. Acara ini dilaksanakan setelah semua pekerjaan pengolahan tanah selesai dilakukan. Sapi-sapi yang telah bekerja membajak sawah tidak jarang mengalami gangguan kesehatan seperti kakinya sakit, kulitnya terkelupas, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu diobati. Dalam hal ini, sapi tersebut biasanya diberikan *aiq semel-mel*. *Aiq semel-mel* adalah air yang sudah dijampi-jampi atau sudah didoakan oleh pemuka agama yang bertujuan untuk kesehatan sapi. *Aiq semel-mel* tersebut digunakan untuk menyirami seluruh bagian tubuh sapi termasuk kakinya dengan doa semoga cepat sehat seperti biasa.

Dari leksikon-leksikon yang dijabarkan di atas, suku Sasak (tradisional) memberikan gambaran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Mereka memberi contoh tentang bagaimana mengelola kebersamaan antar sesama makhluk yang diciptakan Tuhan untuk mencapai suatu tujuan. Bagi suku Sasak, sapi tidak hanya dipandang sebagai hewan berkaki empat, tetapi dipandang sebagaimana layaknya makhluk Tuhan yang berperasaan yang dapat diberi nasihat. Lebih dari itu, sapi-sapi tersebut juga dimuliakan dan dihormati oleh petani Sasak (tradisional). Hal ini tercermin dari adanya aktivitas *selamatan sampi* sebelum dan sesudah membajak sawah.

c. Makna Kultural Leksikon Pengolahan Tanah

Leksikon yang berhubungan dengan pengolahan tanah terdiri dari leksikon *ngaro*, *ngungkah*, *ngempes*, *bebales/bebalik*, *ngirek*, *anat*, dan *ngome*. *Ngaro*

merupakan suatu kegiatan mengolah tanah pertanian dengan menggunakan peralatan tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk menggemburkan atau menghaluskan tanah sawah sehingga siap untuk ditanami bibit padi. Adapun alat-alat pertanian yang digunakan adalah bajak, *gau*, kerbau, tanah, sabit, dan sebagainya. Pengolahan tanah ini tidak dapat dilaksanakan sekali, tetapi melalui beberapa tahapan, yakni tahap *ngungkah*, *ngempes*, *bebales/bebalik*, dan *ngirek*.

Ngungkah adalah kegiatan membongkar tanah. Tanah hasil *ngungkah* ini belum sepenuhnya hancur sehingga belum bisa ditanami padi. Pada intinya, kegiatan *ngungkah* ini hanya akan membalik tekstur tanah dan hasilnya masih berupa bongkahan tanah. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa bajak yang ditarik dengan dua ekor sapi. Sepasang sapi tersebut dipasang *ayuge* pada lehernya yang terhubung dengan tali kendali (*kendali singkan*).

Setelah *ngungkah*, tahap selanjutnya adalah *ngempes*, yakni kegiatan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah bongkahan hasil kegiatan *ngungkah*. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah *gau*. Kegiatan ini dilakukan mulai dari pinggir sawah, kemudian berangsur-angsur ke seluruh permukaan sawah tersebut secara merata. Hal ini dimaksudkan agar tanah menjadi gembur dan rumput-rumput tidak tampak lagi.

Setelah itu, dilakukan kegiatan *bebales/bebalik*, yaitu kegiatan pengulangan pembajakan yang dilaksanakan setidaknya dua atau tiga hari setelah kegiatan *ngempes* dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar rumput yang sudah tertimbun tanah pada proses *ngempes* itu menjadi busuk. Kegiatan *bebales* ini dilaksanakan dengan menggunakan bajak yang bertujuan untuk membalik tekstur tanah hasil dari proses sebelumnya. Pada proses ini, rumput yang sebelumnya tertutup akan menjadi tampak kembali. Dengan kata lain, proses ini akan membuat bagian atas tanah menjadi bagian bawah dan sebaliknya. Hal ini akan membuat tanah menjadi tidak rata, tetapi bentuk gumpalannya sangat lunak.

Proses terakhir dari kegiatan *ngaro* adalah *ngirek*. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat tanah sawah menjadi berlumpur sehingga rumput yang masih menyatu dengan tanah akan terpisah. Rumput yang sudah terpisah dari tanah tersebut ada yang berupa

anat, yakni potongan rumput yang sangat halus yang berada di sekitar tanah sawah sudah di-*irek*. *Anat* ini berpotensi mengganggu tanaman padi sehingga harus dibersihkan dari tanah sawah. Adapun kegiatan membersihkan *anat* dan rumput-rumput lainnya yang berada di sekitar tanah sawah disebut dengan istilah *ngome*. *Anat* dan rumput-rumput yang sudah busuk tersebut dikumpulkan di pematang sawah.

d. Makna Kultural Leksikon Pengolahan Padi

Leksikon yang termasuk pengolahan padi mencakup leksikon-leksikon dalam kegiatan pembibitan, penanaman, panen, hingga pengolahan padi menjadi beras. Pada tahap pembibitan dikenal tiga leksikon, yakni *entunan bineq*, *ngampar*, dan *embot bineq*. *Entunan bineq* adalah kegiatan menurunkan benih atau pembibitan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada sepetak sawah yang sudah diolah tanahnya. *Ngampar* adalah kegiatan menyemaikan bibit padi pada tanah sawah yang sudah diolah dengan cara melepas dan menyusun bibit secara teratur, setangkai demi setangkai sehingga membentuk sebuah barisan yang rapi. Sementara itu, *embot bineq* merupakan kegiatan mencabut bibit padi yang sudah siap disemaikan. Bibit tersebut dicabut dan diikat dengan alang-alang atau tali kelapa.

Hal yang menarik dalam proses pembibitan ini adalah ditemukannya leksikon khusus yang digunakan untuk menyatakan satuan ukuran bibit padi. Leksikon tersebut adalah *memen*, *kance*, dan *pongos*. *Memen* adalah satuan ukuran untuk bibit padi yang menyatakan satu ikat bibit padi dengan ukuran hampir dua genggam. Selanjutnya, satuan *kance* berarti satu ikat bibit padi yang terdiri dari dua *memen*. Sementara itu, istilah *pongos* merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan kumpulan ikatan padi (*memen*). *Pongos* dibedakan menjadi dua, yakni *pongos beleq* ‘pongos besar’ dan *pongos kodeq* ‘pongos kecil’. *Pongos beleq* terdiri dari sepuluh pasang bibit yang setara dengan dua puluh (20) *memen*, sedangkan *pongos kodeq* terdiri dari tujuh pasang bibit yang setara dengan empat belas (14) *memen*.

Pada tahap penanaman, ada beberapa leksikon yang dikenal, yakni *lowong*, *nyaweq*, *penyaweq*, *kawin pade*, *inen pade*, *dede lowong*, *ngekis-kis*, *gantong bunge*,

dan *selametan lowong*. *Lowong* adalah kegiatan menanam bibit padi yang sudah disemaikan sebelumnya pada tanah sawah yang sudah siap ditanami. *Lowong* biasanya dilaksanakan secara gotong royong yang disebut dengan istilah *besiru*. Kegiatan *lowong* ini biasanya dilaksanakan sehari setelah dilaksanakannya *nyaweq/memon*. *Nyaweq* atau *memon* tersebut adalah kegiatan menandai tanah sawah dengan menggunakan *penyaweq/pememon* yang ditancapkan di *penamaq aiq*.

Setelah *penyaweq* tersebut ditancapkan, kegiatan dilanjutkan dengan menanam bibit padi masing-masing sebanyak satu batang di kiri *penyaweq* dan satu batang di kanan *penyaweq* sambil melakukan *kawin pade*. Setelah itu, dilanjutkan dengan menanam sembilan bibit padi lainnya, baik di kiri maupun kanan *penyaweq*. Sepuluh bibit padi inilah yang kemudian ditetapkan sebagai *inen pade*. Adapun *penyaweq* atau *pememon* yang digunakan tersebut adalah sebuah alat yang terbuat dari pucuk *karak* dan pucuk *mamben* yang diikat menjadi satu. Pada bagian ujungnya dibentuk semacam lingkaran.

Leksikon selanjutnya adalah *inen pade* atau *buyuq*, yakni induk atau pemimpin padi yang terdiri dari dua puluh batang padi. *Inen pade* ditempatkan atau ditanam di sebelah kiri *penyaweq* sebanyak sepuluh batang dan di sebelah kanan *penyaweq* sebanyak sepuluh batang. *Inen pade* ini akan ditanam terlebih dahulu sebelum padi-padi lainnya di tanah. Begitu juga pada saat panen, *inen pade* akan dipanen sehari sebelum padi lainnya dipanen.

Pada saat penanaman *inen pade*, dikenal leksikon *kawin pade*. *Kawin pade* merupakan ritual adat untuk mengawinkan padi yang akan ditanam yang dilaksanakan bersamaan dengan penanaman *inen pade*. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengucapkan dua buah mantra atau doa-doa dalam BS. Mantra pertama diucapkan ketika menanam satu batang padi di kiri dan satu batang padi di kanan *penyaweq*. Mantra tersebut adalah sebagai berikut.

Bismillahirrohmanirrohim

Aku kawin kamu pade kance tanaq ‘aku nikahkan engkau padi dengan tanah’

Waline aiq saksine angin mas kawin siq buaq ‘walinya air saksinya angin mas kawin buah’ (Suhardi et al. 2010:32)

Mantra kedua diucapkan ketika menanam sembilan batang padi yang mengiringi sisi kanan dan kiri *penyaweq*. Adapun mantranya adalah sebagai berikut.

Bismillahirrohamnirrohim

Assalamualaikum Yaa Ardu Blain Nabi Suil

E kusodoq taletan niki ‘kutitip tanaman ini’

Leq bongkor nabi Adam ‘di punggung Nabi Adam’

Berkat Lailahaillallah Muhammadarrasulullah (Suhardi et al. 2010:32)

Setelah penanaman dilakukan, tanaman padi tersebut perlu dipelihara sehingga tetap subur dan menghasilkan padi yang berkualitas. Untuk tujuan tersebut, penutur BS mengenal leksikon *dede lowong*. *Dede lowong* merupakan ritual adat yang dilaksanakan dengan meninabobokan padi yang sudah ditanam. Kegiatan ini akan berlangsung cukup lama sampai batas *ngekis-kis*, yakni kegiatan membersihkan rerumputan yang mengganggu lowong dengan menggunakan alat berupa *kis-kis*. *Dede lowong* bertujuan untuk mengontrol dan memelihara keadaan tanaman padi, apakah dijangkiti hama atau tidak. *Dede lowong* ini biasanya dilaksanakan sambil melantunkan syair-syair doa atau mantra-mantra. Misalnya syair berikut ini.

Yong ambu yong ambu

Dede ambu anak Nabi Ayan

Kedua nabi laq kaya tim pola

Siq terasaq e bae susun inambi Nabi Ayan

Mas nurabah aran aiq

Tarik bae Mas Jereneng

Tarik tawar dadi tawar (Suhardi et al. 2010:34)

Apabila dalam tanaman padi banyak ditemukan hama, maka masyarakat suku Sasak akan melakukan kegiatan *gantung bunge*. *Gantung bunge* adalah kegiatan menggantungkan atau mengikatkan kapas pada daun. *Gantung bunge* ini dilaksanakan

di setiap sudut sawah. Pada waktu menggantungkan kapas, masyarakat suku Sasak akan membaca mantra sambil menyemburkan air yang telah direndami bawang putih.

Usai membaca mantra dilanjutkan dengan membakar sampah atau api unggun yang dicampur dengan kain bekas (BS: *lelampin*), serabut kelapa, tikar sobek, dan alat-alat lainnya yang dapat menimbulkan kepulan asap. Hal ini bertujuan untuk mengusir binatang-binatang seperti walang sangit, wereng, dan burung-burung kecil yang berpotensi merusak padi. Adapun bunyi mantra dalam prosesi *gantung bunge* ini adalah sebagai berikut.

Saq buq kedu an buq
Sidi mandi mantra buk kengkang
Berkat Lailahailallah Muhammadarrasulullah (Suhardi et al. 2010:41)

Selain itu, sebagai upaya memelihara tanaman (*lowong*), penutur BS juga mengenal leksikon *selametan lowong* yang berarti suatu ritual adat yang dilaksanakan dengan cara *rowah* atau membaca zikir dan doa yang dipimpin oleh pemuka agama (kiai) dan diikuti oleh masyarakat. *Selametan lowong* ini adalah perwujudan syukur masyarakat suku Sasak kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa agar tanaman padinya subur dan menghasilkan padi yang berkualitas.

Pada tahap panen, penutur BS mengenal beberapa leksikon, di antaranya adalah leksikon *mataq*, *gelinegan pade*, *bau inen pade*, *tontong suwit*, *nungkep pade*, *naliq pade*, *timpes pade*, dan *selametan pade*. *Mataq* adalah kegiatan panen dengan menggunakan alat seperti *ketam* atau *anis-anis* atau bisa juga dengan sabit. Sementara itu, *gelinegan pade* merupakan suatu ritual adat yang dilaksanakan sehari sebelum panen dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari dengan cara mengelingi sawah sambil membaca mantra untuk memberitahukan bahwa besok padi-padi akan dipanen. Adapun mantra yang dibaca adalah sebagai berikut.

Bismillahirrohmanirrohim
Inaq serimbun amaq serimbun
Mas rembulan aran sira
[...]
Berkat Lailaahailallah Muhammadarasulullah (Suhardi et al. 2010:45)

Sehari setelah *gelineangan pade* dilakukan, tahap panen akan diikuti dengan kegiatan *bau inen pade* atau *bau buyuq*, yakni kegiatan memanen induk padi. Dalam proses ini, masyarakat menyediakan alat berupa *tontong suit*, yakni nasi yang dimasak di dalam periuk kecil yang di dalamnya berisi satu butir telur. *Tontong suit* ini diletakkan di *penamaq aiq* ketika proses *bau inen pade* dilaksanakan.

Setelah panen dilakukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan *nungkep pade*, yakni kegiatan menumpuk padi di suatu tempat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini, yaitu: kegiatan menumpuk padi dapat dilakukan dengan sistem kerucut, posisi tangkai berada pada bagian dalam agar tidak basah jika hujan turun; dan pada saat hujan, ujungnya ditutup dengan pelepah daun pisang untuk menghindari resapan air ke dalam *tungkep*.

Dalam tahap panen, hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengikat padi atau yang dikenal dengan leksikon *naliq pade*. Dalam hal ini, yang pertama kali diikat adalah *inen pade* yang kemudian diletakkan di bagian kiri, kanan, depan, dan belakang dan diberi tanda seperti kalung yang terbuat dari jerami. Dalam proses *naliq pade*, penutur BS mengenal beberapa satuan ukuran yang berbeda dengan satuan ikatan pada bibit padi. Adapun satuan ukuran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Satuan Ukuran Dalam Aktivitas *Naliq pade* ‘Mengikat Padi’

Satuan Ukuran	Glos
1. <i>sepelepas</i> [səpələpas]	‘satu ikatan yang berisi satu genggam’
2. <i>kaling jauq</i> [kaliŋ jawuʔ]	‘dua genggam yang dikumpulkan menjadi satu ikatan’
3. <i>sepenetep</i> [səpənətəp] atau <i>sererek</i> [sərerek]	‘dua <i>kalingjau</i> yang diikat dengan tali <i>penetep</i> dari bambu’
4. <i>secekel</i> [səcəkəl]	‘dua <i>rerek</i> yang diikat menjadi satu’
5. <i>segutus</i> [səgutos]	‘setiap dua <i>cekel</i> ’
6. <i>sedaut</i> [sədawut]	‘setiap dua puluh ikat’
7. <i>seloq</i> [səloʔ]	‘setiap sepuluh <i>daut</i> ’

Setelah padi diikat dengan rapi, langkah selanjutnya adalah melakukan *timpes pade*, yakni kegiatan menyimpan padi pada penyimpanan yang sudah disediakan. Proses ini biasanya diawali dengan *selamatan pade*, yakni kegiatan selamatan yang dilaksanakan sebelum padi disimpan. Dalam kesempatan ini, seluruh keluarga dan orang-orang yang berhak menerima zakat diundang untuk berzikir dan berdoa. Kegiatan ini adalah manifestasi rasa syukur masyarakat suku Sasak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat menyusun padi di dalam penyimpanan, masyarakat suku Sasak melantunkan mantra berikut.

*Bismillahirrohmanirrohim
Buk bong langan bawaq
Buk lengian langan atas
Sidi mandi mantran buk bong lengiang
Tanduran insun
Insun anak kuda kidul
Murah marih adeqna uleq ojok segare kuda kidul (Suhardi et al. 2010:49)*

Selanjutnya, pada tahap pengolahan padi menjadi beras, penutur BS mengenal leksikon-leksikon seperti *entunan pade*, *nujaq*, *geneng*, *rampak*, *alu*, *rendeng*, *nato*, *nenisan*, *ngempah-empah*, *bebales nujaq*, *nempiq*, *moto*, dan *kemberasan*. *Entunan pade* adalah kegiatan menurunkan padi dari tempat penyimpanannya untuk kemudian diolah menjadi beras dengan cara *nujaq*. *Nujaq* merupakan kegiatan mengolah padi menjadi beras dengan cara menumbuk padi dengan wadah berupa *geneng* atau *rampak* dan alat penumbuk berupa *alu* atau *rendeng*.

Geneng adalah wadah penumbuk padi yang terbuat dari kayu, sedangkan *rampak* adalah wadah penumbuk padi yang terbuat dari kulit kerbau. Sementara itu, *alu* adalah alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu. *Alu* dibedakan menjadi dua, yakni *alu kepah* dan *alu pelesaq*. *Alu kepah* digunakan untuk kegiatan *ngempah-empah*, yakni kegiatan menumbuk pagi sampai sebagian padi menjadi beras, sedangkan *alu pelesaq* digunakan dalam kegiatan *bebales nujaq*, yakni kegiatan menumbuk padi sehingga dedak kelihatan menjadi halus.

Selain *alu*, penutur BS juga mengenal leksikon *rendeng* sebagai alat penumbuk padi. *Rendeng* adalah alat penumbuk padi yang terbuat dari bambu. Alat ini terbuat dari bambu khusus yang bernama bambu *dendeng*. Rendeng dibedakan menjadi dua, yakni *rendeng penotoq* dan *rendeng perepak*. *Rendeng penotoq* adalah sebuah rendeng yang ujungnya berbentuk silinder dan kadang-kadang dilapisi besi yang digunakan untuk melepaskan padi dari tangkainya.

Biasanya, rendeng jenis ini digunakan dalam kegiatan *naton*, yakni kegiatan merontokkan padi dari tangkainya dengan menggunakan *rendeng perontok* beralas lantai. Sementara itu, *rendeng perepak* adalah jenis rendeng yang ujungnya rata atau pipih. Bahannya terbuat dari bagian pangkal bambu yang tidak berlubang/buntu yang berfungsi dalam kegiatan *nenisan*, yakni kegiatan membersihkan padi dari tangkainya bahkan sampai terkelupas sebagian.

Setelah padi terkelupas dari kulitnya, langkah selanjutnya adalah *nempiq*. *Nempiq* adalah kegiatan membersihkan butiran beras dari kotoran-kotoran seperti dedak, batu, *etaq*, dan sebagainya dengan menggunakan alat berupa *kleong* (*nyiru*). *Kleong* atau *nyiru* adalah alat yang berbentuk silinder terbuat dari anyaman bambu. Kegiatan *nempiq* ini akan menghasilkan beras yang sudah bersih dan potongan-potongan beras yang disebut *moto*. *Moto* dalam BS kemudian dibedakan lagi berdasarkan ukurannya menjadi tiga macam, yakni *moto pemolak*, yaitu potongan beras yang ukurannya setengah beras yang biasa digunakan untuk pakan ternak maupun untuk membuat tepung beras (jika berkualitas *moto*-nya bagus); *moto geles*, yakni patahan beras yang lebih halus yang biasanya dimanfaatkan sebagai makanan ayam yang baru menetas; dan *moto kelep*, yakni patahan beras yang paling halus kadang bercampur dengan dedak.

Secara utilitas, *moto kelep* ini hanya digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati gatal-gatal pada kulit wajah bayi. Selanjutnya, beras yang sudah selesai ditampi dimasukkan ke dalam wadah yang disebut *kemberasan*. *Kemberasan* adalah media penyimpanan beras yang berbentuk seperti gentong besar yang terbuat dari tanah liat.

Berdasarkan leksikon-leksikon yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa petani Sasak (tradisional) memandang aktivitas bertani sebagai suatu aktivitas yang sakral. Kesakralan tersebut dapat dibuktikan melalui perilaku petani Sasak (tradisional) dalam berhubungan dengan alam, seperti tanah, air, dan sapi. Mereka memandang alam seperti makhluk yang seolah-olah dapat berbicara dan berperasaan. Selain itu, dalam interaksi mereka dengan alam, kerap kali ditemukan penggunaan mantra-mantra tertentu. Mantra-mantra tersebut jika ditelusuri lebih lanjut bukanlah sekadar mantra, tetapi merupakan praktik ajaran tasawuf Islam yang bernafas budaya Sasak.

PENUTUP

Studi etnolinguistik terhadap leksikon pertanian tradisional suku Sasak menunjukkan pola pikir suku Sasak (tradisional) dalam aktivitas bertanam padi. Bagi mereka, bertani padi bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan kegiatan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan pokok atau sebagai mata pencaharian, tetapi lebih dari itu. Mereka memandang aktivitas bertanam padi sebagai sesuatu yang sakral yang berhubungan dengan kelangsungan hidup yang harmonis dengan seluruh alam. Mereka juga memandang bahwa menanam padi merupakan media untuk mempraktikkan ajaran-ajaran spiritual yang bernuansa budaya untuk menjaga keberkahan alam.

Selain itu, melalui leksikon-leksikon yang dikaji dalam studi ini, upaya suku Sasak (tradisional) dalam menjaga alam supaya tidak *campah* (berkurang keberkahannya) dapat diketahui. Mereka meyakini bahwa untuk mencapai suatu tujuan, manusia harus mengelola kebersamaan antar sesama makhluk yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, mereka memperlakukan tanah, air, dan sapi selayaknya manusia yang berperasaan. Buktinya, sebelum melakukan penanaman, mereka terlebih dahulu meminta izin dengan tanah dan air.

Mereka juga melakukan acara selamatan sapi sebelum dan sesudah membajak sawah. Selain itu, upaya mereka juga diwujudkan dengan cara menjaga hubungan secara vertikal dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwa tujuan mereka tidak akan tercapai tanpa rahmat dan pertolongan Tuhan. Keyakinan tersebut

dibuktikan dengan banyaknya mantra yang digunakan dalam aktivitas menanam padi. Mantra-mantra tersebut juga bukanlah sekadar kata-kata yang tidak bermakna. Akan tetapi, mantra tersebut merupakan doa-doa sakral yang bernafaskan Islam Sasak yang disusun oleh leluhur suku Sasak. Untuk mengupas tuntas persoalan mantra yang digunakan dalam aktivitas pertanian tersebut, kajian lebih lanjut dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wakit. 2014. *Etnolinguistik: Teori, Metode, dan Aplikasinya*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Agustina, Nurshopia. 2013. "Cermin Budaya dalam Leksikon Perkakas Pertanian Tradisional di Pangauban, Kabupaten Bandung (Kajian Etnolinguistik)." *Bahtera Sastra: Antologi Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1(2).
- Aridawati, Ida Ayu Putu. 2020. "Makna Ritual Budaya Pertanian yang Berkaitan dengan Leksikon Bidang Persawahan pada Masyarakat Bali." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 3(3): 384–402.
- Aridawati, Ida Ayu Putu, Nazir Thoir, I. Made Purwa, and Dwi Sutana. 1995. *Struktur Bahasa Sasak Umum*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Asmara, Rangga. 2017. "Ekplorasi Leksikon Perkakas Pertanian Tradisional Jawa sebagai Penguatan Konservasi Bahasa Jawa." Pp. 517–27 in *PIBSI XXXIX*.
- Asmara, Rangga, dan Khamimah Khamimah. 2019. "Keterancaman Leksikon dan Kearifan Lokal dalam Perkakas Pertanian Tradisional Jawa." *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3(1): 1–11.
- Awaludin, Muhammad. 2019. "Kalender Rowot Sasak." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 1(1):89–101.
- Azhar, Lalu Muhammad. 1997. *Kamus Bau Sastra (Sasak-Indonesia, Indonesia-Sasak)*. Klaten: Intan Pariwara.
- Ba'dulu, Abdul Muis, and Herman. 2005. *Morfosintaksis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baehaqie, Imam. 2017. *Etnolinguistik: Telaah Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Busri, Hasan, and Moh. Badrih. 2018. *Linguistik Indonesia: Pengantar Memahami Hakikat Bahasa*. Malang: Madani Media.

- Chaer, Abdul. 2013. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2015. *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crystal, David. 2008. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Sixth Edition*. UK: Blackwell Publishers Ltd.
- Duranti, Alessandro. 1997. *Linguistics Anthropology*. New York: Cambridge University Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama.
- Finch, Geoffrey. 2000. *Linguistic Terms and Concepts*. New York: Palgrave.
- Genua, Veronika. 2016. "Khazanah Leksikon Tanaman Pangan Etnik Nagekeo: Kajian Ekolinguistik." *Prosiding Simposium Internasional "Bahasa-Bahasa Lokal, Nasional, Dan Global"* 1–28.
- Hakim, Lukmanul, Nuriati, Hartini, Nurcholis Muslim, and Ni Made Yudiastini. 2017. *Kamus Sasak-Indonesia*. 2nd ed. Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.
- Halliday, M. A. K., and Colin Yallop. 2007. *Lexicology: A Short Introduction*. New York: Continuum.
- Hariati, Sri. 2018. "Tradisi Perang Topat sebagai Akulturasi Agama dan Budaya." *Jatiswara* 33(1).
- Heine, Bernd, and Tania Kuteva. 2004. *World Lexicon of Grammaticalization*. UK: Cambridge University Press.
- Husnan, Lalu Erwan, Siti Raudloh, and M. Shubhi. 2019. *Laporan Penelitian Tata Bahasa Sasak (Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis)*. Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat.
- Irawan, Lalu Ari, Mawardi, Lalu Agus Fathurrahman, and Taufik Suadiyatno. 2014. *Mengenal Kalender Rowot Sasak*. Mataram: Penerbit Genius.
- Kentjono, Djoko. 2009. "Morfologi." Pp. 144–57 in *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*, edited by Kushartanti, U. Yuwono, and M. R. Lauder.

- Jakarta: Gramedia.
- Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. *Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Carasvatibooks.
- Kridalaksana, Harimurti. 2009a. *Kamus Linguistik*. Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. 2009b. "Leksikon." Pp. 138–42 in *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*, edited by Kushartanti, U. Yuwono, and M. R. Lauder. Jakarta: Gramedia.
- Luthfiana, Lailin. 2018. "Leksikon Eko-Botani Masyarakat Petani Desa Kendalrejo Kabupaten Blitar." in *Skripsi tidak diterbitkan*. Malang: Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya.
- Murphy, M. Lynne. 2003. *Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms*. UK: Cambridge University Press.
- Murphy, M. Lynne, and Anu Koskela. 2010. *Key Terms in Semantics*. New York: Continuum.
- Muslich, Masnur. 2014. *Tata Bentuk Bahasa Indonesia: Kajian Ke Arah Tatabahasa Deskriptif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nababan, P. W. J. 1984. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Neef, Martin, and Heinz Vater. 2006. "Concepts of the Lexicon in Theoretical Linguistics." Pp. 27–55 in *Advances in the Theory of the Lexicon*, edited by D. Wunderlich. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Podada, Nunung. 2018. "Pergeseran Leksikon Bidang Pertanian pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe." *Jurnal Pendidikan Bahasa* 7(1): 33–36.
- Ramlan. 2001. *Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: CV. Karyono.
- Richards, Jack C., and Richard Schmidt. 2010. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. Great Britain: Pearson.
- Riley, Philip. 2007. *Language, Culture and Identity: An Ethnolinguistic Perspective*. New York: Continuum.
- Riyono, Ahdi. 2014. "Leksikon Pertanian dalam Bahasa Jawa di Kabupaten Kudus: Kajian Etnolinguistik." Pp. 258–62 in *International Seminar "Language Maintenance and Shift" IV*.

- Saharudin. 2010. "Refleksi Pola Pikir dan Kearifan Lokal Masyarakat Sasak dalam Ranah Pertanian: Sebuah Investigasi Atas Fakta Linguistik." *Mabasan* 4(1).
- Saharudin, Saharudin. 2016. "Perilaku Liminal Masyarakat Sasak-Lombok dalam Bêkayaq Bau Nyalé Dan Pataq Paré." *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities* 1(1): 87–112.
- Saharudin, Saharudin. 2019a. "Pare Buyuq: Konseptualisasi Kebahasaan tentang Ketahanan Pangan Berbasis Budaya di Lombok Bagian Selatan." Pp. 21–28 in *Prosiding Seminar Nasional Universitas Mataram*.
- Saharudin, Saharudin. 2019b. "The Symbols and Myths of Rice in Sasak's Culture: A Portrait of Hybrid Islam in Lombok." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57(2): 425–58.
- Sharifian, Farzad. 2017. "Chapter 1 - Cultural Linguistics: The State of the Art." Pp. 1–28 in *Advances in Cultural Linguistics*, edited by F. Sharifian. Singapore: Springer.
- Sodli, Ahmad. 2010. "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Masyarakat Multikultural di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 17(2): 187–99.
- Subroto, Edi. 2012. *Pemerian Morfologi Bahasa Indonesia: Berdasarkan Perspektif Derivasi dan Infleksi Proses Pemajemukan dan Perulangan*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Suhandono, M. Ramlan, Soepomo Poedjosoedarmo, and Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2004. "Leksikon Etnobotani Bahasa Jawa." *Jurnal Humaniora* 16(3): 229–41.
- Suhardi, Hasan Yasri, and Mursip. 2010. *Nilai-nilai Tradisional Sasak dalam Betanduran*. Mataram: Pustaka Widya.
- Sukri, Muhammad. 2008. *Morfologi: Kajian antara Bentuk dan Makna*. Mataram: Cerdas Press Mataram.
- Suryasa, Wayan, and Anak Agung Sri Candra Dewi. 2018. "Language Maintenance of Balinese Vocabulary in Agriculture: Eco Linguistic Studies." *International Journal of Linguistics, Literature and Culture* 4(4):38–43.

- Syarifuddin, Saharudin, and Syarifuddin. 2012. "Kategori dan Ekspresi Linguistik dalam Bahasa Sasak pada Ranah Pertanian Tradisional: Kajian Etnosemantik." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 11(1): 24–52.
- Thoir, Nazir, I. Gusti Ngurah Bagu, I. Made Denes, and Aron Meko Mbete. 2001. *Kamus Bahasa Sasak-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Trask, L. R. 1993. *A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics*. London: Routledge.
- Umiyati, Mirsa. 2011. "Ketahanan Khazanah Lingual Pertanian Guyub Tutar Bahasa Bima dalam Perspektif Ekolinguistik Kritis." Pp. 81–85 in *International Seminar "Language Maintenance and Shift."*
- Völkel, Svenja. 2010. *Social Structure, Space and Possession in Tongan Culture and Language: An Ethnolinguistic Study*. USA: John Benjamins B.V.
- Wahyuni, Tri. 2017. "Makna Kultural pada Istilah Bidang Pertanian Padi di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah: Sebuah Tinjauan Etnolinguistik (Cultural Meaning on Planting Of Rice Term in Boja, District Of Kendal, Central Jawa: An Etnolinguistics Study)." *JALABAHASA* 13(1):20–30.
- Wierzbicka, Anna. 1997. *Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. New York: Oxford University Press.
- Wijana, I. Dewa Putu. 2015. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

KOMPETISI DAN KOLABORASI: STRATEGI HOTEL-HOTEL PEGUNUNGAN (*BERGHOTEL*) DI GARUT PADA MASA KOLONIAL (1890-1942)

COMPETITION AND COLLABORATION: THE STRATEGY OF MOUNTAIN HOTELS (*BERGOTEL*) IN GARUT IN THE COLONIAL PERIOD (1890-1942)

Irfal Mujaffar

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Kampus UI Depok Jawa Barat 16424

Email : irfalmujaffar2711@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.255

Naskah Diterima: 31 Maret 2021 Naskah Direvisi: 13 September 2021

Naskah Disetujui: 13 September 2021

Abstrak

Popularitas Garut sebagai tujuan utama pariwisata pada periode akhir kolonial menarik minat para pelaku usaha akomodasi untuk merintis usaha-usaha mereka di kawasan ini. Semenjak itu Garut berkembang menjadi salah satu episentrum persebaran hotel-hotel pegunungan (*berghotel*) yang menawarkan akomodasi bagi para wisatawan. Kondisi tersebut memicu terjadinya persaingan di antara mereka. Artikel ini berfokus pada strategi hotel-hotel pegunungan di Garut dalam menjaring lalu lintas wisatawan. Sumber yang digunakan adalah buku-buku, surat kabar, majalah, buku panduan wisata, dan catatan perjalanan sezaman. Dengan menggunakan metode sejarah, hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam menyiasati tekanan persaingan untuk mendapatkan wisatawan, hotel-hotel pegunungan di Garut menempuh berbagai strategi melalui pengembangan inovasi dan bentuk-bentuk kolaborasi.

Kata Kunci: Hotel Pegunungan, Akomodasi Pariwisata Kolonial, Garut.

Abstract

*Garut's popularity as a tourist destination in the late colonial period has caused many accommodation entrepreneurs to set up business within the city. From that moment, Garut has become one of the centers for the existence of mountain hotels (*berghotels*) for tourists. This article will be focused on the strategy of mountain hotels in Garut to attract tourists. The sources are used from books, newspapers, magazines, the guide books of tourism as well as travelogues from that time. By using the historical method, the results shows that mountain hotels in Garut develop a mixture of competing strategies to attract tourists by innovating and collaborating.*

Keywords: mountain hotel, colonial tourism accommodation, Garut

PENDAHULUAN

Di antara dampak dari adanya praktik pariwisata di Hindia Belanda adalah berkembangnya bidang usaha jasa akomodasi, khususnya hotel. Ramainya lalu lintas wisatawan yang mengarus dalam setengah abad terakhir kekuasaan kolonial tampaknya telah menarik minat para pelaku usaha perhotelan untuk merintis usaha-usaha mereka di negeri yang dikenal para pelancong sebagai *The Garden of the East* ini. Hotel-hotel yang mereka dirikan tersebar di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan pariwisata, terutama di daerah-daerah pegunungan.

M.A.J. Kelling (1929) mengatakan ada dua kategori hotel yang dikenal secara umum di Hindia Belanda, yaitu *staadshotel* (hotel kota) dan *berghotel* (hotel pegunungan). Keberadaan *staadshotel* terkait erat dengan lalu lintas orang asing. Biasanya lokasi *staadshotel* dibangun di pusat-pusat kota dan daerah sekitar pelabuhan atau dikenal juga dengan istilah *staadherberg* (penginapan kota). Akomodasi jenis ini mulanya disediakan untuk para pedagang yang datang dari negeri jauh/asing serta para pelancong dari beragam latar kepentingan. Dengan demikian, sirkulasi pengunjung *staadshotel* cenderung intens, namun dengan jangka waktu tinggal yang relatif singkat.

Sedangkan keberadaan *berghotel* terkait dengan adanya kegiatan pariwisata dan pengembangan sanatorium di daerah pegunungan. Target konsumennya menyasar wisatawan dan pencari kesehatan. Itu sebabnya sirkulasi pengunjung *berghotel* tidak seintens *staadshotel*. Kesibukan biasanya terjadi dalam waktu-waktu tertentu saja, seperti akhir pekan atau musim liburan. Walau begitu, para pengunjung cenderung menghabiskan waktu tinggal mereka lebih lama (Kelling, 1929: 744-745).

Garut merupakan salah satu episentrum persebaran *berghotel* di Hindia Belanda. Tonggak awal perkembangan hotel-hotel di Garut dimulai sekitar tahun 1890-an seiring dengan dibukanya kawasan ini sebagai stasiun perbukitan dan sanatorium (De Witt, 1898: 242; Ponder, 1934: 189, 242). Geliat investasi pada sektor ini makin bergairah memasuki dekade kedua abad ke-20 ketika Garut mulai terhubung dengan jaringan pariwisata internasional. Ditandai dengan berdirinya sejumlah hotel baru yang dilengkapi fasilitas modern dan dikelola secara lebih profesional (*Tourism in Netherland India*, 1934).

Menjamurnya hotel di Garut telah memicu terjadinya intensifikasi persaingan di antara para pelaku usaha sektor ini. Pola persaingan yang terbentuk mengarah pada segmentasi pasar yang spesifik, yakni wisatawan (dan pencari kesehatan). Kondisi tersebut tampaknya menjadi konsekuensi yang mesti dihadapi para pemilik hotel di daerah-daerah pedalaman seperti Garut waktu itu, yang mana sumber utama pemasukan sangat bergantung pada lalu lintas wisatawan. Artinya, semakin ramai wisatawan yang datang maka makin besar pula kesempatan mereka memperoleh keuntungan.

Artikel ini membahas strategi hotel-hotel pegunungan (*berghotel*) di Garut dalam menjaring lalu lintas wisatawan pada periode akhir kolonial. Menurut Shaw dan Williams (2004: 83-85) pada dasarnya berbagai strategi yang diadopsi oleh para pelaku usaha akomodasi wisata bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan agar mendapatkan nilai lebih atau keuntungan dari memproduksi jasa dan pengalaman pariwisata. Maka dari itu ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kemampuan hotel-hotel tersebut dalam menyiasati tekanan persaingan. Bukan hanya dari segi persaingan harga, melainkan yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu mengubah paradigma persaingan melalui inovasi dalam hal teknologi, produk, proses, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kedua adalah masalah perluasan jejaring. Ini berkaitan dengan sejauh mana hotel-hotel tersebut mampu melebarkan jejaring melalui berbagai bentuk kolaborasi dan aliansi.

Studi tentang akomodasi pariwisata kolonial di Hindia Belanda sudah pernah ditulis oleh sejumlah peneliti. Achmad Sunjayadi (2007, 2017, 2019) pernah membahas masalah ini dengan menitikberatkan pada aspek perkembangannya secara umum. Dalam tulisannya yang lain, Sunjayadi (2018) juga membahas peran pelayan pribumi di hotel-hotel, seperti jongos, babu, dan mandor. Namun, kajian-kajian tersebut tidak mengkhususkan pembahasannya pada permasalahan *berghotel* yang notabene memiliki karaktersitik berbeda dari kebanyakan hotel di kota besar, baik secara visi maupun dari segi pengelolaannya.

Hotel pegunungan menjadi isu yang turut diangkat oleh J.E. Specer dan W.L. Thomas (1948) di dalam studinya tentang stasiun perbukitan (*hill station*) di negara-negara Asia kolonial. Studi ini mengaitkan keberadaan hotel pegunungan dengan

fenomena kemunculan stasiun-stasiun perbukitan yang dikembangkan orang-orang Belanda di Hindia pada abad ke-19. Berangkat dari studi tersebut, William A. Whittington (1961) menulis laporan tentang kondisi terbaru sejumlah stasiun perbukitan di Indonesia pascakemerdekaan, termasuk juga mengulas sarana akomodasinya. Meskipun kedua studi ini menyinggung soal hotel pegunungan, namun baik Spencer maupun Whittington masih melihat institusi tersebut sebatas fasilitas pelengkap alih-alih mempersepsikannya sebagai sebuah entitas yang turut berkepentingan. Disinyalir itu karena keduanya belum mengeksplorasi signifikansi hubungan hotel-hotel pegunungan dengan praktik pariwisata di stasiun perbukitan.

Upaya untuk menguraikan hubungan antara sektor akomodasi dan praktik pariwisata kolonial di daerah pegunungan dilakukan oleh Andi Arismunandar (2020) dengan melihat apa yang terjadi di Keresidenan Priangan. Sama seperti studi terdahulu lainnya, secara keseluruhan kajian ini lebih banyak membahas aspek perkembangannya. Begitu pula dengan apa yang ditulis oleh Sulaeman Anggapradja (1984) dan Kunto Sofianto (1997) yang mengaitkan pertumbuhan hotel-hotel di Garut era kolonial dengan praktik pariwisata yang berkembang di sana. Kajian-kajian tersebut belum memperlihatkan adanya suatu tinjauan yang mengarah pada pola persaingan. Bagaimanapun, upaya peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dilakukan para pemilik hotel bukan semata-mata ditujukan untuk memuaskan para pengunjung sebagaimana yang disampaikan oleh ketiga kajian tersebut, tetapi juga hal itu mesti dipahami sebagai bagian dari strategi dalam merespon tekanan persaingan.

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan sejauh ini sektor akomodasi cenderung hanya dipersepsikan sebagai unsur pendukung pariwisata kolonial. Dengan kata lain, hadir sebatas menjadi sarana untuk memfasilitasi kebutuhan para wisatawan. Sektor akomodasi, khususnya hotel belum dilihat sebagai sebuah entitas yang juga ikut berkepentingan di dalam mata rantai praktik pariwisata yang berlangsung. Padahal akomodasi adalah sub-sektor terbesar dan paling banyak ditemukan dalam ekonomi pariwisata (Cooper, 1998: 313).

Maka dari itu, studi ini berusaha mendudukan perkara tersebut sebagai isu utama melalui tinjauan terhadap strategi hotel-hotel pegunungan (*berghotel*) di Garut

dalam menjaring lalu lintas wisatawan pada periode akhir kolonial. Ruang lingkup pembahasan difokuskan pada dua aspek dengan bertolak dari apa yang ditawarkan Shaw dan Willams (2004) tentang strategi perusahaan-perusahaan pariwisata. Mula-mula tinjauan diarahkan terhadap kemampuan hotel-hotel tersebut dalam menyiasati tekanan persaingan (kompetisi). Selanjutnya adalah sejauh mana mereka mampu melebarkan jejaring melalui bentuk-bentuk kolaborasi dan aliansi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 2008: 42; Sjamsuddin, 2012: 74). Perkembangan hotel-hotel pegunungan di Garut berjalan paralel dengan kegiatan pariwisata yang berlangsung di kawasan ini pada periode akhir kekuasaan kolonial. Maka dari itu, proses heuristik difokuskan pada sumber-sumber yang berkaitan dengan praktik pariwisata kolonial, seperti buku panduan, catatan perjalanan, arsip, majalah pariwisata, dan surat kabar.

Buku panduan berisi informasi seputar objek wisata serta fasilitas-fasilitas penunjang yang dapat diakses oleh para wisatawan, termasuk informasi mengenai sarana akomodasi di tempat tujuan beserta tarifnya. Contoh buku panduan yang digunakan, seperti yang ditulis Marius Buys (1891), VTV (1910, 1913), Doorman & Nieuwenkamp (1898), dan Dyck, (1922). Lalu digunakan juga catatan perjalanan para wisatawan yang pernah mengunjungi Garut, seperti Maurik (1897), Scidmore (1898), Kloben (1899), Miller (1908), Walcott (1914), McMillan (1914), dan Couperus (1923). Catatan-catatan tersebut sangat berguna untuk membantu memberikan gambaran terkait pelayanan di hotel-hotel yang ditempati turis melalui testimoni mereka. Selain dari catatan perjalanan, testimoni juga bisa kita lihat dari arsip-arsip korespondensi antara wisatawan dengan VTV yang terhimpun dalam *Algemene Secretarie* (1891-1942).

Kemudian digunakan juga majalah dan surat kabar yang sering dimanfaatkan sebagai media promosi oleh hotel-hotel di Hindia. Dari sana kita bisa melihat keunggulan apa saja yang ditawarkan oleh hotel-hotel tersebut. Contoh majalah yang digunakan, antara lain *The Tourist Guide and Garoet Express* (1922-1923), *Tourism in*

Netherland India(1932, 1934), dan *Het Hotelblad* (1937-1938). Sumber-sumber tersebut diperoleh di Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, Perpustakaan UI, serta situs-situs internet, seperti *delpher.nl*, *archive.org*, *digital.library.cornell.edu*, dan *digitalcollections.universiteitleiden.nl*.

PEMBAHASAN

Perkembangan Hotel-Hotel Pegunungan (*Berghotel*) di Garut

Keberadaan hotel-hotel pegunungan (*berghotel*) di Hindia merupakan suatu fenomena yang terkait dengan munculnya stasiun-stasiun perbukitan yang dikembangkan oleh orang-orang Belanda pada abad ke-19. Resor-resor semacam ini banyak dijumpai di negeri-negeri koloni Eropa yang beriklim tropis, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Stasiun perbukitan biasanya dibangun di daerah-daerah pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah untuk dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan (*retret*) dari cuaca panas berkepanjangan dan pemulihan kesehatan (Jafari, 2000: 277).

Masalah perbedaan iklim rupanya telah menjadi tantangan terberat yang dihadapi orang-orang kulit putih (Barat) sejak dua abad pertama kontak mereka dengan dunia timur. Tak ayal udara yang dirasa sangat panas dan lembab membuat mereka sering menderita dan mudah terserang penyakit. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka lalu mencari tempat-tempat berudara sejuk di daerah pegunungan yang suhunya dirasa sebanding dengan iklim di negara asal. Efek penyembuhan yang dihasilkan dari tinggal di dataran tinggi sudah dirasakan oleh orang-orang Inggris di India ketika mereka mendirikan markas-markas detasemen militer di sekitar pegunungan Himalaya pada 1820. Semenjak itu, mereka mulai rutin mengunjungi daerah-daerah pegunungan untuk memulihkan kesehatan (*sanatorium*) atau sekadar mengisi waktu luang (Spencer dan Thomas, 1948: 637-641).

Ketidaknyamanan akibat tinggal di negeri koloni yang beriklim tropis ternyata dirasakan pula oleh orang-orang Belanda di Hindia. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk membangun stasiun-stasiun perbukitannya sendiri (De Witt, 1898: 242-243). Proses awal pencarian lokasi untuk stasiun perbukitan diperkirakan sudah dimulai

sejak awal abad ke-19 bersamaan dengan perluasan kendali militer Belanda ke daerah-daerah dataran tinggi di pedalaman Jawa. Mula-mula mereka mendirikan garnisun-garnisun militer di sana yang juga dimanfaatkan sebagai sanatorium untuk para prajurit yang sakit (Spencer dan Thomas, 1948: 640). Menjelang akhir abad ke-19, tempat-tempat tersebut kemudian makin sering dikunjungi oleh semua lapisan kelas sosial Belanda untuk memalingkan diri sejenak dari panasnya udara perkotaan dan memulihkan kesehatan (Meulendijks, 2017: 28).

Spencer dan Thomas mengidentifikasi 23 daerah pegunungan di Hindia yang dikembangkan sebagai stasiun perbukitan selama masa kolonial. Daerah-daerah tersebut tersebar di tiga pulau yang berbeda: 18 titik di Pulau Jawa; 3 titik di Sumatera; dan 2 titik di Celebes.¹ Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya adalah stasiun perbukitan utama yang paling populer di kalangan parawisatawan, yaitu Tosari di Jawa Timur (6.000 kaki), Garut (2.300 kaki), dan Sindanglaya (3.500 kaki) di Jawa Barat (1948: 645).

Proses awal pengembangan Garut sebagai stasiun perbukitan diperkirakan mulai berlangsung sekitar tahun 1890-an seiring dengan penguatan kontrol keamanan dan perbaikan infrastruktur di Keresidenan Priangan. Pada saat itu kawasan Priangan dianggap sudah relatif aman berkat realisasi *Preanger Reorganisatie* “Reorganisasi Priangan” 1871, yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara keamanan dan kesehatan penduduk (Gelder, 1899: 49). Pada saat yang sama, liberalisasi ekonomi yang diberlakukan pemerintah menyebabkan daerah Priangan dibanjiri investasi swasta. Perkebunan-perkebunan teh dan kina milik swasta mulai dibuka di Garut pada 1880-an, (Anggapradja, 1984: 146). Guna menunjang pendistribusian hasil perkebunan mereka, pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, terutama jaringan jalan raya dan jalur kereta (Furnivall, 2009: 188). Pada 1889, jalur kereta api menuju Garut yang dibangun oleh *Staatsspoorwegen* resmi beroperasi. Semenjak itu Garut mulai terhubung dengan daerah lain dan makin mudah diakses (Mulyana, 2005: 128).

¹Hindia Belanda menempati urutan kedua dengan stasiun perbukitan terbanyak di Asia di bawah India yang memiliki 46 titik. Dari 23 titik stasiun perbukitan di Hindia itu tersebar di tiga pulau berbeda, antara lain di Jawa ada Sempol, Tosari, Nongkojajar, Lawang, Malang, Prigen, Tretes, Songgoriti, Salatiga, Unggaran, Merbabu, Wonosobo, Kuningan, Garut, Bandung, Sindanglaya, Sukabumi, dan Buitenzorg; lalu di Sumatra ada Fort de Kock/Bukittinggi, Prapat, dan Bandar Baru; sedangkan di Celebes adalah Rurukan dan Tondano.

Garut yang semula sepi dan cenderung dihindari, berubah menjadi kawasan yang ramai. Banyak pemukim Eropa di Hindia memanfaatkan waktu luang mereka dengan pergi ke Garut. Mereka menyukai tempat ini karena udaranya yang sejuk dan bersih sangat cocok untuk penyegaran diri dari cuaca panas perkotaan yang melelahkan serta baik untuk pemulihan kesehatan (Oemar, 1896; Miller, 1908: 161).

Bersamaan dengan itu sarana akomodasi berupa hotel dan jenis-jenis penginapan lainnya mulai banyak didirikan untuk memfasilitasi kebutuhan para pengunjung. Selain melayani penginapan, umumnya hotel-hotel di Garut juga menerima tamu-tamu yang sedang menjalani proses pemulihan. Dengan kata lain, berfungsi menjadi semacam rumah peristirahatan untuk para pencari kesehatan atau dikenal juga dengan istilah sanatorium (De Witt, 1898: 243; Maurik, 1897: 194; Scidmore, 1898: 312).

Perkembangan hotel pegunungan di Garut terbagi dalam dua pembabakan waktu, yaitu periode 1890-1907 dan periode 1908-1942. Keberadaan hotel-hotel pada periode pertama (1890-1907) erat kaitannya dengan stasiun perbukitan dan kegiatan pariwisata domestik. Ditandai dengan berdirinya hotel-hotel yang berada di bawah pengawasan keluarga. Ciri khas dari hotel jenis ini adalah *gemeenschappelijketafel* 'meja bersama'. Maksud dari 'meja bersama' yaitu adanya keakraban dan kebersamaan antara pemilik atau pengelola hotel dengan tamu-tamunya. Pemilik hotel kerap berperan sebagai "ibu", "ayah", atau "bibi" bagi para tamunya (Kelling, 1929: 740). Biasanya bangunan yang kemudian berfungsi sebagai hotel awalnya merupakan rumah atau tempat tinggal pribadi yang menyewakan kamar-kamar atau paviliunnya. Itu sebabnya nama-nama hotel keluarga kerap menggunakan nama pemiliknya (Sunjayadi, 2018: 153).

Contoh hotel keluarga di Garut adalah Hotel van Horck yang berlokasi di Station Road, sekitar 2-3 menit berjalan kaki dari stasiun Garut.² Usaha akomodasi milik keluarga Horck itu mulai beroperasi tahun 1890, sekaligus menjadi hotel pertama yang

²Lokasi Hotel van Horck sekarang berada sekitar kompleks Kodim dan BNI Kota Garut sekarang di Jl. Veteran (Anggadipradja, 1984:159).

berdiri di Garut.³ Bangunan hotel ini bertipe paviliun yang terdiri dari 30 kamar dan 1 rumah (disewakan) (Doorman dan Nieuwenkamp, 1898: 31). Hotel keluarga lainnya adalah Hotel van Vogel yang berlokasi di dekat Alun-alun. Diperkirakan hotel ini mulai beroperasi antara tahun 1890-1891.⁴ Berbeda dari Horck, tipe penginapan Vogel lebih menyerupai wisma. Hotel ini terkenal dengan kuda-kuda tunggangannya. Kuda-kuda tersebut kerap dimanfaatkan para tamunya untuk mencapai objek-objek wisata di Garut (Buys, 1891: 144).

Pada tahun 1897, istri seorang mendiang dokter di Garut membuka sebuah penginapan yang terdiri dari 14 kamar di bekas tempat praktik suaminya. Ia menamai penginapannya Hotel Rupert yang diambil dari nama mendiang suaminya. Lokasinya berada tepat di seberang Hotel van Horck. Selain menyediakan akomodasi, Hotel Rupert juga menerima kunjungan orang-orang yang sekadar datang untuk menjalani terapi kesehatan. Hotel ini memiliki ruang terapi uap dan bak rendam air panas yang dibuka untuk umum (Doorman dan Nieuwenkamp, 1898: 33). Fasilitas tersebut sebetulnya sudah ada sejak bangunan hotel ini masih berfungsi sebagai klinik. Dalam jurnal perjalanannya di Garut, Raja Siam dilaporkan beberapa kali menyempatkan waktunya untuk mandi di klinik tersebut.

“11 Juni 1896: Mandi di klinik seorang dokter yang terletak di seberang hotel (van Horck). Tiap kamar dilengkapi meja untuk berbaring yang dilindungi penutup seperti tenda. Pemanas air ditempatkan di bagian luar kamar-kamar sehingga dapat mengalirkan air panas untuk sauna atau pijat. Kamar mandi dilengkapi shower untuk air panas dan dingin” (Katam & Affandhi, 2012: 568).

Layaknya sebuah hotel keluarga yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Hindia, hotel-hotel di Garut pada periode pertama juga identik dengan suasana kebersamaan dan keakrabannya. Justus van Maurik, seorang wisatawan asal Belanda

³Berita tentang pembukaan Hotel van Horck dimuat dalam surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad*, 12 Agustus 1890.

⁴ Kabar mengenai Hotel van Vogel yang pernah menyita perhatian muncul dalam pemberitaan tentang kunjungan Pangeran Kekaisaran Rusia, Nicholas Alexandrovich ke Garut pada bulan Maret 1891 bersama Pangeran George II, Putera Mahkota Kerajaan Yunani. Kedua pangeran tersebut menginap di rumah bupati Garut, sementara rombongan pengiringnya ditempatkan di Hotel van Vogel dan Hotel van Horck (*Soerabaijasch Handelsblad*, 16/03/1891).

membagikan kesannya selama ia tinggal di Hotel van Horck. Ia memuji cara pemilik hotel yang selalu memperlakukan para tamunya dengan sangat akrab.

“Ny. van Horck adalah sosok ibu yang baik bagi para tamunya. Ia tampak selalu tersenyum, murah hati, dan sangat ramah. Senyumannya bisa menularkan energi positif dan menjadi obat yang ampuh bagi mereka yang sedang menjalani proses pemulihan di hotel ini. Tidak pernah ada tamu yang merasa sungkan dengannya. Bahkan, ruangan pribadi Ny. Horck selalu dipenuhi para tamu yang sengaja datang untuk sekadar mengobrol dan menghabiskan waktu bersama.” (Maurik, 1897: 194).

Periode kedua (1908-1941) perkembangan hotel di Garut ditandai dengan berdirinya hotel-hotel modern yang dikelola secara lebih profesional. Kemunculan hotel-hotel tersebut berkaitan dengan berkembangnya kegiatan pariwisata internasional yang dimulai pada akhir dekade 1900. Dalam tahun-tahun itu dorongan untuk mendatangkan wisatawan asing di kalangan penduduk koloni makin menguat. Hal tersebut ditengarai oleh tumbuhnya kesadaran tentang betapa besarnya potensi yang dimiliki Hindia serta keuntungan yang akan diperoleh dari adanya praktik ini. Terlebih, dari sisi aksesibilitas Hindia dinilai sangat siap karena sudah terhubung ke pelabuhan-pelabuhan utama di Asia, Australia dan Eropa dengan kapal uap (Meulendijks, 2017: 29).

Di lain pihak, pemerintah kolonial membutuhkan suntikan dana tambahan untuk membiayai program-program Politik Etis yang mulai bergulir pada 1901. Pariwisata internasional dipandang bisa menawarkan sumber pendapatan baru bagi ekonomi kolonial dengan biaya sosial atau infrastruktur yang relatif sedikit.⁵ Untuk maksud tersebut, Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz menginisiasi pembentukan biro pariwisata internasional pertama di Batavia bernama *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV) pada 1908 (Cribb, 1995: 195). Tujuan dibentuknya asosiasi ini adalah untuk mempromosikan

⁵ Salah satu sumber pembiayaan Politik Etis adalah melalui pembentukan *Department van Gouvernementsbedrijven* (Departemen Perusahaan Pemerintah) pada 1907. Departemen ini membahawahi perusahaan-perusahaan bidang transportasi, seperti *Staatsspoor- en Tramwegen* dan pos. Wajar apabila pariwisata sebagai sektor yang berhubungan dengan perjalanan menjadi salah satu sumber pemasukan dinas ini yang diharapkan dapat menyokong kelangsungan Politik Etis. Lihat V.J.H. Houben, ‘Profit versus ethics: Government enterprises in the late colonial state’ dalam Robert Cribb (ed), *The Late Colonial State in Indonesia. Political and economic foundation of the Netherlands-Indies 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1994).

Hindia Belanda kepada turis internasional. VTV menempatkan perwakilannya di sejumlah negara potensial, seperti di Belanda, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, India-Britania, Ceylon, negara-negara Selat jajahan Inggris, Thailand, Filipina, Hong Kong, Cina, Australia, Jepang dan Hawaii (Sunjayadi, 2007: 37; Meulendijks, 2017: 31).

Garut yang sejak akhir abad ke-19 sudah ramai dikunjungi para pemukim Eropa di Hindia diprioritaskan menjadi daerah tujuan yang dipromosikan VTV. Di kawasan ini terdapat banyak objek wisata alam, mulai dari gunung, danau, kawah vulkanik, hingga sumber air panas. Semua objek tersebut relatif mudah diakses (Ponder, 1934: 242). Alasan lainnya pemerintah tidak perlu lagi menggelontorkan anggaran besar untuk mengembangkan pariwisata, mengingat di Garut, infrastruktur dan sumber daya pariwisata yang menjadi kebutuhan saat itu relatif telah tersedia. Pada tahun 1909 VTV memberikan bantuan dana sebesar 1.000 gulden kepada perwakilannya di Garut untuk menata fasilitas di sejumlah objek wisata, seperti pengadaan bangku di sekitar Kawah Papandayan, membangun gazebo-gazebo di kawah Talaga Bodas, serta pemasangan petunjuk arah menuju objek-objek wisata (Tweede Jaarverslag VTV, 1910: 8).

Dimasukkannya Garut dalam agenda promosi VTV pada 1908 menandai dimulainya era pariwisata internasional di kawasan ini sekaligus melengkapi pariwisata domestik yang sudah berkembang sebelumnya. Semenjak itu Garut mulai dibanjiri arus wisatawan asing yang datang dari berbagai negara, terutama negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Sebagian wisatawan juga datang dari sejumlah negara di Asia, seperti Jepang, Hong Kong, Singapura, dan Thailand

Kondisi tersebut menuntut hotel-hotel di Garut untuk lebih meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanannya. Berbeda dari hotel keluarga, hampir semua hotel yang beridiri pada periode kedua (1908-1942) berbentuk perusahaan atau perseroan terbatas (N.V). Di antara cirinya adalah terdapat struktur yang jelas, seperti komisaris, direktur, manajer, bendahara, dan staf hotel yang bekerja sesuai bidangnya.⁶ Pada periode ini juga hotel-hotel di Garut terbiasa mengembangkan jejaring melalui

⁶ Hotel-hotel modern di Garut mulai benar-benar melakukan pembenahan struktur perusahaannya menjelang akhir Perang Dunia I, seperti Hotel Kurhaus pada 1917 (*De Locomotif*, 10/12/1918); Hotel Belvedere pada 1919 (*Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 25/03/1919); Hotel Grand Ngamlang dan Hotel Grand Cisarupan pada 1920 (Kelling, 1929: 748-749; Dyck, 1922: 35).

bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dengan organisasi kepariwisataan dan pihak-pihak swasta (Kelling, 1929: 748-749, 753).

Hotel modern pertama yang berdiri di Garut adalah Villa Dolce yang mulai beroperasi tahun 1908 di dekat Stasiun Garut (5 menit berjalan kaki).⁷ Direktur sekaligus manajer hotel ini dijabat oleh L.W.H. Ingenhous, mantan kepala *chef* di ‘Stam dan Weyns’, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis restoran (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 01/07/1911).

Lalu ada Hotel Papandayan yang mulai dibuka pada 1 Januari 1910 dengan mengambil alih kepemilikan Hotel Rupert.⁸ Direktur sekaligus manajer pertama hotel ini adalah H.A.C. Hacks, mantan koki pada sejumlah hotel di Den Haag dan Amsterdam (Couperus, 1923: 146). Namun, setelah bercerai dari istrinya pada 1923, kepemilikan Hotel Papandayan jatuh ketangan mantan istrinya, M.A. Petten, yang kemudian menggantikan posisi Hacks sebagai manajer (*De Preanger Bode*, 29/06/1923).

Berada tepat di seberang Hotel Papandayan terdapat Hotel Kurhaus yang mulai beroperasi pada 1912. Hotel ini sebelumnya merupakan Hotel van Horck yang dibeli oleh C.C. Mulie seharga 110.000 gulden. Hotel Kurhaus menjadi debut Mulie dalam dunia usaha akomodasi setelah ia pensiun sebagai direktur grup restoran Grimm dan Co., Surabaya (*De Express*, 29/04/1912).

Setelah hotelnya dijual, Horck mencoba peruntungan dengan membangun Hotel Villa Pauline di Cisurupan, kaki Gunung Papandayan (4.200 kaki) pada tahun 1913. Namun bisnis baru yang dijalankan van Horck itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1920, Villa Pauline kembali dijual kepada Nederlansch-Indisch Hotelvereeniging (NIHV).⁹ Semenjak kepemilikannya beralih, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Grand Cisurupan dengan W. Kooymans sebagai manajernya (Kelling, 1929: 748).

Pada waktu yang bersamaan Nihv juga membeli Hotel Sanatorium Ngamplang (3.100 kaki). Sebelumnya hotel ini merupakan milik Dr. Mulder, seorang pensiunan

⁷Lokasi Hotel Villa Dolce berada di Jalan Melati, asrama Haji Kabupaten Garut sekarang (Anggadipradja, 1984:159).

⁸Berita tentang pembukaan Hotel Papandayan dimuat dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 1/12/1910.

⁹Pada tahun 1930-an, Nihv berubah nama menjadi Netherland India Hotel Co. (*Tourism Dutch East Indies*, September-Oktober 1938).

dokter di Garut. Ia mendirikan Hotel Sanatorium pada 1913 untuk tempat pemulihan kesehatan dan rumah peristirahatan. Namun, tak lama setelah hotel itu berdiri, justru jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat ini jauh lebih banyak ketimbang mereka yang melawat karena alasan kesehatan. Melihat potensi tersebut, pada tahun 1920 NIHV tertarik untuk membeli Sanatorium dari tangan Dr. Mulder untuk dikembangkan menjadi hotel modern (Dyck, 1922: 35-36). Semenjak beralih kepemilikan, hotel ini lalu berganti nama menjadi Hotel Grand Ngamplang dengan W. De Grooth sebagai manajernya (*Het Hotelblad*, 1938).

Berada tak jauh dari lokasi Grand Hotel Ngamplang, terdapat Villa Hotel Belvedere yang mulai beroperasi pada 1919.¹⁰ Hotel ini berada di bawah naungan N.V. Villa Hotel Belvedere yang berkantor pusat di Bandung. Dana yang dihabiskan untuk membangun hotel ini mencapai 150.000 gulden. Gopner dan van Domseler bertindak selaku komisaris utama hotel ini, sementara manejernya dijabat oleh Mr. Simon. (*Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 25/03/1919).

Pada tahun 1926, H.A.C. Hacks, mantan manajer Hotel Papandayan mendirikan sebuah hotel baru bernama Radium 'Hacks' yang berlokasi di kawasan lereng Kawah Kamojang (4.500). Keberadaan hotel ini juga menandai kembalinya Hacks dalam dunia akomodasi setelah kasus perceraian dengan mantan istrinya (*De Koerier*, 29/12/1927). Lalu ada juga hotel-hotel lainnya yang lebih kecil, seperti Hotel Cilauteureun (Der Preanger) di pesisir pantai selatan (Pameumpeuk), Hotel van Hegel di Tarogong, dan Hotel Melayu (Anggadipradja, 1984: 167; Arismunandar, Dienaputra dan Mulyadi, 2020: 165).

Strategi Hotel-hotel Pegunungan di Garut

a. Menyiasati Tekanan Persaingan

Merebaknya investasi bidang akomodasi di Garut pada akhir periode kolonial diikuti pula dengan persaingan di antara para pelaku usaha sektor ini. Menjadi menarik karena pola persaingan yang terbentuk mengarah pada segmentasi pasar yang spesifik,

¹⁰Lokasi hotel Belvedere sekarang menjadi kompleks asrama tetara di Sukadana, Garut (Anggadipradja, 1984: 167).

yakni wisatawan.¹¹ Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola *berghotel* karena biasanya tamu-tamu mereka tinggal untuk jangka waktu yang relatif lama. Maka sudah sepatutnya mereka menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang mampu membuat tamu-tamunya selalu merasa senang dan nyaman agar mereka tidak mati kutu karena kebosanan.

M.A.J. Kelling mengatakan setidaknya ada delapan poin yang mesti dikuasai oleh seorang manajer *berghotel*. Pertama, ia harus memahami berbagai jenis olahraga, terutama tenis, golf, dan berkuda. Kedua, mampu merencanakan program tur/perjalanan yang dilakukan dari hotelnya dan merekomendasikan program tersebut sesuai kondisi fisik tamunya. Ketiga, mampu menyusun program tertentu untuk mengisi waktu para tamu selama mereka tinggal, sehingga mereka dapat melewati hari-harinya dengan senang hati. Keempat, ia mesti bijaksana dan penyabar. Kelima, mampu mengidentifikasi tamu mana yang kira-kira bisa dikumpulkan untuk memulai tur bersama dan bertindak menjadi penengah bila terjadi perselisihan. Keenam, mengingat labilnya iklim pegunungan, maka ia mesti pintar menjaga suasana hati tamu-tamunya. Ketujuh, salah satu cara menjaga suasana hati para tamu adalah dengan menyediakan makanan & minuman yang sesuai dengan selera mereka. Kedelapan, pastikan tamu pulang dengan perasaan puas karena dengan begitu kemungkinan untuk mempromosikan hotel tempat mereka tinggal kepada kenalannya yang lain terbuka lebar (Kelling, 1929: 745).

Hal lain yang juga mesti dipahami bahwa pada dasarnya berbagai strategi yang diadopsi oleh para pelaku usaha akomodasi wisata bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan agar mendapat keuntungan dari produksi jasa dan pengalaman pariwisata. Maka dari itu, menurut Shaw dan Williams hal terpenting yang mesti diperhatikan adalah sejauh mana mereka mampu mengubah paradigma persaingan

¹¹Menurut laporan *Tourism in Netherland India* (Vol. IX No. 4, 1934) Garut disebut sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat keberadaan hotel-hotel pegunungan berlabel '*tourist hotel*' paling lengkap dan paling mewah di Jawa. Dalam terbitannya yang lain (Vol. VII No. 4, 1932) hotel-hotel di Garut masuk dalam jajaran "*Good hotels has been established at the places throughout Java most attractive to visitors*".

melalui inovasi dalam hal teknologi, produk pelayanan (jasa) dan fasilitas (2004: 83-85).

Dari awal pengoperasiannya Hotel van Horck sudah berusaha menghadirkan akomodasi pegunungan yang ideal. Meski berada di bawah pengawasan keluarga, Horck berhasil memelopori pengembangan konsep hotel yang memadukan unsur kesehatan dan kesenangan di Garut. Untuk membantu proses pemulihan kesehatan para tamunya, ia melengkapi setiap kamar dengan beranda pribadi yang menghadap langsung ke taman. Beranda tersebut berfungsi sebagai ruang duduk dengan seperangkat meja dan kursi untuk bersantai menikmati udara pegunungan sambil meminum teh, kopi atau menyantap kudapan (McMillan, 1914: 229). Ia juga melengkapi fasilitas hotelnya dengan kamar mandi air panas, ruang bilyar, ruang rekreasi, ruang baca/perpustakaan, kuda tunggangan, dan bar (Doorman dan Nieuwenkamp, 1898: 31).

Dari segi makanan, Horck memperkenalkan konsep *perasmanan* atau dikenal juga dengan istilah *rijstaffel*. Menurut Scidmore momen makan malam sering dimanfaatkan para tamu untuk berinteraksi satu sama lain selepas lelah beraktivitas seharian. Ia tak pernah merasa sendirian karena selalu ada teman yang menyenangkan untuk diajak mengobrol dalam bahasa Inggris. Mereka juga terlihat senang karena Ny. Horck menyajikan banyak sekali jenis makanan. Itu sebabnya hotel ini sangat terkenal dari ujung Anyer sampai Banyuwangi (1898: 277-278).

Horck tampaknya cukup jeli menangkap peluang bisnis dari ramainya lalu lintas wisatawan domestik. Ia menyadari jika para pengunjung yang mengarus ke Garut bukan hanya para pencari kesehatan saja, melainkan juga orang-orang yang memang sengaja datang untuk berlibur. Langkah ini menjadi poin plus bagi Horck ketika dua pesaingnya – Hotel Rupert dan Hotel van Vogel – masih menjalankan usaha hotelnya sebagai rumah pemulihan (sanatorium) paling tidak sampai tahun 1900 (Doorman dan Nieuwenkamp, 1898: 33).

Terhubungnya Garut dengan jaringan pariwisata internasional pada akhir 1900-an membuat intensifikasi persaingan antar-hotel makin kentara. Semenjak itu kawasan ini semakin diminati oleh para pelaku usaha perhotelan untuk merintis bisnis mereka.

Bersamaan dengan itu bisnis akomodasi berbasis keluarga yang lama perlahan menghilang, digantikan hotel-hotel modern yang dikelola secara lebih profesional. Pada tahun 1910, Ny. Rupert menjual hotelnya kepada H.A.C. Hacks yang kemudian mendirikan Hotel Papandayan. Dua tahun berselang, giliran van Horck yang menjual hotelnya kepada C.C. Mulie. Keterbatasan modal, pengetahuan, dan ketidaksiapan merespon pola persaingan yang mulai bergeser pada industri skala besar disinyalir menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan hotel-hotel keluarga di Garut dalam mempertahankan bisnisnya.

Beroperasinya Grand Hotel Villa Dolce pada 1908 menandai era baru dunia akomodasi di Garut. L.H.W. Ingenhous berhasil mengubah citra hotel pegunungan yang semula identik dengan hotel keluarga menjadi hotel modern kelas 1 yang sarat dengan kemewahan. Hotel ini memiliki 36 kamar yang dilengkapi kamar mandi pribadi, keran air panas dan dingin, serta *full-length bathtub*. Dibangun pula sarana olah raga sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan para tamu hotel secara gratis, seperti kolam renang dan lapangan tenis (*Official Tourist Bureau*, 1913: 52). Ingenhous juga sering mengundang kelompok musik tradisional untuk menghibur para tamunya, seperti para pemain angklung, calung, dan tarengkong. Biasanya pertunjukan tersebut berlangsung di taman hotel dari siang hingga sore (Tokugawa, 2006: 214).

Pada tahun 1911, Hotel Villa Dolce menerima banyak kritikan terkait masalah makanan. Para tamu yang merasa kecewa lalu melaporkan masalah ini kepada VTV. Mereka mengaku tidak pernah menikmati makanan yang layak selama tinggal di Villa Dolce. Makanan yang disajikan sering kali sudah dalam kondisi dingin serta pelayanannya kurang responsif. Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, VTV pun memutuskan untuk tidak lagi merekomendasikan Villa Dolce kepada para wisatawan.¹² Tindakan VTV tersebut berdampak pada kunjungan tamu yang menginap di Villa Dolce.

¹²Ada enam laporan yang masuk kepada VTV dari turis asal Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Australia yang tidak disebutkan namanya. Keluhan mereka bernada sama, yakni soal makanan yang disajikan pihak hotel.

Merasa dirugikan, L.H.W. Ingenhous lalu melayangkan surat protes yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jenderal sebagai pihak yang ikut mengawasi aktivitas asosiasi tersebut. Ia mengungkapkan kekecewaan atas perlakuan VTV yang dianggap telah merugikan perusahaannya. Ia juga merasa sudah diperlakukan tidak adil karena VTV hanya merekomendasikan Hotel Papandayan saja, yang mana merupakan pesaingnya. Protes Ingenhous pun ditanggapi VTV melalui surat balasan dengan menyertakan lampiran berisi daftar laporan keluhan yang masuk.¹³

Persoalan makanan yang sempat merugikan perusahaannya itu menjadi titik balik bagi Villa Dolce untuk menata kembali strategi bisnisnya. Hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki sistem layanan dan mempekerjakan koki-koki profesional yang berada langsung di bawah pengawasan manajer. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hotelnya, identitas Ingenhous sebagai mantan *chef* di restoran ‘Stam dan Weyns’ selalu disertakan pada setiap laman promosi. Ingenhous tampaknya ingin menawarkan standar masakan Eropa sebagai produk unggulan di hotelnya alih-alih fasilitas dan kemewahan semata. Cara tersebut terbukti berhasil. Pada tahun 1923, *The Goroet Express and Tourist Guide* (12/01) menobatkan Villa Dolce sebagai hotel terbaik dalam kategori *Europe Cuisine* di Garut. Hotel ini juga menyandang julukan ‘*The Lido of the Preanger*’ dari majalah *Tourism in Netherland Indiapada* 1934.

Pesaing terdepan Villa Dolce adalah Hotel Papandayan. Hotel yang berdiri di atas lahan seluas enam hektar itu menjadi salah satu hotel modern kelas 1 terbesar di Jawa. Hotel Papandayan memiliki 100 kamar – 50 kamar sudah dilengkapi kamar mandi air panas dan *full-length bathub*. Hotel ini juga memiliki dua lapangan tenis berstandar yang sering digunakan untuk ajang kejuaraan ‘*Java Championship*’. Dari segi makanan, Hotel Papandayan menyajikan menu masakan khas Eropa dan beragam jenis minuman beralkohol impor. Tarif kamar di hotel Papandayan berkisar antara 6-8 gulden per-hari (The Department of Railways Tokyo, 1920: 414; *The Tourist Guide and Garoet Express*, 7/04/1923).

¹³Korespondensi antara VTV dengan L.W.H. Ingenhous “Hotel Villa-Dolce” dalam **Algemene Secretarie Grote Bundel TZG Agenda 1891-1942 No. 7915, Koleksi ANRI**.

H.A.C. Hacks menjadi sosok kunci di balik berbagai strategi yang dikembangkan oleh Hotel Papandayan. Hal pertama yang menjadi fokus perhatiannya adalah penataan masalah pelayanan. Pada tahapan tertentu ia tetap mempertahankan metode pelayanan yang diterapkan pada hotel-hotel keluarga dalam membangun relasi antara pihak pengelola dengan para tamunya. Ia kerap berperan sebagai ‘ayah’ atau ‘paman’ bagi para tamunya dan rutin melakukan kontak dengan mereka. Sikap Hacks yang hangat membuat para tamu merasa nyaman tinggal di hotelnya. Dengan sendirinya metode tersebut menjadi cara promosi yang efektif untuk menaikkan reputasi Hotel Papandayan di mata wisatawan (Couperus1923: 142). Hal tersebut tercermin dari kesan yang diungkapkan oleh seseorang berinisial ‘pt’ yang pernah menginap di Papandayan.

“Pertengahan Agustus 25 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menghabiskan 6 minggu masa cuti saya di Jawa. Dalam kesempatan itu, saya tinggal selama 1 minggu di Hotel Papandayan, Garoet. Pada momen itulah saya mengenal Tuan Hacks. Dia adalah sosok pria yang sangat gesit dan siap dimintai bantuan kapan saja. Sekalipun jabatannya tinggi, tapi dia bukanlah tipikal orang yang hanya bekerja di belakang meja. Setiap hari dari pagi hingga malam dia terlihat berkeliaran di hotelnya dan selalu ada untuk tamu-tamunya. Tak ada perasaan canggung di antara kami. Dia juga kerap bergabung bersama kami. . . . Tuan Hacks yang hangat sangat dekat dengan tamu-tamunya. Itulah sebabnya sampai sekarang saya merasa seperti mempunyai hubungan khusus dengannya. Mungkin tamu-tamu lain juga merasakan hal serupa.” (Het Hotelblad, September 1937).

Untuk menarik minat calon konsumennya, Hotel Papandayan mengembangkan satu bidang usaha berupa program tur ke objek-objek wisata di Garut. Ada beberapa paket perjalanan yang ditawarkan, antara lain paket perjalanan ke Situ Cangkuang-Situ Bagendit-Cipanas; paket perjalanan ke Kawah Papandayan; paket perjalanan ke Kawah Talaga Bodas; paket perjalanan ke Kawah Kamojang; paket perjalanan ke Kawah Manuk, dan paket perjalanan ke Pantai Cilauteureun (Pameumpeuk). Selain itu, ada juga paket wisata berburu dan memancing di kawasan Garut selatan. Tarif untuk masing-masing paket perjalanan berada dikisaran 30-50 gulden. Biaya tersebut sudah termasuk sewa mobil, sopir, pemandu, kuli (tandu dan barang), kuda, perahu, hiburan, sarapan, dan makan siang. Bagi tamu hotel yang mengikuti program tur mereka akan dibangunkan pagi hari dan disiapkan sarapan segera untuk kemudian memulai

perjalanan. Mereka akan diantarkan ke tempat tujuan sesuai paket perjalanan yang dipesan dan kembali ke hotel pada siang atau sore hari (*The Tourist Guide and Garoet Express*, 8/12/1922; 22/12/1922; 12/01/1923).

Kehadiran Hotel Kurhaus yang mengambilalih kepemilikan Hotel van Horck pada tahun 1912 makin menambah ramai persaingan. C.C. Mulie selaku direktur dan manajer yang baru pelan-pelan mulai mengubah citra hotel keluarga yang sudah melekat di tangan pemilik sebelumnya menjadi hotel modern kelas 1. Bermodalkan dana 1.000 gulden, ia melakukan sejumlah perombakan baik dari segi fisik maupun manajerialnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menambah jumlah kamar yang semula 30 menjadi 50 kamar serta membangun fasilitas olahraga berupa lapangan tenis. Untuk menarik minat calon konsumennya, disediakan pula ruangan khusus untuk hiburan. Setiap malam di ruangan tersebut diselenggarakan orkes musik yang tampil secara reguler untuk menghibur para tamu hotel (*De Express*, 29/04/1912).

Usaha yang dirintis Mulie itu ternyata tak berjalan sesuai harapan. Meski telah melakukan beberapa perombakan, namun hal tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap tingkat kunjungan. Hotel Kurhaus tampaknya masih kalah bersaing dari tetangganya, Hotel Papandayan. Pada 1917 Mulie memutuskan untuk menyewakan Hotel Kurhaus kepada L. Schliebner (*De Locomotief*, 18/10/1917; 10/12/1918). Di bawah manajemen barunya, Hotel Kurhaus membuka usaha penyewaan mobil yang bisa dimanfaatkan para tamunya untuk berkunjung ke objek-objek wisata. Schliebner juga melengkapi barnya dengan minuman beralkohol yang lebih beragam, mulai dari anggur Rhine dan Moselle, anggur Prancis, California, Australia, anggur merah dan putih (*De Locomotief*, 7/12/1918). Tarif hotel ini berkisar antara 6-8 gulden per-hari (The Department of Railways Tokyo, 1920: 414).

Setelah menjual hotelnya, Horck mendirikan hotel baru bernama Villa Pauline di Cisurupan. Pada awal kemunculannya, Villa Pauline cukup menyita perhatian karena menjadi hotel pertama yang dibangun di kaki gunung Papandayan. Waktu itu kawah Papandayan dikenal sebagai objek wisata paling populer di Garut, sehingga banyak kalangan menilai keputusan Horck tersebut tepat (*Het nieuws van den dag*, 21/01/1914). Konsep hotel yang diusung tak berbeda jauh dari hotel yang ia kelola sebelumnya, yaitu

memadukan unsur kesehatan dan kesenangan. Hotel Villa Pauline memiliki delapan bangunan utama. Di halamannya terdapat taman yang luas dan dihiasi oleh berbagai jenis bunga. Selain itu disediakan pula beberapa kamar mandi yang dilengkapi dengan keran air panas (Official Tourist Bureau, 1913: 52).

Sekalipun fasilitas Villa Pauline terbilang lengkap dan berada di lokasi yang menjanjikan, bukan berarti menjadi jaminan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Faktor aksesibilitas menjadi masalah yang masih belum bisa teratasi sepenuhnya. Jarak tempuh dari Kota Garut ke hotel ini sejauh 18 km atau sekitar 45 menit perjalanan mobil mengingat kawasan Cisurupan baru terhubung dengan jaringan kereta api pada 1930. Sementara sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Garut datang dengan menggunakan kereta api. Umumnya mereka lebih memilih tinggal di hotel-hotel yang berada di sekitar stasiun. Villa Pauline lebih sering dijadikan tempat persinggahan oleh para wisatawan yang hendak mengunjungi kawah Papandayan alih-alih tinggal untuk jangka waktu yang lama. Di sana wisatawan biasanya memesan jasa kuli, kuda, dan tandu untuk pergi ke Kawah Papandayan (Walcott, 1914: 250).

Horck akhirnya menjual Villa Pauline kepada Nederlandsch-Indisch Hotelvereeniging (NIHV) pada 1920. Asosiasi yang berdiri pada 1919 itu berambisi untuk mengelola jaringan hotel-hotel di Jawa, terutama di kota-kota yang menjadi tujuan wisata. Mereka memulai misinya itu dengan mengelola empat hotel pegunungan. Dua di antaranya berada di Garut, yaitu Hotel Villa Pauline (Grand Hotel Cisurupan) dan Hotel Sanatorium (Grand Hotel Ngamplang). Sementara sisanya adalah Hotel Sanatorium Tosari dan Hotel Nongkojajar di Jawa Timur (Kelling, 1929: 748).

Berbeda dari para pesaing terdahulunya, NIHV mengembangkan dua hotelnya di Garut dengan mengusung konsep *resort* yang berorientasi pada pelayanan terpadu. Langkah pertama yang dilakukan adalah membenahi masalah kesehatan dan kebersihan. Kedua persoalan tersebut acap kali menyebabkan para wisatawan terkena disentri atau tifus alih-alih memulihkan kesehatan mereka di daerah pegunungan. NIVH berkonsultasi kepada sejumlah ahli hidrologi untuk memeriksa kelayakan sumber air minum dan menjalani pemeriksaan bakteriologis secara teratur. NIHV juga mempekerjakan dokter umum di Grand Hotel Ngamplang untuk merawat tamu-tamunya

yang sakit. Dokter tersebut rutin mengunjungi Grand Hotel Cisurupan untuk melakukan pemeriksaan di sana (Kelling, 1929: 748-749).

Langkah selanjutnya adalah memodernisasi jaringan transportasi guna mengatasi masalah aksesibilitas. Hal tersebut dinilai sangat penting karena kedua hotel NIHV di Garut berada jauh dari stasiun kereta api – Grand Hotel Ngamplang 7 km dan Grand Hotel Cisurupan 18 km. Dimulai dengan memperbaiki akses jalan yang menghubungkan Ngamplang dan Cisurupan, termasuk memperbaiki beberapa jembatan yang rusak. Lalu mendirikan N.V. Nederlandsch-Indisch Automobielerhuurderij (N.V. NIA), sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Ada dua bidang usaha yang dikelola unit ini, pertama adalah jasa penyewaan mobil untuk antar-jemput tamu di stasiun. Para tamu juga bisa menyewa mobil tersebut untuk mengantar mereka pergi mengunjungi objek-objek wisata (Kelling, 1929: 753). Kedua adalah jasa angkutan umum berupa omnibus yang beroperasi secara reguler dengan trayek Ngamplang-Garut (kota) – Cisurupan (Dyck, 1922: 63).

Untuk memenuhi pasokan bahan makan, Hotel Grand Ngamplang dan Grand Cisurupan mengembangkan peternakan sapi dan kebun sayur sendiri. Kedua hotel tersebut memiliki puluhan sapi perah yang ditempatkan di sebuah istal khusus. Para pegawai di istal merupakan orang-orang pribumi yang bekerja di bawah pengawasan langsung seorang mandor Eropa. Tugas mereka adalah memproduksi susu sapi segar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik hotel. Sisa susu yang tidak habis dikonsumsi ditampung pada sebuah tempat khusus untuk kemudian mereka olah menjadi mentega (Dyck, 1922: 39). Susu merupakan salah satu bahan makanan utama hotel-hotel di Garut. Biasanya dihidangkan saat sarapan bersama kopi, teh, coklat dan roti mentega atau selai (*The Tourist Guide and Garoet Express*, 22/12/1922).

Dari sisi fasilitas, baik Grand Ngamplang maupun Grand Cisurupan sudah dilengkapi dengan fasilitas modern yang terhitung mewah pada masanya. Keduanya dilengkapi dengan kolam renang, lapangan golf, tenis, lapangan berkuda, serta ruang bilyar (*Het Hotelblad*, 1938). Grand Cisurupan memiliki 45 kamar – 8 kamar dengan kamar mandi pribadi – dan tiga bangunan paviliun. Sedangkan Grand Ngamplang memiliki 42 kamar yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi pribadi beserta keran air

panas. Untuk memperlancar sirkulasi pengiriman surat dan barang, NIVH mendirikan kantor pos di Grand Hotel Ngamplang (Dyck, 1922: 36).

Pesaing terdekat Grand Ngamplang adalah Villa Hotel Belvedere yang juga menawarkan akomodasi penginapan kelas 1. Bila dibandingkan hotel-hotel lain di Garut, Villa Hotel Belvedere termasuk kecil, hanya memiliki 26 kamar (*Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 25/03/1919). Walau begitu hotel ini memiliki fasilitas yang lumayan lengkap. Masing-masing kamar sudah dilengkapi kamar mandi pribadi dengan keran air panas. Kolam renang Villa Belvedere dikenal paling bagus di antara hotel-hotel lainnya. Tersedia pula lapangan tenis dan taman yang langsung mengarah pada lanskap pesawahan yang luas berlatar belakang pemandangan Gunung Cikuray (*The Tourist Guide and Garoet Express*, 16/03/1923).

Namun, pengelola Villa Hotel Belvedere rupanya perlu bekerja lebih keras untuk bisa bersaing mendapatkan banyak pengunjung. Sebagai pendatang baru mereka mesti berhadapan dengan hotel-hotel terdahulu yang telah mempunyai nama besar, seperti Hotel Papandayan dan Villa Dolce. Situasi tampak makin berat dirasakan ketika NIHV mengambil alih kepemilikan Sanatorium Ngamplang pada 1920. Selain karena lokasinya berdekatan (sekitar 2 km), pesaing barunya itu juga berani menawarkan tarif hotel dengan rentang harga yang sama, yakni 7-10 gulden per-hari dengan fasilitas yang relatif lebih lengkap. Dalam merespon hal tersebut, manajemen Villa Belvedere coba melakukan strategi pemotongan harga melalui program promosi, yakni memberikan tarif yang lebih murah bila tamu datang membawa serta teman hanya cukup membayar 14-18 gulden untuk dua orang (*The Tourist Guide and Garoet Express*, 16/02/1923).

Villa Belvedere mesti berjalan tertatih-tatih karena strategi pemotongan harga yang mereka tawarkan tampaknya tidak berdampak terlalu signifikan. Dalam lima tahun pertama hotel ini berdiri tidak tampak adanya suatu inovasi yang berarti. Hal tersebut mengindikasikan ketidaksiapan dari para personalianya dalam menghadapi tekanan persaingan. Mereka justru malah terlilit masalah keuangan akibat sejumlah investor menarik kembali investasinya. Bahkan, pada tahun 1922 beredar kabar yang menyatakan bahwa Villa Belvedere tengah di ambang kebangkrutan (*De Express*, 22/07/1922). Sekalipun rumor ini ditampik dengan dalih sedang dalam proses evaluasi

kinerja menyeluruh, namun pada akhirnya pihak manajemen tidak bisa lagi mengelak dari krisis keuangan yang berulang kali terjadi. Pada 1924 Villa Belvedere pun dijual kepada W. Schmauch (*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 22/07/1924; 15/09/1924).

Beralihnya kepemilikan tampaknya tak memberi dampak yang terlalu signifikan terhadap kemajuan perusahaan. Selama era W. Schmauch kebijakan yang paling terlihat dalam upaya menjaring lebih banyak pengunjung hanyalah kembali melakukan pemotongan tarif kamar untuk merespon persaingan harga dari kompetitor terdekatnya. Sayangnya kebijakan tersebut tidak banyak berpengaruh (*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 22/07/1924). Akhirnya pada 1931 pihak manajemen memutuskan untuk menutup Villa Belvedere (*Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 9/07/1931).

Di lereng Kawah Kamojang, Hotel Radium 'Hacks' hadir menawarkan sebuah penginapan dengan mengusung konsep *health resort*. Kawasan kawah Kamojang yang berada di ketinggian 4.500 kaki menghasilkan udara segar yang cocok untuk pemulihan kesehatan. Di kawasan ini juga terdapat sumber air panas vulkanik yang berkhasiat untuk penyembuhan rematik dan penyakit kulit. Air tersebut dialirkan langsung ke hotel sehingga para tamu dapat memanfaatkannya untuk mandi (*De Koerir*, 29/12/1927).

H.A.C. Hacks mengembangkan Hotel Radium menjadi pusat spa medis di Garut. Mengingat waktu itu di Garut belum ada lagi hotel yang menyediakan fasilitas spa yang layak semenjak Hotel Rupert gulung tikar pada 1910. Ia membangun kamar-kamar spa yang bisa digunakan oleh 1-2 orang lengkap dengan bak rendam air panas. Sumber uap yang digunakan berasal dari air panas alami dan hantaran asap gugusan kawah vulkanik kecil di sekitar hotel yang sudah melalui penyaringan sedemikian rupa. Menurut laporan *Tourism In Netherlan India* (1934) Hotel Radium 'Hacks' merupakan satu dari dua tempat spa medis terbaik di Jawa yang paling direkomendasikan kepada para wisatawan selain di Tosari (Jawa Timur).

Selain menawarkan penginapan, Radium 'Hacks' juga kerap kali dijadikan sebagai tempat istirahat oleh para wisatawan yang hendak mengunjungi Kawah Kamojang. Biasanya mobil-mobil yang mengantar para wisatawan diparkir di hotel ini.

Di sana terdapat penyewaan kuda dan tandu yang bisa dimanfaatkan untuk mengantar mereka ke komplek kawah (*De Indische Courant*, 30/03/1936).

b. Menjalin Kolaborasi

Keberlangsungan hotel-hotel pegunungan di Garut sangat bergantung pada lalu lintas wisatawan. Semakin ramai kawasan ini dikunjungi oleh wisatawan, maka semakin besar pula kesempatan mereka memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu para pelaku usaha perhotelan dituntut tidak hanya bertindak sebagai penyedia jasa akomodasi saja, tetapi juga terlibat aktif dalam menyokong upaya-upaya pemajuan pariwisata agar roda bisnis mereka dapat terus berputar. Langkah kongkret yang mereka tempuh adalah dengan melakukan berbagai bentuk kolaborasi dan aliansi dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Selain dianggap penting bagi keberlangsungan perusahaan, pada saat itu kolaborasi dan aliansi juga mengarah pada kepentingan yang lebih luas dan substansial, yakni memelihara ekosistem industri perhotelan agar bisa terus bertahan (*Het Hotelblad*, September 1937).

Upaya untuk mendatangkan wisatawan melalui praktik kolaborasi sudah coba dilakukan oleh para pelaku usaha perhotelan di Garut sejak akhir abad ke-19. Di antaranya adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Hotel van Horck dan Hotel Homan (Bandung). Menjelang akhir abad ke-19, pergi ke daerah-daerah pegunungan telah menjadi rutinitas bagi sebagian pemukim Eropa di Hindia. Namun, pada saat itu informasi mengenai tempat-tempat menarik di daerah pegunungan masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya tereksplorasi. Berangkat dari hal tersebut, Horck berinisiasi menjalin kolaborasi dengan Hotel Homan untuk menerbitkan sebuah buku panduan.

Dalam merealisasikan proyek buku panduan tersebut, Horck dan Homan lalu menggandeng seorang penulis dan ilustrator. Dia adalah J.G. Doorman, pengajar di Gymnasium Willem III, Meester Cornelis yang dipercaya untuk menyusun tulisannya. Sementara ilustrasinya dikerjakan oleh pelukis asal Haarlem, W.O.J. Nieuwenkamp (*De Locomotief Samarangsch*, 30/11/1898). Maka pada 1898, terbit buku berjudul *Gids voor Bandoeng-Garoet en Omstreken*. Buku ini berisi panduan perjalanan ke beberapa tempat menarik di Bandung dan Garut yang bisa dilakukan dari Hotel Homan dan Hotel

van Horck.¹⁴ Di dalamnya disertakan pula biaya yang mesti dipersiapkan untuk mengunjungi setiap objek, mulai dari tarif kereta kuda, upah pemandu, kuli, tandu, dan harga sewa kuda tunggangan.

Setelah melewati tahun-tahun yang sulit, Hotel Kurhaus mulai membuka diri terhadap segala bentuk kolaborasi dalam upaya mendorong peningkatan jumlah pengunjung. Di bawah manajer barunya, L. Schliebner, mereka memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Java Motor Club (JMC), organisasi para pemilik kendaraan bermotor di Hindia Belanda. Schliebner menilai JMC adalah mitra yang paling tepat untuk diajak kerjasama. Selain aktif menyokong kegiatan pariwisata, organisasi ini juga mempunyai cabang di banyak kota sehingga akan sangat membantu perusahaan dalam meluaskan jejaringnya. Kerjasama antara Hotel Kurhaus dan JMC mulai berlaku pada tahun 1918. Sebagai konsesinya, Hotel Kurhaus akan memberikan harga khusus bagi setiap anggota JMC dan wisatawan yang memiliki kaitan dengan organisasi tersebut, termasuk membebaskan biaya parkir selama mereka tinggal (*De Locomotief*, 7/12/1918).

Perang Dunia I (PD I) yang berkecamuk di Eropa (1914-1918), tidak hanya berimbas terhadap penurunan tingkat kunjungan wisatawan asing ke Garut melainkan juga Hindia Belanda secara umum. Kelesuan tersebut terlihat jelas dari laporan yang dirilis VTV pada 1921. Tingkat kunjungan wisatawan asing ke Hindia pada 1914 berjumlah 4.516 orang menurun drastis menjadi 380 orang pada tahun 1915. Meskipun pada tahun-tahun setelahnya mengalami kenaikan, namun itu tidak terlalu signifikan (1916 berjumlah 835 orang dan 1917 berjumlah 742 orang). Situasi dirasa mulai membaik menjelang akhir masa perang dengan tingkat kunjungan di atas seribu orang (1918 berjumlah 1.511 orang; th. 1919 berjumlah 2.296 orang; th. 1920 berjumlah 2.570 orang).¹⁵

¹⁴ Objek wisata di Bandung yang ditawarkan dalam buku ini, antara lain Curug Panganten Dago, Kawah Tangkuban Parahu, Kawah Putih, dan Pangalengan. Sementara tempat-tempat menarik di Garut, seperti Cipanas, Gunung Guntur, Kawah Papandayan, Situ Bagendit, Situ Cangkuang, Kawah Manuk, dan Kawah Talaga Bodas.

¹⁵ Lihat "Overzicht van het aantal vreemdelingen aangekomen in den Nederlansch Indischen Archipel gedurende de jaren 1908-1920" dapat diakses di Algemene Secretarie Grote Bundel TZG Agenda 1891-1942 No. 7915, Koleksi ANRI.

Meskipun jumlah kunjungan wisatawan asing ke Hindia secara umum berangsur meningkat, akan tetapi dampak dari PD I terhadap pariwisata di Garut tampaknya masih terus berlanjut hingga awal tahun 1922.¹⁶ Misalnya, *Pemberita Makassar* (17/11/1922) menyoroti kondisi pariwisata di Garut yang belum dapat pulih sepenuhnya. Disebutkan dalam laporannya bahwa krisis ekonomi yang terjadi pasca perang membuat Garut sepi dari kunjungan wisatawan asing. Situasi tersebut berimbas pada hotel-hotel di sana yang terus mengalami penurunan jumlah pengunjung.

Kelesuan yang melanda pariwisata Garut disadari betul oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam sektor ini, terutama para pelaku usaha akomodasi dan bahkan oleh VTV sendiri. Dorongan untuk menyiasati situasi tersebut kemudian muncul melalui upaya penataan kembali aspek pelayanan dan peningkatan aktivitas promosi. Pada awal tahun 1920-an, NIHV mendirikan *Touristen-Bureau* (biro pariwisata) yang dipimpin langsung oleh W. De Grooth (Grand Ngamplang) dan W. Kooymans (Grand Cisurupan). Biro yang berlokasi di Stationweg itu disediakan khusus sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi para wisatawan (Dyck, 1922: i, 53).

NIHV juga mengalihkan sasaran promosinya kepada wisatawan asal Belanda dan wisatawan domestik (penduduk Belanda di Hindia). Berdasarkan laporan VTV kunjungan turis asal Belanda selama periode 1919-1929 hanya berjumlah 2.140 orang. Jumlah ini masih kalah jauh di bawah wisatawan asal Inggris (12.323 orang) dan Amerika (8.876 orang).¹⁷ NIHV lalu bekerja sama dengan J.Z. Van Dyck untuk menyusun sebuah buku panduan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan keindahan alam Garut terutama kepada wisatawan berbahasa Belanda, baik di dalam maupun luar negeri yang belum pernah mengunjungi tempat ini. Maka pada 1922 terbitlah buku *Garoet en Omstreken*.

Pada tahun yang sama, VTV perwakilan Garut menerbitkan majalah mingguan (*weekblad*) berbahasa Inggris dan Belanda, *The Tourist Guide and Garoet*

¹⁶ Dalam laporan tahunan VTV ke 15 disebutkan bahwa di antara daerah-daerah tujuan wisata yang mengalami penurunan pengunjung adalah Garut dan Sukabumi. Lihat *Vijftiende Jaarverslag der Vereeniging Toeristenverkeer* 1922, 1923, hlm. 4.

¹⁷ *Jaarverslag Vereeniging Toeristenverkeer* 1922-1929.

Express(TGGE).¹⁸ VTV menggandeng para pelaku usaha perhotelan di Garut untuk bekerja sama dalam mengembangkan majalah ini. Nama-nama seperti H.A.C. Hacks (Hotel Papandayan), L.W.H. Ingenhous (Hotel Villa Dolce), W. Kooymans (Grand Cisurupan), W. De Grooth (Grand Ngamplang), dan Simon (Villa Hotel Belvedere) aktif menyokong pada setiap penerbitan TGGE melalui pemasangan iklan hotel-hotel mereka.

Beberapa hotel di Garut juga coba meluaskan jejaringnya dengan bergabung bersama *Algemeene Bond Hotelhouders in Nederland-Indie* 'Ikatan para pemilik hotel di Hindia Belanda' (ABHINI). ABHINI terbentuk pada tahun 1925 di Grand Hotel Yogyakarta. Tujuan didirikannya perhimpunan ini adalah meningkatkan industri perhotelan dalam arti yang seluasnya, selain mempromosikan kepentingan material para anggota dan pegawai mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu upayanya adalah mempromosikan pariwisata dalam arti yang luas (Sunjayadi, 2019: 152-153).

Anggota ABHINI tersebar hampir di seluruh kota di Hindia Belanda. Untuk memudahkan koordinasi antar-anggotanya perhimpunan ini membentuk semacam rayon kerja daerah yang disebut *kring*. Salah satunya adalah *Kring* Bandung yang membawahi hotel-hotel di Priangan dan Cirebon, termasuk Garut. Beberapa pelaku usaha perhotelan di Garut yang ikut bergabung dengan ABHINI, antara lain L.W.H Ingenhous (Villa Dolce), M.A. Petten (Hotel Papandayan), H.A.C. Hacks (Hotel Radium), dan W. Kooymans (Grand Hotel Cisurupan/NIHV) (*Het Hotelblad*, Desember 1937). ABHINI *Kring* Bandung rutin mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan bisnis perhotelan dan pariwisata.¹⁹

¹⁸TGGE menjadi terbitan berkala pertama yang menyajikan informasi mengenai pariwisata Garut secara komperhensif. Setiap minggunya VTV mendistribusikan majalah ini ke hotel-hotel kelas 1 di Hindia Belanda, Singapura, Malaysia, Siam, Hong Kong, Shanghai, India-Inggris, Australia dan sejumlah negara di Eropa. Tamu di hotel-hotel tersebut bisa memperoleh majalah ini secara gratis. Untuk menjaring calon wisatawan asal Amerika Serikat, VTV juga membuka agen pemasaran TGGE di West-Street, New York City.

¹⁹ Contohnya membahas perkembangan terkini mengenai kondisi bisnis perhotelan di setiap daerah, mengkaji peluang yang bisa dimaksimalkan oleh hotel-hotel dalam menyambut musim liburan atau acara-acara sejumlah institusi yang mendatangkan peserta dari berbagai negara, seperti kongres kesehatan dan kongres ilmu pengetahuan. Lihat *Het Hotelblad*, April 1937.

Pada 14 Februari 1934 diadakan rapat pembentukan *Vereeniging Mooi Garoet* (Asosiasi Garut Indah) yang dihadiri oleh Asisten Residen Sangster dan Bupati Garut Rd. Tg. M. Soeria-Kartalegawa sebagai penggagas. Tujuan dibentuknya asosiasi ini adalah *de behartiging der Garoetsche belangen* ‘representasi dari kepentingan Garut’. Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai upaya, antara lain mempromosikan wilayah Garut sebagai tempat tinggal yang nyaman dan daerah pariwisata (Sunjayadi, 2019: 166). Sebagai bentuk dukungan terhadap *Mooi Garoet*, ABHINI Garut menempatkan seorang perwakilannya dalam kepengurusan perhimpunan ini, yakni W. Kooymans dari Grand Hotel Cisurupan (*Het Hotelblad*, April 1937).

Selang beberapa waktu setelah resmi terbentuk, *Mooi Garoet* mengajak serta para pemilik hotel di Garut untuk menjalin kerja sama dengan VTV membicarakan masalah promosi. Kerja sama tersebut menghasilkan penerbitan nomor khusus Garut untuk majalah VTV, *Tourism in Netherlands India* pada 1934.²⁰ Dari 57 foto yang digunakan sebagai ilustrasi majalah, 47 foto merupakan foto berobjek Garut dan sekitarnya. Misalnya foto Mesjid Garut, taman Hotel Villa Dolce, pasangan pengantin Sunda, Grand Hotel Ngamplang, perkebunan teh beserta aktivitas para pekerjanya, dan Kawah Papandayan.²¹

Kedatangan Jepang pada pertengahan bulan Maret 1942 ke kota Garut menandai akhir kegiatan pariwisata di kawasan ini. Pasukan Jepang mengambil alih semua fasilitas umum yang ada di Garut, termasuk hotel-hotel. Hotel Papandayan ditutup untuk umum karena telah digunakan menjadi markas *Kempetai* dan para perwira tentara Jepang. Begitupun Hotel Ngamplang yang dimanfaatkan sebagai tempat kediaman orang-orang sipil Jepang. Tempat lainnya adalah Societeit Intra Montes yang dipakai asrama para prajurit. Lalu kompleks pemandian air panas di Cipanas untuk tempat peristirahatan atau merawat pasukan yang sakit (Sofianto, 1997: 113).

²⁰ Nomor khusus Garut ini dimuat dalam majalah *Tourism in Netherlands India* Volume IX No. 4 tahun 1934.

²¹ Lihat juga “Mooi Garoet” dalam *Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad*, 30 Oktober 1934.

PENUTUP

Berbagai strategi yang dilakukan hotel-hotel pegunungan (*berghotel*) di Garut menandakan bahwa sektor akomodasi pariwisata kolonial bukan semata hadir sebagai sarana pelengkap untuk memfasilitasi kebutuhan para wisatawan. Hotel-hotel tersebut justru tampil menjadi sebuah entitas yang juga ikut berkepentingan dalam praktik pariwisata yang berlangsung. Mereka saling bersaing berebut atensi dari para wisatawan selaku target pasar mereka dengan menunjukkan kelebihan masing-masing.

Dalam menyiasati tekanan persaingan, hotel-hotel pegunungan di Garut mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada produk jasa dan pengalaman pariwisata. Upaya yang dilakukan adalah dengan menawarkan pengalaman masa tinggal yang nyaman dan menyenangkan melalui penyediaan macam-macam fasilitas dan pelayanan. Tak ayal mereka berlomba-lomba untuk melengkapi hotel-hotelnya dengan fasilitas modern, mulai dari kolam renang, lapangan tenis, golf, kamar mandi yang dilengkapi keran air panas dan dingin, ruang baca, hotel orkestra, hingga bar yang menyediakan beragam minuman beralkohol impor. Sedangkan dari sisi jasa atau pelayanan, mereka mengembangkan beragam macam penawaran, seperti sewa mobil, program tur, jasa omnibus, dan lain sebagainya.

Hotel-hotel pegunungan di Garut juga terbiasa mengembangkan jejaring melalui bentuk-bentuk kolaborasi dan aliansi dengan berbagai pihak. Hal itu dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan datang agar roda bisnis mereka dapat terus berputar. Langkah-langkah yang mereka tempuh, antara lain dengan terlibat aktif dalam sejumlah asosiasi atau perhimpunan, menjalin kerja sama dengan sebuah organisasi yang terkait dengan pariwisata dan perjalanan, berkolaborasi dalam urusan promosi dengan para penyusun buku panduan dan media cetak, serta menyelenggarakan kegiatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadipradja. 1984. *Sejarah Garut dari Masa ke Masa*. Garut: Pemerintah Daerah Tk. II Kab. Garut.
- Bataviaasch Nieuwsblad*, 12 Agustus 1890; 7 Juli 1896; 26 Juni 1923.
- Buys, M. 1891. *Batavia, Buitenzorg, en De Preanger, Gids voor bezoekers en toeristen*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Cooper, C. P. 1998. *Tourism: Principles and Practice (2nd ed)*. London: Prentice Hall.
- Couperus, L. 1992. *Ootswaarts*. Amsterdam: L.J Veen.
- Cribb, R. 1995. "International turism in Java 1900-1930". *Jurnal South East Asia Research*, 3 (2), hlm. 193-204.
- De Expres*, 22 Juli 1922.
- De Indische Courant*, 30 Maret 1936.
- De Koerier*, 29 Desember 1927.
- De Locomotief*, 30 November 1898; 7 Desember 1918; 10 Desember 1918.
- De Maasbode*, 21 Juni 1923; 22 Juni 1923.
- De Preanger Bode*, 29 Juni 1923.
- De-Lilah. 1899. *Mevrouw Klausine Klobben op Java*. Utrecht: H. Honig.
- De Wit, A. 1898. *Facts and Fancies about Java*. Singapura: Straits Times Press.
- Doorman, J.G. & Nieuwenkamp, W.O.J. 1898. *Gids voor Bandoeng Garoet en Omstreken*. Hotel Homan en Hotel van Horck te Bandoeng en Garoet.
- Dyck, J.Z. 1922. *Garoet en omstreken zwerftochten door de Preanger*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gelder, W. 1889. *Beschijving van het Eiland Java en Zijn Bewoners. Dell II: West Java*. Batavia: G. Kolf.

- Gottschalk, L. 2008. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Hardjasaputra, A.S. 2001. "Pariwisata di Bandung Tempo Dulu (1870-1940)". Makalah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung.
- Het Hotelblaad*, April 1937; September 1937; Desember 1937; Maret 1938.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 1 Desember 1910; 25 Maret 1919; 22 Juli 1922; 21 Juli 1928; 9 Juli 1931.
- "Hotel Villa Dolce" dalam Algemene Secretarie Grote Bundel TZG Agenda 1891-1942 No. 7915, Koleksi ANRI.
- Houben, V.J.H. 1994. 'Profit versus ethics: Gouvernment enterprises in the late colonial state' dalam Cribb, R (ed), *The Late Colonial State in Indonesia. Political and economic foundation of the Netherlands-Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.
- Jafari, J. 2000. *Encyclopedia of Tourism*. New York: Routledge.
- Kelling, M.A.J. 1929. "Het Hotelwezen in Nederlands-Indie" dalam *Indische Gids*. Amsterdam: J.H. Bussy.
- Maurik, J. 1897. *Indrukken van een Totok*. Amsterdam: van Holkema & Warendorf.
- McMillan, M. 1914. *A Journey to Java*. London: Holden & Hardingham Adelphi.
- Miller, C.J. 1908. *The Newest Way Round the World*. New York: Calkis and Company.
- Meulendijks, H. 2017. *Tourism and Imperialism in the Dutch East Indies: Guidebooks of the Vereeniging Toeristenverkeer in the Late Colonial Era (1908-1939)*. Tesis Tidak Diterbitkan. Utrecht: Utrecht University.
- Mulyana, A. 2005. *Melintasi Pegunungan, Pedataran, dan Rawa-rawa; Pembangunan Jalur Kereta Api di Priangan 1878-1924*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.
- Munandar, A, Dienaputra, R.D, & Mulyadi, R.M. 2020. "Dari Pasanggrahan hingga Grand Hotel: Akomodasi Penginapan untuk Turis pada Masa Hindia Belanda di Priangan (1869-1942)", dalam *Jurnal Patanjala*, 12 (2). hlm. 159-176.
- Oemar, F. 1896. "Een reisje in het oosten der Preanger-Regentschappen", dalam *De Java Bode*. 24 Maret 1896.

- “Overzicht van het aantal vreemdelingen aangekomen in den Nederlansch Indischen Archipel gedurende de jaren 1908-1920”. (1921). Diakses di Algemene Secretarie Grote Bundel TZG Agenda 1891-1942 No. 7915, Koleksi ANRI.
- Ponder, H.W. 1934. *Javanese Panorama*. London: Seeley, Service & Co. Ltd.
- Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant*, 12 Juni 1896.
- Scidmore, E.R. 1898. *Java the Garden of the East*. New York: The Century Co.
- Shaw, G & Williams, A. 2004. *Tourism and Tourism Spaces*. London: Sage Publications.
- Sjamsuddin, H. 2012. *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soerabaijasch Handelsblad*, 16 Maret 1891.
- Sofianto, K. 1997. *Kehidupan Masyarakat Kota Garut 1930-1965*. (Tesis). Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pasca Sarjana FIB Universitas Indonesia, Depok.
- Spencer, J.E. & Thomas, W.L. 1948. “The Hill Stations and Summer Resort of the Orient”, dalam *Geographical Review*, Vol. 38, No. 4. Oktober 1948, hal. 637-651.
- Sunjayadi, A. 2007. *Vereeniging Toeristen Verkeer Batavia (1908-1942) awal turisme modern di Hindia Belanda*. Depok: FIB-UI.
- Sunjayadi, A. 2018. “Pelayan Pribumi dalam Akomodasi Turisme di Hindia Belanda”, dalam *Jurnal Sejarah Abad*. Vol. 2, No. 1. Juli 2018, hlm. 145-162.
- Sunjayadi, A. 2019. *Pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942*. Jakarta: KPG.
- The Tourist Guide and Garoet Express*, 8 Desember 1922; 22 Desember 1922; 12 Januari 1923; 2 Februari 1923; 16 Maret 1923; 7 April 1923.
- Tokugawa, M. 2006. *Perdjalanan menoedjoe Djawa*. Bandung: Penerbit ITB.
- Tourism Dutch East Indies*, September-Oktober 1938.
- Tourism In Netherlan India*, Vol. VII No. 4. Juli-Agustus 1932; Vol. IX No. 4, 1934.
- Walcott, A.S. 1914. *Java and Her Neighbours: A Travellers Notes in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra*. New York and London: G.P. Putnam's Sons.

- Withington, W.A. 1961. "Upland Resorts and Tourism in Indonesia: Some Recent Trends". *Geographical Review*, 51 (3), hlm. 418-423.
- Withington, W.A.. 1910. *Tweede Jaarverslag Vereeniging Toeristenverkeer 1909*. Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- Withington, W.A. 1910. *Java the wonderland*. Batavia: Official Tourist Bureau.
- Withington, W.A. 1920. *An Official Guide to Eastern Asia Trans-continental Connections between Europe-Asia:East Indies*. Tokyo: The Departement of Railways.
- Withington, W.A. 1913. *Illustrated tourist guide to Buitenzorg, the Preanger, and Central Java*. Batavia: Official Tourist Bureau.
- Withington, W.A. 1923. *Vijftiende Jaarverslag der Vereeniging Toeristenverkeer 1922*. Weltevreden: G. Kolf & Co.

**FILOSOFI DAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM GAYA BANGUNAN
RUMAH ADAT KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA:
SEBUAH ANALISIS TERHADAP RUMAH ADAT DENGAN
PENDEKATAN STUDI ISLAM**

***PHILOSOPHY AND ISLAMIC VALUES IN TRADITIONAL HOUSE BUILDING
STYLES IN KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA: AN ANALYSIS OF
TRADITIONAL HOUSES WITH AN ISLAMIC STUDY APPROACH***

Andri Nurjaman^a, Dadan Rusmana^b, Doli Witro^c

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

Email: ^a andrienurjaman99@gmail.com, ^b dadan.rusmana@uinsgd.ac.id,
^c doliwitro01@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.258

Naskah Diterima: 28 April 2021 Naskah Direvisi: 14 September 2021

Naskah Disetujui: 16 September 2021

Abstrak

Rumah adat merupakan peninggalan kebudayaan masyarakat tradisional yang harus dijaga keberadaannya sebagai cagar budaya oleh masyarakat yang hidup saat ini. Di Indonesia, terdapat banyak terdapat rumah adat hingga saat ini. Salah satunya adalah rumah adat yang berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang dikenal Kampung Naga. Gaya arsitektur rumah adat di Kampung Naga tersebut adalah berupa rumah panggung seperti layaknya rumah tradisional masyarakat Sunda. Karena itu, gayanya yang unik, di rumah adat di Kampung Naga ini juga memiliki filosofi dan nilai-nilai Islam di dalamnya. Tulisan ini bertujuan mengungkap filosofi dan nilai-nilai Islam dalam gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan filosofi bangunan rumah adat Kampung Naga dengan bahan alami mencerminkan hubungan baik antara masyarakat adat Kampung Naga dengan alam. Tidak hanya itu, bangunan panggung yang mencerminkan kesederhanaan menunjukkan kehidupan masyarakat Kampung Naga. Nilai-nilai Islam dalam bangunan rumah adat Kampung Naga dilihat dari struktur bangunan dan bentuk (model) rumah

yang mengandung nilai-nilai hubungan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan. Dalam Islam disebut dengan istilah *habluminallah*, *habluminanas* dan *habluminalalam*.

Kata Kunci: Rumah Adat, Kampung Naga, Filosofi, Nilai-Nilai Islam

Abstract

*Traditional houses are cultural relics of conventional communities that must be preserved as cultural heritage by today's people. In Indonesia, many houses exist today. One is a traditional house located in Neglasari Village, Salawu District, Tasikmalaya Regency, West Java Province, known as Kampung Naga. The architectural style of the traditional house in Kampung Naga is a house on stilts like a traditional Sundanese society. Because of its unique style, this traditional house in Kampung Naga also has Islamic philosophy and values. This paper aims to reveal Islamic philosophy and values in building traditional houses in Kampung Naga, Tasikmalaya. Data was collected through field observations, interviews, and literature studies. The used data analysis technique is data condensation, data presentation, and drawing conclusion (verification). The results show that the philosophy of building traditional houses of Kampung Naga with natural materials reflects the excellent relationship between the indigenous people of Kampung Naga and nature. Not only that, the stilted building that reflects the simplicity shows the life of the people of Kampung Naga. Islamic values in the traditional house-building of Kampung Naga are seen from the structure of the building and the shape (model) of the house, which contains the importance of a harmonious relationship between humans, nature, and God. In Islam, it is called *habluminallah*, *habluminanas*, and *habluminalalam*.*

Keywords: Traditional House, Kampung Naga, Philosophy, Islamic Values

PENDAHULUAN

Jawa Barat disebut juga dengan istilah Tatar Sunda memiliki kekayaan dan warisan budaya. Setiap warisan budaya selanjutnya harus melahirkan proses pelestarian. Warisan budaya tersebut merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Sunda (Widayati, 2003: 3). Pusat budaya Sunda terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki komunitas adat, dimulai dari daerah Ciamis sampai Sukabumi. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas, termasuk masyarakat adat di Kampung Naga Tasikmalaya (Bambang Prawiro, 2015; Prawiro, 2015: 120).

Kampung Naga berada pada jalur transportasi Kota Tasikmalaya dengan Kota Garut (Ningrum, 2012: 4). Tepatnya secara administratif lokasi Kampung Naga berada

dalam wilayah RT 01, RW 01, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Luas keseluruhan wilayah Kampung Naga sekitar 10 Ha (Harun, 2011: 89). Menurut pengukuran *Global Positioning System* (GPS), posisi kampung adat Naga tersebut berada pada 7°23'30" S dan 107°59'30" E (Wihardi, et al. 2010). Kampung Naga berada pada ketinggian ± 1.200 mdpl, terletak di pinggir sebuah Sungai Ciwulan yang airnya bersumber dari Gunung Cikuray (Maria, 1995: 11).

Di sebelah timur Kampung Naga dibatasi oleh kolam, kamar mandi, WC, kandang ternak dan Sungai Ciwulan. Di seberangnya terdapat perbukitan yang disebut dengan Bukit Naga (Suryani, 2010: 3). Di sebelah selatan Kampung Naga dibatasi oleh lahan persawahan dan jalan masuk menuju Kampung Naga. Di sebelah barat ada perbukitan yang terdapat *makam keramat* dan di sebelah utara dibatasi oleh lahan persawahan yang berada di pinggir Sungai Ciwulan.

Nama Kampung Naga tersebut bukan dikarenakan terdapat hewan mitologi bernama naga, namun dalam penuturan Ijad (2018) menyampaikan bahwa Kampung Naga diberi nama "Naga" karena posisi Kampung Naga berada dalam tebing atau berada dalam posisi tanah yang miring. Istilah Sunda yaitu berada *nagagawir*, dari sini muncul istilah Kampung Naga. Dalam sebuah kepercayaan yang berkembang, daerah yang memiliki struktur tanah yang miring adalah tempat yang bagus untuk dijadikan lahan pertanian dan permukiman, karena daerah yang memiliki struktur tanah yang miring dan menghadap ke arah timur akan memperoleh sinar matahari, sehingga masyarakat di dalamnya akan menjadi lebih sehat karena tersinari sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet (Suganda, 2005: 9).

Masyarakat Kampung Naga adalah masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadat secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat Kampung Naga tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat tradisional. Masyarakat Kampung Naga sangat memegang erat falsafah hidupnya dengan tetap menggunakan peralatan sehari-hari dari alam termasuk peralatan atau perkakas pertanian, tidak menerima aliran listrik dari pemerintah, dan hal-hal modern lainnya yang akan merusak ekosistem kebudayaan masyarakat adat Kampung Naga. Adapun jumlah keluarga di masyarakat Kampung Naga dipertahankan tidak lebih dari 99 kepala

keluarga dan jumlah semua bangunan tetap berjumlah 102 buah. Luas Kampung Naga tersebut sekitar 1,5 Ha (Hamid, 2018: 25–26).

Selain dari adat-istiadat yang terus dipertahankan oleh masyarakat Kampung Naga, masyarakat Naga juga disatukan oleh kesamaan leluhur dan ikatan tempat tinggal sebagai ruang hidup bersama. Adat-istiadat dalam masyarakat Kampung Naga menjadi sebuah falsafah hidup yang mencakup wasiat, amanat, larangan dan akibat (Ningrum 2012:6). Masyarakat Kampung Naga memiliki adat-istiadat atau ritual budaya setiap minggu yang disebut *mingguan*, setiap bulan yang disebut *bulanan* bahkan setiap tahun yang disebut *tahunan*.

Contohnya adat dalam upacara *menyepi* yaitu berhenti membicarakan mengenai adat-istiadat serta asal-usul Kampung Naga baik antara sesama masyarakat ataupun dengan pengunjung (Saringendyanti, 2008: 14–15). Kemudian, upacara *hajat sasih* merupakan salah satu tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Kampung Naga. Upacara ini sudah menjadi acara rutin yang dilakukan sebanyak enam kali dalam satu tahun. Biasanya dilakukan pada bulan atau hari besar Islam yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan berziarah ke makam leluhur (Perdana dan Finanda, 2014: 113).

Ada juga tradisi dalam hal pertanian, yaitu dalam upacara panen. Jika sebuah keluarga akan memanen hasil sawahnya maka keluarga tersebut akan melakukan upacara panen guna menetapkan kapan hari pemanenan akan dilaksanakan. Upacara tersebut dilaksanakan di rumah dipimpin oleh *kuncen* dibantu oleh *lebe* dan tertua kampung. Ditentukan melalui rangkaian perhitungan yang biasa disebut dengan istilah *palintangan*. Setelah mendapatkan hari yang baik maka acara panen di sawah akan dilaksanakan dan kemudian ditutup dengan upacara syukuran (Saringendyanti, 2008: 15). Selain upacara adat istiadat di atas, tradisi dalam hal pernikahan juga dipertahankan di masyarakat Kampung Naga. Tradisi tersebut memiliki perbedaan dengan tradisi pernikahan masyarakat Sunda pada umumnya (Perdana and Finanda, 2014: 113). Adat-istiadat yang tetap dipertahankan di Kampung Naga lainnya seperti bentuk rumah mulai dari bahan sampai pada perabot, memiliki pantangan dan tabu dalam kesenian

dari luar. Masyarakat Kampung Naga tidak mengenal alat musik kecuali angklung, karinding dan celempung (Gadriani, Winarti, and Santosa, 2017: 16–17).

Pada masyarakat Kampung Naga juga diberlakukan sebuah larangan yang sifatnya tidak tertulis, hal tersebut disebut dengan istilah *pamali*. Masyarakat Kampung Naga segan dan takut untuk melanggar hal-hal yang bersifat *pamali* tersebut. Hal ini merupakan suatu aturan adat yang harus dipatuhi oleh semua elemen masyarakat di Kampung Naga (Sudjatnika, 2018: 70). Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya tamu yang berkunjung ke Kampung Naga, pola pikir masyarakat Kampung Naga mulai berubah mengenai modernisme. Modernisme tersebut bukanlah hal yang terlarang bagi masyarakat Kampung Naga selagi modernisme tersebut tidak melanggar adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat Kampung Naga.

Salah satu buktinya adalah ditemukan masyarakat Kampung Naga sudah menggunakan alat komunikasi berupa HP dan mayoritas masyarakat Kampung Naga sudah menggunakan pengobatan modern ke puskesmas, dokter dan bidan (Wahyu, Sari, and Zid, 2019: 80). Para sesepuh Kampung Naga pun menyadari hal tersebut, mereka khawatir terhadap masa depan Kampung Naga, maka dari kasus seperti ini muncullah slogan “berwawasan global namun melangkah lokal”. Maksudnya supaya masyarakat Kampung Naga di tengah proses modernisasi tetap memegang teguh nilai-nilai adat-istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur atau *karuhun* mereka (Wahyu, et al. 2019: 80).

Penelitian tentang Kampung Naga, sejauh ini sudah dilakukan Rusnandar (2015), *Tatacara dan Ritual Mendirikan Rumah di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya*. Rusnandar menjelaskan proses mendirikan rumah di Kampung Naga yang tidak lepas dari ritual-ritual keagamaan dan budaya setempat. Hal ini berkaitan dengan hubungan mereka terhadap alam dan Tuhan, antara mikrokosmos dan makrokosmos. Berbeda dengan artikel ilmiah ini akan berfokus pada filosofi dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga. Riany et al. (2014), *Kajian Aspek Kosmologi-Symbolisme pada Arsitektur Rumah Tinggal Vernakular di Kampung Naga*. Riany et al. mendeskripsikan mengenai aspek kosmologi-simbolis pada arsitektur rumah di Kampung Naga, penerapan kosmologi tersebut terlihat pada

simbolisme terhadap rumah Kampung Naga yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian kepala, badan dan kaki. Perbedaan dengan artikel ini mengungkapkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga yang ternyata tidak hanya memiliki filosofi namun juga mengandung nilai-nilai Islam.

Hermawan (2014), *Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda*. Hermawan mendeskripsikan bangunan rumah di Kampung Naga yang terbuat dari alam dan secara umum sama dengan bangunan-bangunan rumah adat Sunda sebagai suatu kearifan lokal yang harus dijaga. Kearifan lokal ini merupakan warisan *karuhun* masyarakat Sunda pada umumnya dan *leluhur* masyarakat Naga pada khususnya. Berbeda dengan artikel ilmiah ini penulis memfokuskan pada gaya bangunan rumah adat Kampung Naga yang memiliki filosofi dan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Sudarwani, (2016), *Pola Tata Ruang Kawasan Permukiman Kampung Naga Tasikmalaya*, mendeskripsikan mengenai pola tata ruang permukiman berdasarkan kondisi dan aktifitas sosial, budaya, ekonomi serta pengaruh aspek fisik terhadap pola tata ruang dengan berbagai teori semacam teori ruang, tempat dan lain-lain. Berbeda dengan fokus dalam artikel ilmiah ini adalah bukan pada pola tata ruang, namun pada gaya bangunan rumah Kampung Naga yang memiliki filosofi dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, artikel ini membahas mengenai filosofi dan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam gaya bangunan rumah adat masyarakat di Kampung Naga. Rumah adat di Kampung Naga mengandung filosofi atau istilah orang Sunda disebut dengan *siloka*. Tidak hanya makna yang bersifat filosofis yang terkandung dalam gaya bangunan rumah masyarakat di Kampung Naga, namun juga menggali nilai-nilai *religiusitas* dalam gaya bangunan rumah adat Kampung Naga, mulai dari sejarah *karuhun* masyarakat Kampung Naga, posisi rumah sampai bagian, dan bahan utama rumah Kampung Naga mengandung nilai-nilai Islam yang perlu dianalisis. Tujuan ini adalah untuk mengungkap makna secara filosofis dan menguak nilai-nilai Islam dalam gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui pengamatan atau observasi. Sedangkan penelitian deskriptif mempunyai prosedur kerja yaitu mengidentifikasi adanya permasalahan, membatasi dan merumuskan permasalahan, menentukan tujuan dan manfaatnya. Artikel ini memfokuskan pada gaya bangunan rumah adat Kampung Naga, melakukan studi kepustakaan, dan mengumpulkan data primer serta data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi di Kampung Naga dan wawancara dengan masyarakat Kampung Naga.

Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara merupakan data primer yang disajikan dalam artikel ilmiah ini. Wawancara dilakukan dengan masyarakat Kampung Naga yang sekaligus menjadi informan dalam penelitian ini. Selain data-data lapangan, penelitian ini didukung juga oleh bahan-bahan pustaka yaitu penelitian-penelitian terdahulu tentang Kampung Naga yang menjadi bahan pendukung atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi Islam yaitu deskripsi, interpretasi filosofis, dan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam gaya bangunan di Kampung Naga. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) (Miles, Huberman, and Saldaña, 2014).

PEMBAHASAN

Sejarah Kampung Naga

Ada beberapa versi mengenai sejarah terbentuknya masyarakat Kampung Naga. Versi pertama mengatakan bahwa penduduk Kampung Naga berasal dari Mataram. Pada tahun 1630 ketika Sultan Agung menyerang Batavia, sekelompok pasukan Mataram dibawah pimpinan Singaparna mengalami kekalahan Pasukan tersebut tidak kembali ke Mataram dan tidak pula menyerahkan diri kepada VOC, melainkan bersembunyi di sebuah hutan perbukitan di dekat Sungai Ciwulan untuk menutupi identitas. Mereka mengubah nama dan dialeknya dengan Sunda, sejak saat itu pula

penduduk tidak diperbolehkan menyebut nama Singaparna dan menyebut kampung mereka dengan Kampung Naga (Qodariah and Armiyati, 2015 :13).

Versi kedua mengatakan bahwa Eyang Singaparna yang merupakan leluhur atau *karuhun* masyarakat Kampung Naga berasal dari timur, dipercaya dari Mataram, ia bertugas sebagai utusan raja untuk menyebarkan Islam ke Tanah Pasundan, dalam perjalanannya ia sampai di daerah cekungan dan ditempat itu ia mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat tinggalnya (Qodariah and Armiyati, 2015: 13). Ada juga informasi bahwa yang pertama dibangunnya adalah tempat untuk sembahyang.

Selanjutnya versi ketiga mengatakan bahwa penduduk Kampung Naga berasal dari lereng gunung Galunggung yang merupakan orang Sunda asli berasal dari keturunan Singaparna. Bisa ditegaskan disini bahwa masyarakat Kampung Naga berasal dari keturunan Eyang Singaparna yang merupakan pewaris terakhir tahta Kerajaan Galunggung (Purwitasari, 2006: 176–77). Eyang Singaparna tersebut merupakan nama dari seorang ulama sakti yang merupakan putra dari Prabu Rajadipuntang yang merupakan raja terakhir Galunggung. Prabu Raja Diputang diserang oleh Prabu Surawisesa dari kerajaan Sunda, karena tidak lagi memeluk agama Hindu dan beralih kepada agama Islam. Peristiwa itu terjadi pada sekitar abad ke 16 M. Menghadapi serangan tersebut, Prabu Rajadipuntang menyelamatkan harta pusakanya dan menyerahkannya kepada Singaparna, serta memintanya untuk menyelamatkan diri (Qodariah and Armiyati, 2015: 13).

Versi selanjutnya mengenai sejarah Kampung Naga berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada November tahun 2018. Informasi yang disampaikan oleh Ijad (2018) menjelaskan bahwa disebut Kampung Naga bukan berarti ada Ular Naga ataupun Buah Naga. Kampung Naga ini disebut dengan hal demikian diperkirakan karena posisi Kampung Naga berada di lembah atau dalam bahasa Sundanya, *nagagawir*, maka disebut Kampung Naga. Sebelum tiba tepat di Kampung Naga maka yang berkunjung akan melewati terlebih dahulu 439 anak tangga dan jarak yang ditempuh dari lokasi parkir ke Kampung Naga sekitar 500 meter.

Ijad (2018) juga menuturkan bahwa di dalam Kampung Naga tersebut segala sesuatu mengandung filosofi dan makna tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan

oleh masyarakat adat Kampung Naga maupun oleh pengunjung jika bertamu ke Kampung Naga. Istilahnya ada segudang larangan di Kampung Naga, seperti halnya ada hutan larangan. Hutan larangan tersebut tanpa terkecuali baik masyarakat setempat ataupun pengunjung tidak boleh dimasuki dan membawa apapun di hutan larangan. Hal ini bukan berarti terdapat sosok makhluk buas ataupun makhluk halus tetapi semata-mata untuk melestarikan alam dan hutan supaya tidak gundul. Ada juga hutan keramat yang didalamnya ada makam leluhur dan nenek moyang Kampung Naga. Ada juga bekas *pangshalatan* yang dikeramatkan oleh masyarakat Kampung Naga.

Mengenai terbentuknya Kampung Naga tidak bisa dilacak karena pada tahun 1956 Kampung Naga pernah dibakar oleh kelompok DI/TII karena tidak mau bergabung dengan kelompok mereka. Masyarakat Kampung Naga memilih ikut ke Republik Indonesia, maka oleh kelompok DI/TII siapa yang tidak ikut kepada mereka pasti dibakar, termasuk Kampung Naga dibakar oleh kelompok DI/TII tersebut sehingga data-data ataupun dokumen-dokumen penting ikut terbakar. Maka sejarah mengenai Kampung Naga tidak bisa dilacak. Namun dengan adanya bekas atau petilasan tempat shalat, dikatakan Ijad (2018) bahwa dulu nenek moyang Kampung Naga sebelum mendirikan perkampungan mendirikan dulu tempat shalat dari bebatuan, karena Islam masuk ke daerah Kampung Naga perintah pertamanya adalah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama dibangun adalah hubungan makhluk dengan Pencipta yaitu Allah S.W.T. atau disebut dengan istilah *Habluminallah*.

Di Kampung Naga juga terdapat bekas lumbung padi umum, disebut bekas lumbung padi umum dikarenakan masyarakat Kampung Naga memiliki mata pencaharian bertani padi dengan padi lokal juga menggunakan sistem panen dalam 1 tahun 2 kali panen. Dengan sistem irigasi untuk sawah bukan huma, menggunakan pupuk semi organik yaitu mencampurkan pupuk kimia dengan organik seperti kotoran ayam yang telah dicampur dengan *lebu* (abu kayu bakar). Masyarakat Kampung Naga setelah melaksanakan panen padi dengan sukarela menyimpan padi ke lumbung padi umum untuk keperluan umum. Misalnya jika ada yang meninggal bisa mengambil dari lumbung padi umum tersebut.

Ijad (2018) mengungkap masyarakat Kampung Naga dari segi pola hidup tidak hanya sekedar hidup di alam namun hidup bersama alam, masyarakat Kampung Naga memiliki kesadaran untuk memuliakan alam layaknya manusia. Dalam istilah Islam disebut dengan *hablumminalalam*. Perlakuan hidup masyarakat Kampung Naga bersama alam ini seimbang-selaras, jadi belum pernah terjadi longsor dan banjir di Kampung Naga. Padahal letak geografis Kampung Naga berada di lembah dan di pinggiriran Sungai Ciwulan besar yang mengalir dari Garut sampai ke Pangandaran. Hal ini dikarenakan masyarakat Kampung Naga menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dan alam sekitar.

Luas permukiman Kampung Naga kurang lebih 1,5 hektar. Luas ini dari zaman nenek moyang masyarakat Naga sampai sekarang luasnya tidak boleh bertambah walaupun satu jengkal. Jadi sebagian masyarakat Kampung Naga harus tinggal di luar Kampung Naga yang disebut dengan istilah *sanaga*. Dilihat dari segi rumah orang *sanaga* yang tinggal diluar lebih bersifat terbuka, dibuktikan dengan sudah permanennya bangunan rumah dan sudah memakai pencahayaan dari listrik. Sedangkan masyarakat Kampung Naga tidak boleh merubah bentuk dan warna bangunan, pencahayaan pun harus memakai cempor (lampu tempel) dari bahan bakar minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah bagi masyarakat Kampung Naga. Bahan bangunan pun dari alam semua.

Ijad (2018) menyatakan ukuran rumah pada masyarakat Kampung Naga tergantung lokasi dan konstruksi tanah, jika kondisi tanahnya datar maka rumahnya akan besar, jumlah bangunan di Kampung Naga ada 112 rumah (rumah warga 109 ditambah 1 masjid dan 1 bale kampung). Pada masyarakat kampung adat Naga yang hidup berdasarkan budaya tidak pernah terjadi peristiwa kemalingan, sehingga kehidupan masyarakat Kampung Naga terasa tenang dan aman. Kawasan hutan, kawasan permukiman dan kawasan luar kampung merupakan tiga kawasan utama yang ada di perkampungan Naga.

Adapun kawasan hutan terbagi dua yaitu hutan keramat dan hutan lindung. Secara adat kawasan hutan tersebut dijaga yang bertujuan untuk terhindar dari kerusakan alam oleh tangan-tangan jahat manusia. Kawasan pemukiman terdiri dari

bangunan rumah masyarakat dan fasilitas lainnya seperti masjid, bale pertemuan, lumbung dan rumah benda keramat, kawasan pemukiman ini dibatasi oleh *pager jaga*, dan kawasan di luar pemukiman terdiri dari MCK, *saung lesung*, *kandang* hewan, kolam dan sawah.

Bangunan Rumah Kampung Naga

Rumah panggung khas masyarakat Sunda adalah bangunan yang diperbolehkan dibangun di kawasan Kampung Naga, dengan bahan atau material dari alam yaitu kayu, bambu dan ijuk. Adapun bagian kaki rumah ditopang dengan batu alam (Wiradimadja 2019: 5). Selain bangunan rumah masyarakat Kampung Naga, ada juga bangunan-bangunan lain seperti *Bumi Ageung*. *Bumi Ageung* ini adalah sebuah rumah biasa layaknya bangunan rumah masyarakat. Namun dijadikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka warisan *karuhun* atau leluhur masyarakat Kampung Naga.

Bumi Ageung ini adalah bangunan rumah yang disakralkan oleh masyarakat Kampung Naga, jadi tidak semua orang dibolehkan memasukinya, mereka bisa memasuki *Bumi Ageung* ini setelah mendapatkan izin dari *kuncen*. Selain *Bumi Ageung* tersebut ada juga bangunan lain yang digunakan untuk kegiatan umum yaitu diantaranya adalah *Bale Patemon* atau balai pertemuan digunakan untuk tempat berkumpul masyarakat Naga dan menerima tamu. Bangunan lainnya adalah masjid, masyarakat Kampung Naga adalah masyarakat Muslim jadi tidak aneh ada sebuah masjid di tengah permukiman masyarakat Kampung Naga. Masjid Kampung Naga ini berfungsi sebagai tempat beribadah layaknya masjid pada umumnya (Hermawan, 2014: 147).

Dilihat dari segi bentuk bangunan masjid, masjid di Kampung Naga berbeda dengan bangunan masjid-masjid pada umumnya yang memiliki kubah dan menara. Bangunan masjid Kampung Naga hampir sama dengan bangunan rumah masyarakat Naga. Berbentuk segi empat dan dilihat dari denah masjid Kampung Naga terbagi dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang. Masjidnya berdiri diatas *tatapakan* lantainya dari kayu, dindingnya dari *bilik*, jendela dan pintunya dari kayu, serta langit-langit juga dari *bilik*. Atapnya dari *injuk* dan *hateup*. Bentuk atapnya berbentuk *julang*

ngapak. Fasilitas masjid Kampung Naga adalah memiliki *bedug* dan *kentungan* juga terdapat tempat untuk berwudhu yang airnya mengalir terus menerus.

Bangunan lainnya adalah *leuit* atau lumbung padi untuk tempat menyimpan padi milik adat. Padi yang dikumpulkan di *leuit* adalah padi yang dipungut secara sukarela dari masyarakat untuk keperluan umum dan kas kampung. Bangunan lainnya adalah *depok*. *Depok* ini adalah sebuah peninggalan leluhur Kampung Naga berupa rumah, masjid dan *leuit*. Bangunan ini dikeramatkan oleh masyarakat, berada di dalam kawasan Kampung Naga dan di belakang rumah *kuncen*. Bangunan lainnya berada di luar Kampung Naga adalah *saung lisung* untuk menumbuk padi yang rata-rata dilakukan oleh kaum ibu-ibu (Hermawan, 2014: 148).

Itulah bangunan-bangunan selain rumah yang berada di dalam dan di luar Kampung Naga. Adapun rumah bagi masyarakat adat di Kampung Naga tidak hanya sekedar tempat untuk berteduh dari panas dan hujan, namun memiliki makna dan dasar filosofis. Konsep kosmologi yang mereka pegang yaitu percaya adanya hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos yang harus tetap dijaga keharmonisannya. Rumah di Kampung Naga adalah bangunan panggung dengan saling berhadapan serta memanjang. Hal ini merupakan petunjuk dari leluhur Kampung Naga tersebut.

Rumah di Kampung Naga dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah pintu, ada rumah yang berpintu satu atau disebut dengan *bumi panto hiji* dan ada rumah yang memiliki pintu dua atau disebut dengan *bumi panto dua*. Rumah yang hanya memiliki satu pintu adalah rumah yang paling tua dan terdiri dari dapur, *goah* dan kamar tidur. *Bumi Ageung* di Kampung Naga termasuk pada rumah yang hanya memiliki satu pintu dan dianggap sebagai rumah keramat oleh masyarakat Kampung Naga. Adapun rumah yang sudah memiliki dua pintu adalah rumah yang telah mengalami perubahan menyeluruh terutama ukuran bangunan lebih luas. Rumahnya juga sudah memiliki jendela. Lantai tengah rumah sudah menggunakan papan, kecuali dapur yang masih menggunakan *palupuh*, jumlah kamar lebih banyak dan *bilik* di bagian depan rumah sudah diganti dengan papan (Hermawan, 2014: 144–45).

Rumah Kampung Naga adalah rumah panggung dengan bahan bangunan dari alam sekitar, hal ini adalah semata-mata arahan dari para leluhur masyarakat Kampung Naga tersebut. Tiangnya menggunakan kayu, dindingnya menggunakan *bilik* (anyaman dari bambu) dicat dengan kapur, memiliki pintu depan dari kayu, jendela kaca tanpa daun jendela, di bagian depan memiliki tangga pendek dari kayu yang disebut dengan *golodog*. Rumah Kampung Naga dibagi menjadi tiga bagian yaitu, *kolong* (bagian bawah), *palupuh* (lantai), dan *lalangit* atau *para*. *Kolong* merupakan ruang antara permukaan tanah dengan *palupuh* (lantai rumah), tingginya sekitar 60 cm, biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan kayu bakar, peralatan pertanian dan kandang ternak.

Palupuh (lantai) berasal dari papan kayu atau dari belahan bambu, lantai dari kayu atau bambu ini menyebabkan tidak terasa dingin, tidak seperti lantai dari keramik pada masyarakat modern. Adapun *lalangit* atau *para* adalah bagian dalam rumah yang berada diatas lantai dibawah atap, dipasang langit-langit dengan anyaman bambu dan dicat oleh kapur, ini berfungsi untuk pelindung. Adapun pembagian ruang pada bagian dalam rumah Kampung Naga berdasarkan jenis kelamin dan perannya dalam keluarga yaitu; *pertama* ruang bagian depan yaitu *tepas* diperuntukkan bagi ruang laki-laki, digunakan untuk menerima tamu, selain itu berfungsi sebagai tempat bekerja seperti membuat kerajinan.

Kedua ruang belakang yaitu dapur dan *goah* merupakan ruang perempuan digunakan untuk memasak dan *goah* berfungsi untuk menyimpan makanan dan bahan makanan seperti beras atau gabah kering. Dapur ini memiliki fasilitas yaitu *hawu* (tungku) berbahan kayu bakar dan di atasnya terdapat cadangan kayu bakar. *Ketiga* ruang tengah yaitu *tengah imah* untuk ruang bersama bagi semua anggota keluarga dan untuk belajar dan bermain anak-anak juga digunakan untuk tidur tamu. Adapun kamar pada rumah Kampung Naga hanya terdiri dari kasur yang digelar di *palupuh* dan bantal yang digunakan untuk pasangan suami istri pemilik rumah tersebut (Hermawan, 2014: 145–47).

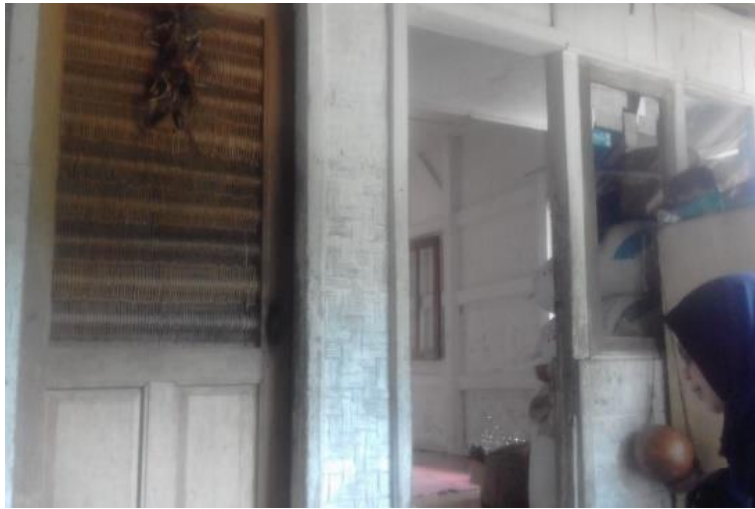
Posisi bangunan rumah di Kampung Naga yang berhadap-hadapan berfungsi untuk mudahnya berkomunikasi antara sesama masyarakat, sehingga bisa saling memperhatikan, contohnya di waktu masak atau tida. Sikap saling ini akan melahirkan suasana kekeluargaan dan hidup rukun diantara masyarakat Kampung Naga, masyarakat

Kampung Naga sudah memiliki kesadaran untuk bersikap yang baik terhadap tetangga. Karena gaya bangunan masyarakat Kampung Naga adalah rumah panggung dan semua bahannya dari alam seperti kayu dan bambu, maka musuh dari rumah seperti hal tersebut adalah rayap.

Oleh karena itu, untuk memusnahkan rayap masyarakat Kampung Naga menggunakan ayam yang *dikencarkan* atau ditiarkan dan rayap-rayap tersebut akan dimakan oleh ayam. Oleh sebab itu rumah-rumah di Kampung Naga tetap kokoh walaupun sudah berusia puluhan tahun. Bagian atap rumah Kampung Naga mempunyai dua lapis dari *injuk* dan daun *tepus*, kekuatan atap tersebut bisa mencapai 15 sampai 40 tahun tidak rusak dan tahan bocor, dan akan terasa adem di siang hari serta hangat di malam hari.

Ijad (2018) menyatakan dalam satu bangunan rumah adat di Kampung Naga yang memiliki 2 pintu, pintu pertama masuk ke dalam ruangan tengah rumah dan pintu yang kedua masuk ke ruangan dapur. Dua pintu tersebut pun berbeda, jika pintu yang masuk ke ruangan tengah rumah itu biasa seperti halnya pintu-pintu rumah lain. Namun pintu untuk masuk ke dapur yang beda dengan yang lain. Di bagian tengah pintu dapur itu dianyam dari bambu yang disebut anyam *sasag*. Fungsinya sebagai ventilasi udara, namun ada kelebihan di dalam pintu dapur dari anyaman ini yaitu jika siang dari luar ke dalam tidak jelas terlihat sedangkan dari dalam ke luar jelas kelihatan.

Sedangkan pada malam hari sebaliknya dari luar melihat ke dalam kelihatan karena di dalam ada sinar dari lampu tempel, sedangkan dari dalam ke luar tidak kelihatan karena di luar tidak ada lampu. Hal ini berfungsi untuk ronda dalam hal menjaga api, dikhawatirkan lampunya jatuh dan membakar rumah, tidak hanya itu jika meronda ke dalam rumah akan kelihatan bila mana ada yang sakit, namun bukan untuk mengintip.



Gambar 1. Daun pintu di rumah adat Kampung Naga, Pintu dapur dengan anyaman *sasag* dan dilengkapi dengan campuran dedaunan tertentu yang bertujuan untuk tolak bala (Sumber: Dokumentasi penulis).



Gambar 2. Bangunan di Kampung Naga (dari depan-samping).
(Sumber: blog.negerisendiri.com).

Pada pintu dapur ada beberapa daun yang disusun, menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga ini berfungsi untuk tolak bala. Daun-daun yang disusun tersebut di antaranya ada ketupat bersudut lima memiliki arti untuk selalu menjaga shalat lima waktu, ada juga *dupi* bersudut tiga *bersilokanista*, *maja* dan *utama* yaitu *bismillah*, *alhamdulillah*, dan *astagfirullah*, ada juga *jukut palias* (*palias tuduh timuru*) artinya jangan berprasangka buruk dan daun *darandang*. Ijad (2018) menyatakan dalam hal kamar mandi, masyarakat Kampung Naga di dalam rumahnya tidak ada kamar mandi di

dalam, semuanya berada di luar. Hal ini bertujuan untuk tidak bersarang nyamuk sehingga jika tidur di rumah masyarakat Kampung Naga akan tenang karena tidak pernah ada nyamuk. Selokan di depan rumah pun langsung mengalir ke kolam sehingga tidak ada air yang menggenang untuk bersarangnya nyamuk, jika sudah ke kolam maka bantik- bantik nyamuk yang ada akan dimakan oleh ikan.

Filosofi Bangunan Rumah Kampung Naga

Rumah dalam bahasa Sunda disebut dengan istilah *bumi*, manusia hidup di bumi atau di dunia tengah, tidak hidup di dunia atas atau dunia bawah, konsep filosofi ini tergambar dari bangunan rumah adat di Kampung Naga. Pada bagian kepala atau bagian atas rumah adat Kampung Naga yaitu atap yang memiliki puncak hal ini mencerminkan dunia bagian atas. Pada bagian atas ini juga terdapat tanduk berbentuk huruf “V” yang merupakan simbol dari kedamaian, jadi dunia atas dipercaya sebagai dunia alam akherat yang damai (Riany et al. 2014).

Ijad (2018) menyatakan pada bagian tengah rumah atau disebut dengan badan atau dalam istilah kosmologi adalah bagian dunia tengah yang merupakan tempat hidup manusia. Di bagian tengah ini terdapat ruangan dapur, kamar tidur, ruangan tengah merupakan tempat beraktivitas manusia sehari-hari. Di bagian tengah ini manusia hidup dan berkehidupan. Sedangkan bagian kaki atau dunia bawah dalam gaya bangunan rumah adat Kampung Naga berfungsi sebagai tumpuan, maka antara tanah dengan lantai terdapat ruang kosong yang sering digunakan sebagai kandang ayam.

Jadi posisi bangunan rumah adat Kampung Naga memiliki filosofi tersendiri yaitu mengikuti posisi sekujur tubuh manusia, yaitu ada kepala, badan dan kaki. Begitupun juga pada bangunan rumah di Kampung Naga ada bagian kepala yang bisa digunakan sebagai gudang, ada bagian badan yang digunakan untuk ruang tengah, kamar, dapur dan *goah* untuk menyimpan padi, dan bagian kaki untuk kolong biasanya digunakan sebagai kandang ayam.

Ijad (2018) mengatakan bentuk dari bangunan rumah adat di Kampung Naga tersebut memiliki kekhasannya tersendiri juga memiliki filosofi yang mengandung pesan-pesan dan nasehat-nasehat. Fungsi rumah adat di Kampung Naga tidak hanya

untuk berteduh dan beristirahat namun memiliki makna pada rumah itu sendiri. Rumah dalam bahasa Sunda disebut dengan *imah* atau *bumi* artinya “dunia”. Dunia adalah tempat hidup makhluk di antaranya manusia, maka rumah bagi masyarakat Kampung Naga adalah bagian dari konsep kosmologinya.

Lalu pada salah satu bagian rumah adat Kampung Naga yaitu pada bagian dinding juga memiliki makna, karena dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang disebut *bilik*, persatuan dari anyaman bambu tersebut yang jikalau hanya berdiri sendiri tidak kuat, maka dengan bersatu menjadi bentuk yang kokoh menahan beban. Hal ini yang disebutkan dengan cerminan dari sikap gotong royong diantara masyarakat, setidaknya mereka akan tahu diantara salah satu masyarakat yang terkena musibah berupa sakit dan lain-lain.

Kesederhanaan bangunan rumah masyarakat adat Kampung Naga ini mencerminkan sikap sederhana dalam hidup. Di bagian depan rumah Kampung Naga terdapat teras dengan bahan bambu yang disebut *golodog* yang berfungsi untuk tangga dan bersantai sambil membuat anyaman untuk cenderamata. Di dalam rumah Kampung Naga tidak disediakan meja dan kursi, langsung duduk dilantai dengan alas papan atau *palupuh* yang terbuat dari bambu, rumah adat Kampung Naga rata-rata berukuran 6 x 8 meter (Suryani, 2010: 62).



Gambar 3. Bangunan di Kampung Naga (foto lengkap)
(Sumber: www.rayadventure.com).

Inilah pengetahuan mengenai filosofi arsitektur rumah adat Kampung Naga yang selalu dipegang erat oleh semua lapisan masyarakat Kampung Naga sendiri termasuk *pupuhu* atau kepala adat. Pengetahuan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat biasa, bahwa rumah hanya tempat istirahat dan berteduh dari panas dan hujan. Sementara dalam masyarakat adat Kampung Naga rumah atau *imah* atau *bumi* tidak hanya tempat berteduh dan beristirahat, ada cara pandang hidup, filosofi dan makna dalam gaya bangunan rumah adatnya.

Nilai-Nilai Islam dalam Gaya Bangunan Rumah Kampung Naga

Setelah diketahui tentang sejarah Kampung Naga, budaya dan filosofi pada bangunan rumah di Kampung Naga, disini penulis akan mendeskripsikan analisis mengenai nilai-nilai Islam yang terdapat pada bangunan rumah adat di Kampung Naga. Nenek moyang masyarakat Kampung Naga sebelum mendirikan perkampungan mengumpulkan dulu bebatuan untuk tempat shalat atau masyarakat Kampung Naga biasa menyebutnya dengan istilah *patilasan* shalat, karena ketika proses Islamisasi perintah pertamanya adalah mendirikan shalat.

Selanjutnya pola perkampungan Naga posisi rumahnya saling berhadapan, hal ini bertujuan untuk sesama masyarakat bisa saling berkomunikasi dan saling memperhatikan sehingga rasa kekeluargaan di antara masyarakat sangat terasa, di dalam Islam diajarkan bersikap yang baik kepada tetangga. Contohnya jika ada yang sakit wajib dibantu atau setidaknya *dijenguk*. Jika ada tetangga yang belum masak karena tidak ada beras misalnya maka wajib untuk berbagi. Seperti itulah suasana yang ada pada masyarakat Kampung Naga, mereka sudah memiliki kesadaran yang baik dengan tetangga.

Oleh karena itulah masyarakat Kampung Naga bersikap baik antara sesama masyarakat bahkan pengunjung pun akan merasakan sesuatu yang baik, hal tersebut dalam Islam disebut dengan *hablumminnas*. Hubungan yang baik sesama manusia yang hidup di Kampung Naga tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong-royong. Dalam hal bergotong royong antara sesama masyarakat adat di Kampung Naga sangat terlihat dalam kegiatan pertanian, perbaikan rumah, acara ritual seperti halnya acara pernikahan dan khitanan serta pada upacara adat seperti dalam rangka peringatan

Maulid Nabi dan tradisi *nyiram*. Suasana gotong royong dan kekeluargaan juga terasa jika terdapat di salah satu masyarakat adat Kampung Naga ada yang meninggal. Namun gotong royong dalam hal pertanian sangat mendominasi di masyarakat adat Kampung Naga (Rolitia, Achdiani, and Eridiana, 2016: 35).

Masyarakat Kampung Naga memandang Alam merupakan anugerah dari Allah s.w.t. kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi, maka harus dimanfaatkan dengan baik, tidak boleh dieksploitasi atas kerakusan manusia. Bencana seperti banjir dan longsor adalah akibat dari tangan manusia sendiri yang tidak cinta akan alam, seperti penebangan liar sehingga hutan gundul, maka akhirnya akan banjir karena sudah tidak ada lagi pohon untuk penyerapan air.

Di Kampung Naga kesadaran tentang menjaga dan melestarikan lingkungan benar-benar menjadi kesadaran yang mutlak dan mendarah daging pada setiap diri anggota masyarakat adat di Kampung Naga, karena sikap mereka dengan alam sudah terikat dengan tradisi yang sudah ada sejak lama. Sikap menjaga lingkungan dalam Islam disebut dengan istilah *habuminalalam*. Hal ini merupakan bentuk dari kearifan lokal masyarakat adat Kampung Naga yaitu menjaga keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Kearifan lokal ini merupakan bagian dari kebudayaan mereka. Kearifan lokal merupakan segala bentuk yang diciptakan dari hasil budaya yang didukung oleh lingkungan alam sekitar manusia itu sendiri (Wiradimadja, 2019: 4).

Di sisi lain, nilai Islam pada bentuk dan fungsi dari semua bagian rumah adat Kampung Naga dari segi bentuk rumah adat Kampung Naga termasuk rumah tradisional berbentuk panggung, tidak menggunakan dinding dari semen, ini mencerminkan sikap masyarakat Kampung Naga yang sederhana dalam hidup. Rumah itu ibarat dunia yang akan ditinggalkan, maka tidak seharusnya seseorang sibuk akan memikirkan dan memperindah rumah yang akan ditinggalkan saja. Inilah sejatinya hidup, kesadaran dan sikap sederhana dalam hidup seperti ini dalam istilah Islam disebut dengan *qana'ah* yaitu menerima apa adanya, tidak meminta lebih apalagi rakus.

Selanjutnya dari fungsi bagian-bagian rumah adat Kampung Naga yaitu semua bagian rumah adat dan ruangan memiliki fungsi, tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bagian rumah adat Kampung Naga memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Hal ini terinspirasi dari prinsip dalam agama yaitu tidak mubazir. Dalam Islam diajarkan untuk tidak boleh bersikap mubazir karena dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia sikap mubazir ini adalah sikap atau kelakuan setan. Kesadaran tentang pemanfaatan di setiap bagian dan ruangan rumah adat di Kampung Naga sudah

dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga sejak dulu sampai sekarang, maka tidak ada istilahnya yang terbuang, semuanya bermanfaat.

Tidak ada perubahan yang signifikan terkait arsitektur rumah adat di Kampung Naga dari masa ke masa, namun memang mendirikan rumah baru untuk mengganti rumah lama pernah beberapa kali terjadi dan dilakukan secara gotong royong. Namun arsitektur dan gaya bangunannya akan sama seperti bangunan lainnya, karena mempertahankan filosofinya. Proses mendirikan rumah barupun memiliki beberapa ritual secara adat yang harus dilakukan dari mulai mempersiapkan bahan materialnya (*babahan*), mendirikan rumah (*ngadegkeun*) sampai menempati rumahnya itu sendiri (*ngeusian*) (Rusnandar. 2015: 534).

PENUTUP

Filosofi dan nilai-nilai Islam pada gaya bangunan rumah adat di Kampung Naga adalah posisi bangunan rumah Kampung Naga yang memiliki filosofi dengan mengikuti posisi sekujur tubuh manusia, yaitu ada bagian kepala, badan dan kaki. Rumah dalam bahasa Sunda disebut *imah* atau *bumi* artinya “dunia”. Dunia adalah tempat hidup makhluk diantaranya manusia, maka rumah bagi masyarakat Kampung Naga adalah bagian dari konsep kosmologinya. Oleh karena itu, mereka menjalin hubungan yang baik antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dinding rumah juga memiliki makna, dinding tersebut terbuat dari anyaman bambu yang disebut *bilik* memiliki celah diantara anyaman tersebut. Hal ini mencerminkan sikap gotong royong di antara masyarakat. Kesederhanaan bangunan rumah masyarakat Kampung Naga tersebut mencerminkan sikap sederhana mereka dalam hidup.

Adapun nilai-nilai Islam dalam gaya bangunan rumah adat masyarakat Kampung Naga yaitu memiliki tiga nilai Islam, yaitu; *pertama Habluminallah* yaitu dengan peristiwa yang diyakini oleh masyarakat kampung Naga bahwa nenek moyang atau leluhur masyarakat Kampung Naga yang pertama kali dibangun adalah tempat shalat; *kedua Habluminnas*, dengan posisi rumah adat Kampung Naga yang saling berhadapan maka diantara masyarakat Kampung Naga bisa saling berkomunikasi, bergotong royong dan saling memperhatikan, sikap bertetangga yang baik yang ada pada masyarakat Kampung Naga; *ketiga Habluminalalam*, karena masyarakat Kampung Naga tidak hanya sekedar hidup di alam namun hidup bersama alam, maka hubungan masyarakat dengan alam mereka jaga dengan baik yang telah diikat dengan tradisi- tradisi yang

tidak bertolak belakang dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prawiro, Abdurrahman Misno. 2015. "Religion and the Local Tradition of Life Cycle Rituals in Kampung Naga, West Java." *Al-Albab* 4(1):55–68. doi: 10.24260/alalbab.v4i1.277.
- Gadriani, Ajeng Laita, Murdiah Winarti, and Ayi Budi Santosa. 2017. "Modernisasi di Kampung Naga Tasikmalaya Tahun 1980-1999." *Factum* 6(1):11–27.
- Hamid, Asep Lukman. 2018. "Perilaku Keberagamaan Masyarakat Kampung Naga dalam Perspektif Teori Religious Behavior Marie Cornwall." *Journal for Islamic Studies* 1(1):16–37. doi: 10.5281/zenodo.1161554.
- Harun, Ismet Belgawan dkk. 2011. *Arsitektur Rumah dan Permukiman Tradisional di Jawa Barat (Hasil Pengamatan dan Dokumentasi)*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Hermawan, Iwan. 2014. "Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda." *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 1(2):141–50. doi: 10.15408/sd.v1i2.1256.
- Ijad. 2018. *Ketua Pemuda Kampung Naga/Tour Guide*. Kampung Naga Tasikmalaya: Wawancara, November.
- Maria, Siti. 1995. *Sistem Keyakinan pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Ningrum, Epon. 2012. "Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 28(1):47–54. doi: 10.29313/mimbar.v28i1.338.
- Perdana, Reski Wahyu, and Septi Asri Finanda. 2014. "Buku Etnofotografi Kampung Naga Tasikmalaya." *Createvitas* 3(1):109–24.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. 2015. "Ritual Daur Hidup di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya Jawa Barat." *Kawalu: Journal of Local Culture* 2(2):120–40.
- Purwitasari, Tiwi. 2006. "Pemukiman dan Religi Masyarakat Megalitik: Studi Kasus Masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat." in *Arkeologi dari Lapangan ke Permasalahan*. Jakarta: IAAI.

- Qodariah, Lelly, and Laely Armiyati. 2015. "Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Alternatif Sumber Belajar." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1):10–20. doi: 10.21831/socia.v10i1.5338.
- Riany, Meta, Yovi Rachmadi, Indra Yunus Sambira, Acep Tomi Muharam, and Rizky Muhammad Taufik. 2014. "Kajian Aspek Kosmologi-Symbolisme pada Arsitektur Rumah Tinggal Vernakular di Kampung Naga." *Jurnal Reka Karsa* 2(4):1–12.
- Rolitia, Meta, Yani Achdiani, and Wahyu Eridiana. 2016. "Nilai Gotong Royong untuk Memperkuat Solidaritas dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga." *SOSIETAS* 6(1). doi: 10.17509/sosietas.v6i1.2871.
- Rusnandar, Nandang. 2015. "Tatacara dan Ritual Mendirikan Rumah di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 7(3):525–42. doi: 10.30959/patanjala.v7i3.117.
- Saringendyanti, Etti. 2008. *Kampung Naga, Tasikmalaya dalam Mitologi: Upaya Memaknai Warisan Budaya Sunda*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Sudarwani, Margareta Maria. 2016. *Pola Tata Ruang Kawasan Permukiman Kampung Naga Tasikmalaya*.
- Sudjatnika, Tenny. 2018. "Filosofi Hidup Komunitas Masyarakat Adat Sunda Kampung Naga Ditinjau dari Pranata Keagamaan." *Jurnal Al-Tsaqafa* 15(1):69–76. doi: 10.15575/al-tsaqafa.v15i1.3042.
- Suganda, Her. 2005. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Suryani, Anton Charliyan Elis. 2010. *Menguak Tabir Kampung Naga*. Tasikmalaya: Danan Jaya.
- Wahyu, Fakaruddin, Linda Kumala Sari, and Muhammad Zid. 2019. "Perilaku Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Sanitasi dan Fasilitas Kesehatan." *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)* 3(2):77–82. doi: 10.29405/jgel.v3i2.2973.
- Widayati, Naniek. 2003. *Draf Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia Alinea Kedua*. Bukittinggi: Kongres Kebudayaan Indonesia ke V.
- Wihardi, Didik, Andri Hernandi, Rizki Abdulharis, and Alfita Puspa Handayani. 2010. "Sistem Konversi Hak Atas Tanah Adat Kampung Naga." *Jurnal Sosioteknologi* 9 (20): 883–94.
- Wiradimadja, Agung. 2019. "Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga sebagai Wujud Menjaga Alam dan Konservasi Budaya Sunda." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3(1). doi: 10.17977/um021v3i1p1-8.

**MEMBAYANGKAN BANDUNG DALAM SATU DASAWARSA
PASCA-KONFERENSI ASIA AFRIKA: KONEKTIVITAS GLOBAL,
MODERNITAS, DAN PERUBAHAN SOSIAL (1955-1965)**

***IMAGINING BANDUNG IN A DECADE AFTER THE ASIAN-AFRICAN
CONFERENCE: GLOBAL CONNECTIVITY, MODERNITY, AND SOCIAL
CHANGES (1955-1965)***

Ayu Wulandari

Alumnus S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Email: wulandrayu.99@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.273

Naskah Diterima: 20 Juli 2021 Naskah Direvisi: 28 Agustus 2021

Naskah Disetujui: 06 September 2021

Abstrak

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung memiliki dampak yang sangat luas. Bagi Indonesia, KAA memberikan warisan posisi yang terhormat dalam diplomasi pascakolonial, khususnya di Asia dan Afrika atau “Dunia Ketiga”. Namun demikian, dampak konferensi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia secara umum. Konferensi ini juga mengubah citra Bandung yang merupakan kota penyelenggaraan konferensi. Oleh karena itu, kajian ini membahas kondisi Kota Bandung dan masyarakatnya pasca-KAA. Kajian ini disusun menggunakan metode sejarah yang memanfaatkan arsip, majalah, dan surat kabar sebagai sumber primer. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pasca-KAA, Bandung bertransformasi menjadi “Kota Konferensi Internasional”, diikuti oleh pembangunan dan terbentuknya citra Bandung sebagai kota politik global sehingga kota ini juga menjadi ruang terkoneksi aktor politik global. Ironisnya, prestasi dan modernitas ini justru diikuti oleh perubahan sosial yang menunjukkan sisi lain Kota Bandung. Berbagai masalah sosial dan ekonomi meluas di kota ini mulai dari kemiskinan hingga degradasi moral.

Kata kunci: Konferensi Asia Afrika, Kota Bandung, Kota Konferensi Internasional, Modernitas, Perubahan Sosial.

Abstract

The holding of the Asian-African Conference (AAC) in 1955 in Bandung had a very big impact. For Indonesia, the AAC gave a legacy of an honorable position in post-colonial diplomacy, particularly in the Asia and Africa region or known as the “Third World”. However, the impact of this conference was not only felt by Indonesia in general. But

this conference also changed the image of Bandung, which is the city where the conference is held. Therefore, this study discusses the condition of Bandung City and its people after the AAC. This study is compiled using historical methods with archives, magazines, and newspapers as primary resources. The results of this study indicate that after the AAC, Bandung was transformed into an “International Conference City”, followed by the development and the increase of Bandung’s image as global political city so this city also became as connected space for global political actors. Ironically, these achievements and modernity were actually followed by social changes that showed a different side of Bandung City. Many social and economic problems were widespread in this city, ranging from poverty to moral degradation.

Keywords: Asian African Conference, Bandung City, International Conference City, Modernity, Social Changes.

PENDAHULUAN

“Dengan gilang-gemilang Bandung keluar dari udjian jang maha berat. Untuk beberapa waktu mendjadi tuan-rumah dari 29 negara di Asia-Afrika. Sebagai warga-negara kita bangga melihatnja. Penerimaan tamu-tamu jang rapih dan ramah-tamah, penjelenggaraan konperensi jang memuaskan, pendjagaan keamanan jang tertib dan correct, lalu lintas jang teratur, pendek kata: setiap petugas mendjunjung tinggi kehormatan negara. Itulah Bandung, jang sekaligus mendjadi buah bibir negara-negara di seluruh dunia. Bandung, a lovely city, kata tamu-tamu. Bandung, the capital of Asia and Africa, kata Nehru. Bandung memasuki buku sedjarah dengan megahnja...”

(Anonim, Mei 1955:221)

Kutipan teks di atas merupakan gambaran megahnya Bandung sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955. Jauh sebelum KAA, Bandung sebenarnya telah megah, modern, dan dikenal luas. Kota ini pernah menjadi primadona pada masa kolonial Hindia Belanda. Hal ini mengacu pada banyaknya sanjungan yang ditujukan kepada Bandung. Mumford (2002) sebagaimana dikutip oleh Nurwulandari dan Kurniawan (2020:15) menyebutkan bahwa pada 1928 misalnya, Bandung dijuluki sebagai salah satu kota yang paling nyaman dan menyenangkan untuk rekreasi dan olahraga.

Bandung juga menyita perhatian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Lokasinya yang strategis, nyaman, dan sejuk menarik minat Pemerintah Kolonial untuk memanfaatkan Kota Bandung sebagai ibukota Priangan pada 1864 dan menggantikan

posisi Cianjur (Nurwulandari dan Kurniawan, 2020: 16-17). Bandung juga pernah menjadi pusat pertahanan militer yang ditandai dengan pemindahan pabrik senjata *Artellerie Inrichringen* yang sebelumnya berada di Surabaya (Suganda, 2011: 3).

Selain menarik untuk dijadikan pusat pemerintahan, Bandung juga menawarkan destinasi wisata yang cukup menjanjikan. Pada paruh pertama abad ke-20, Bandung menjadi salah satu kota favorit para wisatawan yang datang ke Hindia Belanda. Kota ini mendapat berbagai julukan seperti *Parijs van Java*, *Geneve van Java*, *Montpeiller of Java*, hingga *Switzerland van Java* (Nurwulandari dan Kurniawan, 2020: 18). Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga sempat memiliki wacana untuk menjadikan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda, namun upaya ini tidak sempat terwujud karena kondisi politik kemudian berubah dengan sangat cepat terutama ketika Jepang mulai melakukan ekspansi militer.

Pesona Kota Bandung tidak berakhir meskipun kekuasaan berganti secara cepat pada 1940an. Ketika Indonesia merdeka, Bandung menjadi salah satu kota yang mengisi narasi sejarah revolusi melalui peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini sempat membuat Bandung porak poranda yang seakan mengantarkan kota ini menjadi kota mati. Namun pada 1955, Bandung kembali menorehkan catatannya dalam lembaran sejarah, dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA). Bandung kembali dikenal oleh masyarakat internasional. Bandung kemudian menjadi kota yang cukup penting dalam diskursus politik internasional, terutama bagi gerakan antikolonialisme dan antiimperialisme. Citra ini masih bertahan setidaknya sampai satu dasawarsa kemudian.

Sebelumnya, telah ada berbagai kajian mengenai sejarah kota Bandung dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi didalamnya. Berbagai kajian yang sudah diterbitkan antara lain memoar Roeslan Abdulgani (2011) yang berjudul *The Bandung Connection: Konperensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955*. Memoar ini merupakan salah satu sumber terbaik yang membahas KAA dari persiapan hingga pelaksanaannya. Dalam beberapa hal, Abdulgani (2011) menyinggung kondisi Bandung seperti mengenai masalah keamanannya. Sayangnya, Abdulgani (2011) tidak menitikberatkan kajian ini pada bagaimana kondisi Bandung pasca penyelenggaraan KAA. Kemudian,

kajian lain yang membahas KAA seperti *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme* karya Wildan Sena Utama (2011) pun tidak menyinggung kondisi Bandung pasca penyelenggaraan KAA. Kemudian mengenai sejarah Kota Bandung, Rusnandar (2010) dalam tulisannya yang berjudul *Sejarah Kota Bandung dari “Bergdessa” (Desa Udik) Menjadi Bandung “Heurin Ku Tangtung” (Metropolitan)* telah mengkaji perkembangan Kota Bandung dari masa ke masa. Sayangnya, periode 1950 hingga 1960an yang menjadi periode penting dalam perkembangan Kota Bandung menuju kota metropolitan justru absen dari pembahasan. Kajian lainnya adalah *Geliat Kota Bandung: Dari Kota Tradisional Menuju Modern* karya Achdian, peny. (2020). Sama seperti kajian sebelumnya, kajian ini mengkaji perkembangan Bandung dari masa ke masa dengan menitikberatkan pada kaitannya dengan keberadaan Bank Indonesia. Sayangnya, kajian ini juga tidak secara detail membahas pengaruh KAA terhadap perkembangan Kota Bandung sepuluh tahun ke depan.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa karya di atas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini narasi akademik yang menggambarkan kondisi Bandung pasca-KAA belum dihadirkan. Kekosongan narasi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana citra dan kondisi Bandung pasca-KAA diselenggarakan? Sebab usai KAA, Bandung menjadi kota langganan bagi berbagai pertemuan yang cukup mempengaruhi iklim politik internasional. Pertanyaan ini semakin kuat dengan hadirnya kajian dari de Freytas-Tamura (September 2009) yang menempatkan Brussels dan Paris sebagai “kota politik global” (*global political city*) berdasarkan pertemuan-pertemuan internasional yang pernah diselenggarakan di kedua kota ini.

Meskipun berbeda dengan Brussels dan Paris yang didalamnya terdapat kantor perwakilan negara lain atau kantor organisasi internasional, Bandung yang tidak memiliki fasilitas tersebut tetap menjadi salah satu kota penyelenggara pertemuan besar, bahkan menjadi “pusat” bagi jaringan politik transnasional yang menentang kolonialisme. Mengenai konsep kota politik global atau *global political city*, konsep ini tidak secara kaku diartikan sebagai kota yang kebijakannya atau pemerintahannya terlibat dalam urusan internasional. Kota politik global juga dapat dimaknai sebagai kota yang

menjadi tempat di mana pertemuan internasional diselenggarakan atau kota yang menjadi tempat bagi pengambilan keputusan oleh para aktor politik internasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini membahas citra, kondisi, hingga perubahan sosial di Bandung dalam satu dasawarsa pasca-KAA (1955-1965) dengan menggunakan pendekatan *global political city*. Kajian ini melihat secara detail bagaimana Bandung bertransformasi menjadi ruang terhubungnya para aktor politik global. Persoalan mengenai apakah modernitas ini dapat diakses oleh masyarakat lokal atau tidak juga menjadi bagian dari kajian ini.

Lebih dari itu, kajian ini mengajukan tesis dimana peristiwa atau momen diplomatik dapat menjadi akar dari perkembangan dan perubahan suatu wilayah, baik perubahan dalam hal citra (*image*), pembangunan fisik, maupun perubahan sosial. Karenanya, kajian ini juga hadir sebagai alternatif dalam mengkaji sejarah kota yang tidak melulu berakar dari kondisi internal kota itu sendiri, melainkan juga memperhatikan faktor-faktor penting seperti peristiwa diplomatik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode ini meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan diakhiri dengan tahap penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Penelitian ini menggunakan sumber-sumber berupa arsip, majalah, surat kabar, serta sumber-sumber pustaka seperti buku dan jurnal ilmiah. Sumber-sumber berupa arsip diperoleh dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Sementara mengenai majalah dan surat kabar, penulis memperolehnya dari Perpustakaan Nasional dan beberapa media yang dapat diakses secara daring. Untuk sumber pustaka, berhasil diperoleh di berbagai perpustakaan mulai dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. Tahap selanjutnya ialah kritik sumber atau verifikasi, yang dilakukan dengan membandingkan isi satu sumber dengan yang lainnya agar dapat menemukan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Sumber-sumber yang telah diseleksi ini kemudian memasuki tahap interpretasi, dan akhirnya disusun menjadi kajian yang kronologis, rinci, dan dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

Memahami kondisi dan perkembangan Kota Bandung dan masyarakatnya pada satu dasawarsa pasca penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan hal yang cukup kompleks. Untuk memahami kondisi ini, maka penting bagi kita untuk kembali mengenang penyelenggaraan KAA 1955 dan suasana Bandung pada saat yang sama. Bagaimanapun, kondisi yang dibentuk pada tahun 1955 menjadi akar dari bagaimana kemudian Bandung berkembang pada tahun-tahun selanjutnya. Pembahasan selanjutnya menekankan pada citra Bandung sebagai kota konferensi internasional hingga membuka sisi lain Kota Bandung yang sangat berlawanan dengan segala kemajuan yang ada.

Tuan Rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955

Tahun 1950an merupakan masa dimana panggung politik internasional diwarnai oleh suasana Perang Dingin, sebuah kontestasi politik sekaligus perebutan pengaruh antara Blok Barat (dipimpin Amerika Serikat) dan Blok Timur (dipimpin Uni Soviet). Dinamika ini menciptakan polarisasi yang menembus batas-batas geografis dan seakan membagi dunia menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Perang Dingin juga berpotensi menciptakan konflik hingga kolonialisme dalam bentuk baru di kawasan Asia dan Afrika.

Kekhawatiran semakin meningkat ketika menyadari bahwa negara-negara Asia dan Afrika tengah memasuki gelombang dekolonisasi. Bagaimanapun, dekolonisasi ini "...membuat para pemimpin berbagai negara pascakolonial di Asia dan Afrika berhadap-hadapan langsung dengan dua protagonis utama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet" (Utama, 2017: 63). Kondisi ini mengantarkan negara-negara Asia dan Afrika pada suatu kesadaran baru untuk membentuk solidaritas Asia-Afrika. Solidaritas ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Solidaritas ini pernah digaungkan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri melalui dua titik, yakni Bierville (Prancis) dan Brussel (Belgia) pada tahun 1926 dan 1929 (Abdulgani, 2011: 19). Solidaritas ini kemudian jelas terlihat melalui KAA 1955 yang penyelenggaraannya diusulkan oleh Ali Sastroamidjojo yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri

Indonesia. Konferensi ini dilaksanakan sejak tanggal 18 sampai 24 April 1955, bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat.

Konferensi ini juga berhasil menarik perhatian dunia internasional. Suryocondro, pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D. C., pernah melampirkan beberapa pers Barat yang memberikan reaksinya terhadap KAA, antara lain *Business Week* hingga *Time Magazine* yang menuduh KAA sebagai ajang pamer kelincahan negara-negara baru hingga menjadi panggung penyebaran komunisme oleh China (ANRI, Januari 1955). Terlepas dari segala perdebatan yang terjadi, KAA telah memberikan tempat terhormat bagi Indonesia di panggung politik internasional. Konferensi ini mendorong Indonesia menjadi “pemimpin” Dunia Ketiga. Presiden Soekarno yang sebelumnya hanya dikenal sebagai Presiden Indonesia pun kemudian lebih dikenal sebagai tokoh Dunia Ketiga. Kemudian, Bandung sebagai kota tuan rumah konferensi juga mendapatkan kehormatan di panggung internasional. Sejak KAA diselenggarakan, Bandung menjadi salah satu kota terpenting dalam diplomasi pascakolonial.

Mohammad Yamin dalam artikelnya yang diterbitkan oleh surat kabar *Merdeka* sempat menyinggung kemahsyuran Kota Bandung dalam KAA, khususnya dikaitkan dengan pembebasan Irian Barat. Mohammad Yamin dengan tegas menuliskan “...dari Bandung bersinar cahaya kemenangan: merdekalah Irian Barat, tanah air kita di pinggir Samudra Pasifik” (ANRI, April 1955). Pernyataan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa bagaimanapun, KAA telah membuat Kota Bandung menjadi salah satu pusat dalam perjuangan politik menghancurkan kolonialisme dan imperialisme. Lebih dari itu, Bandung di kemudian hari menjadi kota yang sangat dikenal di dunia. Karenanya, ada banyak perubahan yang terjadi pada Bandung pasca-KAA.

Sebelum membahas perubahan seperti apa yang terjadi pada Bandung pasca-KAA, perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai kondisi dan peran Kota Bandung beserta masyarakatnya dalam KAA. Roeslan Abdulgani ketika mengenang KAA, menyatakan bahwa Bandung dipilih sebagai kota penyelenggaraan konferensi karena iklim dan akomodasinya yang cukup lengkap (Abdulgani, April-Mei 1965: 17).

Terpilihnya Bandung membuat masyarakat setempat sangat bangga, bahwa kota mereka akan menjadi tuan rumah dalam konferensi bersejarah. Sebuah artikel yang diterbitkan dalam *Bandung Bulletin* sempat membahas kondisi Bandung ketika KAA diselenggarakan. Dalam artikel tersebut, disebut-sebutlah kebanggaan masyarakat Bandung atas terpilihnya kota mereka sebagai tuan rumah konferensi. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa,

“The people of Bandung have taken much pride in preparing their city for the A. A. Conference. Though not offering luxury, they have earned praise for the good taste shown in the amenities they have provided” (Anonim, 24 April 1955: 16).

“Masyarakat Bandung sangat bangga dalam mempersiapkan kota mereka untuk Konferensi A. A. Meskipun tidak menawarkan kemewahan, mereka telah mendapatkan pujian untuk selera yang baik yang ditunjukkan dalam fasilitas yang mereka berikan”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bandung telah didesain sedemikian rupa untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para peserta konferensi.

Sebelum pelaksanaan KAA, Bandung sebenarnya telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk sebuah pertemuan berskala internasional seperti gedung yang megah dan besar, hotel yang representatif, hingga akomodasi pendukung yang dinilai sangat baik (Santoso, Januari 1956: 18). Kemudian menjelang KAA, berbagai perbaikan infrastruktur dilakukan atas perintah Presiden Soekarno (Abdulgani, April-Mei 1965: 17). Perbaikan infrastruktur ini dilatarbelakangi oleh kesan-kesan buruk para delegasi yang hadir dalam Konferensi Bogor seperti aliran air yang tidak lancar, tidak adanya fasilitas yang memadai, dan sebagainya. Bahkan beberapa pers Barat menyebut Indonesia dengan sebutan *“a land of beggars”* atau negerinya para pengemis hanya karena buruknya pelayanan di Konferensi Bogor (Abdulgani, April-Mei 1965: 17). Karenanya, banyak fasilitas umum yang diperbaiki dan didekorasi ulang. Fasilitas yang tampak remeh seperti gantungan untuk jas pun kemudian diadakan di hotel-hotel hingga rumah yang menjadi tempat penginapan para peserta konferensi. Kota Bandung juga menawarkan kelengkapan kuliner lokal selama penyelenggaraan konferensi. Namun bagi para peserta konferensi yang ingin menikmati kuliner dari luar negeri, rupanya tersedia pula di kota ini. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para panitia

konferensi telah mengimpor kuliner tertentu seperti *Madras curry*, *Arab nuts*, hingga kuliner Eropa. Kemudian di dalam restoran-restoran besar di Bandung, sajian kuliner juga dilengkapi dengan berbagai pertunjukan seperti tari tradisional, drama, hingga musik tradisional.

Pengaturan lalu lintas di Bandung pun tidak dapat diabaikan dalam pembahasan ini. Pemerintah Kota Bandung melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mengatur lalu lintas. Pada jalan raya yang dilalui oleh para peserta konferensi, maka Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk menutup jalan tersebut untuk masyarakat dan kendaraan umum. Polisi khusus, para peserta gerakan kepanduan atau Pramuka, hingga para pemuda pemudi dari berbagai sekolah dilibatkan untuk mengatur kelancaran lalu lintas ini (Anonim, 24 April 1955: 16). Mereka melakukan pengecekan secara berkala terhadap setiap kendaraan yang masuk ke sekitar wilayah pelaksanaan konferensi, untuk memastikan bahwa kendaraan yang masuk adalah yang memiliki kepentingan terhadap Konferensi Bandung. Sementara mengenai para pejalan kaki, mereka tetap memiliki haknya untuk berjalan di titik-titik penyelenggaraan konferensi.

Selama KAA diselenggarakan, berbagai pameran turut diselenggarakan. Pameran batik tradisional hingga barang-barang kerajinan hasil seni kriya masyarakat Bandung turut dipamerkan dan dijual. Masyarakat hingga institusi publik pun turut terlibat dalam pameran ini. Sekolah-sekolah Tionghoa di Kota Bandung misalnya, mereka mengadakan pameran mengenai lukisan China (*Chinese Paintings*) (Anonim, 24 April 1955: 17). Pameran ini secara tidak langsung juga menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan untuk mengenalkan kebudayaan lokal dan nasional kepada para peserta konferensi.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk disoroti mengenai kondisi Bandung selama penyelenggaraan KAA adalah keamanan kota, mengingat gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang masih terus bergerak. Beruntungnya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Bandung, dibantu dengan elemen masyarakat berhasil mengendalikan keamanan Kota Bandung dan sekitarnya. Hal ini jelas sekali disebutkan oleh Roeslan Abdulgani (2011:151) bahwa "...tidak ada satu insiden atau

gangguan keamanan yang terjadi selama konperensi A-A berjalan. Hormat kita kepada seluruh aparat keamanan kita!”

Keberhasilan Pemerintah mendesain Kota Bandung sebagai tuan rumah konferensi menjadikan nama Bandung naik daun. Bandung kini menjadi kota simbol dari perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Kebanggaan akan kebesaran kota ini juga dirasakan oleh masyarakatnya. Para negarawan pun menunjukkan kebanggaannya pada Kota Bandung selama penyelenggaraan konferensi. Abdulgani (2011:160) menyatakan bahwa,

“...dan berbahagialah Kota Bandung, yang telah berhasil memobilisir kekuatan rakyat dan masyarakat kita untuk menciptakan suasana yang memungkinkan suksesnya Konperensi A-A”.

Melalui KAA, Bandung telah menjadi kota yang cukup mendunia. Ketenarannya sebagai kota yang mempertemukan berbagai bangsa tidak hanya terjadi sekali saja pada saat KAA, melainkan masih berlanjut hingga satu dasawarsa selanjutnya.

Pembangunan dan Modernitas Bandung pasca-KAA

Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 telah mengembalikan citra Bandung sebagai sebuah kota modern. Konferensi ini juga telah mendorong Bandung menjadi “kota politik global” (*global political city*) yang menjadi tempat bagi berbagai pertemuan politik internasional dalam konteks diplomasi pascakolonial, meskipun di kota ini tidak terdapat kantor perwakilan negara-negara lain. Dengan demikian, posisi Bandung pun semakin meningkat di hadapan masyarakat internasional. Banyak pihak mendatangi kota ini, mulai dari para pemimpin atau perwakilan negara lain maupun wisatawan.

Merespons antusiasme masyarakat internasional pada Kota Bandung, berbagai perbaikan infrastruktur pun dilakukan. Perbaikan infrastruktur ini juga mendapat dukungan penuh dari Jakarta. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan berbagai institusi untuk membantu Kota Bandung agar layak dikunjungi oleh masyarakat internasional, baik untuk konferensi maupun tujuan lain seperti wisata.

Pembangunan yang cukup massif juga didorong oleh julukan-julukan yang diberikan pada kota kembang ini, sehingga Bandung menjadi sangat dikenal di level internasional. Nehru bahkan menyebut Bandung sebagai “*the capital of Asia and Africa*” atau ibukota Asia dan Afrika (Abdulgani, April-Mei 1965: 26). Secara khusus, Kota Bandung “...dihormati dan dijadikan sumber ilham bagi pedjoang-pedjoang Asia Afrika untuk kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran” (Abdulgani, April-Mei 1965: 25).

Bandung yang dibangun menjadi kota modern menuntut perbaikan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Menjelang KAA 1955 dilaksanakan, saluran komunikasi Bandung-Jakarta dipasang. Pasca-KAA, pemasangan dan perbaikan infrastruktur ini cukup sering dilakukan. Pada tahun 1956, Bandung menjadi pusat telekomunikasi Indonesia ke negara-negara luar. Ketika Presiden Soekarno mengadakan perjalanan ke luar negeri yang pertama, maka dibuka saluran telepon radio Bandung dengan Moskow dan Tiongkok (Soewardi dan Djajasoempena, peny., 1965: 134). Kemudian untuk mendukung Bandung sebagai kota yang layak menyelenggarakan konferensi besar, Pemerintah membuka saluran telepon radio secara internasional dengan beberapa negara seperti Hongaria, Vietnam, dan sebagainya.

Selain telekomunikasi, Kota Bandung juga difasilitasi dengan pariwisata. Sebelumnya, penting untuk diketahui bahwa pariwisata menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan konferensi internasional. Selain sebagai sarana relaksasi bagi para peserta konferensi, sektor pariwisata juga dapat menjadi media diplomasi informal antara para peserta konferensi. Karenanya, Pemerintah Daerah Jawa Barat berupaya semaksimal mungkin mengelola sektor pariwisata di Bandung. Pasca-KAA hingga 1957, hanya ada beberapa kota yang memungkinkan untuk didatangi wisatawan asing. Kota-kota ini antara lain Bandung, Medan, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta (Futro, 2012: 24).

Sebagai bentuk keseriusan mengelola pariwisata, maka pada 1957 Pemerintah Daerah Jawa Barat membentuk Dewan Pariwisata Indonesia Daerah (DEPARI Daerah), yang salah satunya mencakup DEPARI Daerah Tingkat II Bandung (Soewardi dan Djajasoempena, peny., 1965: 141). Hotel-hotel yang berada di Bandung juga

ditingkatkan kualitas pelayanannya, sehingga menjadi hotel dan restoran. Hal ini tidak lain untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat internasional yang datang ke Bandung. Kemudian, tempat-tempat wisata mulai dari wisata alam hingga museum pun tidak luput dari perhatian Pemerintah. Apalagi, hampir setiap konferensi dilaksanakan terdapat kegiatan *post-conference tour* (Soewardi dan Djajasoempena, peny., 1965: 146).

Kesiapan Kota Bandung sebagai kota yang berskala internasional juga didukung dari sisi perekonomian. Sebenarnya, perekonomian Bandung sempat melemah akibat massifnya pemberontakan oleh DI/TII. Namun seiring berjalannya waktu, perekonomian Kota Bandung kembali pulih terutama di pusat kota. Pada 1957, terdapat lima puluh toko yang dibangun di berbagai sudut Kota Bandung. Rata-rata, tokoh-toko ini dimiliki oleh pengusaha asing (Achdian, ed., 2020: 147). Terdapat pula beberapa pengusaha lokal, meskipun jumlahnya tidak sebanyak para pengusaha asing.

Secara umum, Bandung tumbuh menjadi salah satu kota industri terbesar di Jawa dengan berbagai jenis industri mulai dari industri tekstil, farmasi, hingga makanan (Anonim, 14 Juni 1963: 247). Pertumbuhan industri ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Industri tekstil misalnya, diperhatikan secara penuh karena Bandung juga menjadi salah satu pemasok ulat sutra untuk industri tekstil di kota-kota lainnya. Dukungan ini dibuktikan dengan pendirian Balai Penelitian Tekstil yang selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi tekstil, juga untuk mendidik masyarakat yang ingin mengembangkan industri ini (Muin, Mei 1965: 23).

Kota Bandung juga diwarnai dengan toko-toko kecil yang menjual kerajinan tangan seperti kalung dari kerang atau hasil kriya lainnya. Selain itu, Bandung juga menjadi pusat produksi kerajinan keramik (gerabah) di Jawa Barat. Produksi berbagai kerajinan ini diharapkan dapat menjadi cinderamata bagi para peserta konferensi ataupun wisatawan yang datang. Tampaknya, ada harapan besar dari masyarakat lokal bahwa citra Bandung yang baik di mata internasional dapat memberi dampak positif bagi perekonomian mereka.

Selain menawarkan kenyamanan dari sisi infrastruktur telekomunikasi hingga perekonomian, Bandung juga terus mengalami peningkatan kualitas dari sisi

pendidikan. Sebelumnya, pada 1957 telah dibangun pusat pelatihan dan peningkatan kualitas guru. Ialah *Science Teaching Centre*, yang infrastrukturnya didukung oleh Inggris di bawah naungan Colombo Plan (*Bamboo Used for Science Teaching*, 26 November 1957:5). Kemudian pada 1962, sebuah pusat penelitian bernama *The Asian Regional Institute for School Building Research* juga didirikan di kota ini (*Research Centre in Bandung*, 22 November 1962:5). Pusat penelitian yang didirikan dengan dukungan *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) dan bekerjasama dengan *United Nations Economic Commission for Asia and Far East* ini ditujukan untuk melayani kebutuhan pengembangan gedung pendidikan di Asia dan Oseania. Terdapat pula pusat penelitian yang sama di Khartoum (Sudan) dan Mexico City (*Many UNESCO Achievement Mark Past Years Work*, 1 Februari 1965:7). Untuk mendukung Bandung sebagai kota wisata, didirikan pula institusi pendidikan yang bergerak di bidang pariwisata seperti Akademi Industri Pariwisata (AKTRIPA) yang didirikan pada 1962 dan Akademi Bahasa Asing (ABA) yang didirikan satu tahun kemudian. Institusi pendidikan ini diharapkan mampu melahirkan orang-orang yang memiliki kemampuan mengelola sektor pariwisata.

Kemudian, institusi pendidikan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki fisik normal, kini ditingkatkan dengan membangun sekolah-sekolah khusus penyandang disabilitas. Khusus di Bandung, hingga 1963 telah dibangun beberapa sekolah untuk penyandang tunarungu, tunanetra, tunawicara, hingga anak-anak yang memiliki kelainan mental (Anonim, 1963: 45). Membahas para penyandang disabilitas, Bandung juga dibangun menjadi kota yang inklusif. Khusus bagi penyandang tunanetra, Pemerintah bahkan menyediakan institusi tersendiri dengan nama “Rumah Buta” yang sebelumnya dikelola oleh swasta. Tidak hanya menyediakan ruang bagi para penyandang disabilitas, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung juga membuka kelas untuk para pengajar sekolah-sekolah disabilitas. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara ketersediaan guru dengan jumlah siswa penyandang disabilitas.

Ketenaran Bandung pasca-KAA kemudian menjadi lahan investasi bagi Pemerintah Indonesia. Adapun investasi yang dimaksud adalah dengan membangun

reaktor atom di beberapa wilayah, termasuk di Bandung. Proyek ini jelas tidak dapat dilepaskan dari kontestasi politik saat itu, dimana Perang Dingin telah mendorong banyak negara untuk mengembangkan atom. Di Bandung, Pemerintah mengembangkan proyek reaktor Triga Mark II, bersamaan dengan pembangunan proyek sejenis di daerah Serpong (Anonim, Juni 1964: 26). Pembangunan reaktor ini juga bertujuan meningkatkan kemajuan di daerah Bandung, berkaca pada kemajuan di kota-kota di Eropa yang memiliki reaktor di dalamnya. Di Eropa maupun Amerika, kota-kota yang memiliki reaktor bertransformasi menjadi kota yang ramai, terkenal, menarik minat masyarakat, serta memiliki peluang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Anonim, Juni 1964: 26). Padahal, Bandung pada tahun 1964 sudah menjadi kota yang sangat ramai dan terkenal (Anonim, Juni 1964: 26).

Berbagai pembangunan yang terjadi dalam satu dasawarsa pasca-KAA telah mendorong Bandung menjadi kota yang kental dengan modernitas. Gedung yang megah, hotel-hotel yang nyaman, aktivitas ekonomi yang beragam, hingga keindahan kota menjadi ciri yang melekat pada Kota Bandung. Modernitas ini kemudian menjadi bekal bagi Bandung untuk menjadi kota yang dinilai layak menyelenggarakan berbagai momen diplomatik di level internasional.

Dari “Kota Lautan Api” Menjadi “Kota Konferensi Internasional”

Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai sebuah peristiwa diplomatik menjadi penanda sebuah “era baru” bagi Kota Bandung. Paling tidak, Bandung sejak 1955 telah dikenal di kancah regional Asia-Afrika, meskipun pada faktanya kemudian dikenal luas di tataran internasional. Bandung secara tidak langsung menjadi kota politik global (*global political city*) yang menghubungkan aktor-aktor politik internasional. “Aktor politik” disini tidak hanya berupa diplomat atau pejabat negara, tetapi juga para mahasiswa, wartawan, atau tokoh-tokoh lainnya yang turut mempengaruhi kondisi politik internasional pada tahun 1950-1960an. Konektivitas global ini sangat terlihat hingga akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini dikarenakan banyaknya konferensi internasional yang diselenggarakan di Bandung pasca pelaksanaan KAA. Secara khusus, KAA juga telah membentuk citra baru bagi Kota Bandung, yakni dari

“kota lautan api” menjadi “kota konferensi internasional” yang didukung dengan segala fasilitas dan infrastruktur yang ada di kota ini.

Lalu, konferensi apa saja yang pernah diselenggarakan di Bandung? Sebagai kota yang mewarisi semangat persatuan dan perjuangan negara-negara Asia dan Afrika, maka Bandung menjadi kota yang cukup penting bagi berbagai “konferensi turunan” dari KAA. Sekitar satu tahun pasca-pelaksanaan KAA misalnya, Bandung kembali menjadi muara bagi semangat persatuan Asia-Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika (KMAA). Hal ini mengacu pada pernyataan yang tertulis dalam *Mimbar Penerangan*, bahwa “baru-baru ini di kota Priangan, jaitu Bandung, ditengah-tengah alam nan indah, serta sedjuk dan njaman hawanja, telah dilangsungkan suatu konferensi dari wakil-wakil mahasiswa di Asia-Afrika” (Anonim, Juli 1956:442). Konferensi ini awalnya diselenggarakan pada 30 Mei sampai 4 Juni 1956, namun kemudian diperpanjang hingga 7 Juni 1956 (*KMAA Diperpanjang Sampai Tgl. 7/6, 4 Juni 1956:1*).

Secara umum, konferensi ini membahas kerja sama hingga peran mahasiswa Asia Afrika, terutama dalam berkontribusi di bidang pendidikan hingga memecahkan masalah-masalah sosial seperti diskriminasi rasial. Dalam konferensi ini, diselenggarakan pula sebuah pawai yang diikuti oleh seluruh delegasi. Pawai ini diselenggarakan di Kota Bandung pula, sehingga masyarakat Bandung dapat turut menyaksikannya (Gambar 1). Secara tidak langsung, pawai ini juga mengingatkan kembali pada “Bandung Walk” yang diselenggarakan saat KAA 1955. Karenanya setelah terkenal di kalangan negarawan, Bandung kemudian terkenal di kalangan mahasiswa.

Tidak lama setelah KMAA usai, Bandung kembali disibukkan dengan konferensi akbar. Tepatnya pada 8-19 Oktober 1956, Bandung menjadi tuan rumah bagi Konferensi FAO (Food and Agriculture Organization) ke-III untuk Asia dan Timur Jauh (Soesmojo, Desember 1956:782). Pada saat itu, Bandung jelas telah sangat siap menerima konferensi besar – sebagaimana dalam menjadi tuan rumah beberapa konferensi sebelumnya. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam *Mimbar Penerangan*, Soesmojo (Desember 1956) menuliskan,

“Kota Bandung ... kini membuktikan kesanggupannya untuk menampung penyelenggaraan konferensi internasional... Kota Bandung memang memiliki segala fasilitas untuk kepentingan comfort tamu-tamu luar negeri dan dalam negeri. Bagi tamu luar negeri, hawa nan sejuk dan nyaman, tidaklah merupakan perbedaan jauh dengan iklim negara aslinya. Bagi tamu dalam negeri, hawa dan segar dan sehat itu, merupakan verfrissing bagi kesehatan rohani dan jasmani. Apa jang tidak ada di kota ini? Semua serba ada. Mau ontjomlo, kelom geulis, tetek bengek aneka warna, ada! Mau pemandangan indah, sebentar pergi ke luar kota, sampailah sudah. Mau belandja, sebentar angkat kaki dari hotel atau tempat penginapan, sampailah sudah di toko-toko besar. Mau nonton, mau ini, mau itu, dan... serba mudah” (hlm. 783).

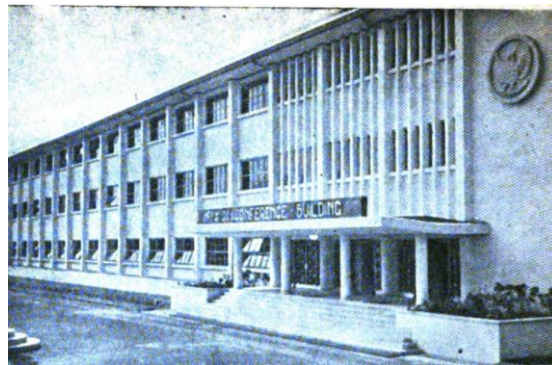


Gambar 1. Kegiatan Pawai Dalam Rangkaian Acara KMAA di Kota Bandung
(Sumber: *Mimbar Penerangan*, Juli 1956, hlm. 446)

Beberapa tempat pun menjadi ramai dengan kehadiran delegasi dari 23 negara. Gedung Merdeka menjadi tempat untuk membuka konferensi pada tanggal 8 Oktober 1956. Sementara itu, kegiatan utama konferensi dilakukan di Gedung Direktorat Adjudan Djenderal, yang oleh Pemerintah direnovasi dan diberi tanda “FAO Conference Building”. Kelayakan gedung ini sebagai pusat pelaksanaan konferensi juga didukung dengan pemandangan Gunung Tangkuban Perahu yang dapat dilihat dari bagian atas gedung.

Kemudian, beberapa hotel seperti Hotel Preanger dan Savoy Homann menjadi tempat penginapan bagi para delegasi serta diramaikan oleh para fotografer. Jalanan Kota Bandung juga menjadi lebih ramai, terutama dipenuhi oleh mobil para panitia dan delegasi konferensi, sehingga lalu lintas umum di sekitar pelaksanaan konferensi dibatasi untuk sementara. Namun, masyarakat Bandung masih dapat menyaksikan

kemeriahan konferensi ini, dengan berjalan kaki atau menunggu di sekitar jalan utama yang dilalui oleh para peserta konferensi. Setiap mobil panitia ditandai dengan papan bertuliskan “FAO Conference”, sementara mobil delegasi ditandai dengan simbol yang mewakili negara masing-masing. Konferensi ini, menurut Soesmojo (Desember 1956: 788) telah “...membikin Bandung lebih terkenal dan populer di dunia internasional. Kota Bandung ditempatkan ditengah-tengah kesibukan konferensi, yang mendapat perhatian ratu dunia dan mata dunia”. Bahkan, Soesmojo (Desember 1956: 782) juga menuliskan, “penduduk Kota Bandung boleh merasa bangga, kalau kotanja untuk sekian kali dipilih mendjadi kota konferensi”.



Gambar 2. Gedung yang digunakan untuk FAO Conference 1956 di Bandung
(Sumber: *Mimbar Penerangan*, Desember 1956, hlm. 786)

Usai menjadi tuan rumah bagi FAO Conference, Bandung kemudian menjadi tempat diskusi mengenai perikanan darat. Ialah IPFC (*International Pacific Fishery Council*) Conference yang diselenggarakan pada 13 sampai 29 Mei 1957 (Soewardi dan Djajasoempena, peny., 1965: 135). Konferensi ini menjadi salah satu momen penting bagi Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan sektor perikanan darat. Pada tahun yang sama, Bandung juga menjadi tempat pelaksanaan *The Twenty-Ninth Conference of the Federation of Indonesian-Eurasian*.

Bandung dimeriahkan kembali sebagai bagian dari konferensi besar pada tahun 1963. Tepatnya pada bulan Maret, Bandung (dan Jakarta) menjadi tuan rumah PATA (*Pacific Area Travel Association*) Conference, sebuah konferensi internasional dalam bidang pariwisata. Dalam konferensi ini, Bandung ambil bagian menjadi tuan rumah

bagi kegiatan *PATA Promotion Workshop* di Gedung Merdeka. Dampak yang sangat nyata dari konferensi ini adalah perubahan lima hotel di Bandung menjadi hotel pariwisata yang bertaraf internasional. Hotel-hotel ini antara lain Hotel Savoy Homann, Hotel Preanger, Hotel Istana, Hotel Kumala, serta Hotel Panghegar. Selain menjadi tempat penginapan, hotel-hotel tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti restoran, sehingga pengunjung dapat menikmati kuliner lokal maupun kuliner dari negara lain di tempat ini.

Satu bulan kemudian pada April 1963, Bandung kembali mendapat kehormatan untuk menerima tamu internasional melalui Konferensi Wartawan Asia Afrika (KWAA). Konferensi ini diselenggarakan untuk menyatukan dan mempertemukan para wartawan dari dua benua ini. Kegiatan utama konferensi sebenarnya diselenggarakan di Jakarta, dengan dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Soekarno, Nyonya Hartini Soekarno, Perdana Menteri Djuanda, Menteri Luar Negeri Soebandrio, dan lain-lain (Anonim, Juni 1963: 53). Meskipun seluruh acara utama konferensi dilaksanakan di Jakarta, namun panitia memilih Bandung sebagai lokasi penutupan konferensi. Resepsi penutupan ini tepatnya diselenggarakan pada malam hari, tanggal 30 April 1963 di Gedung Asia Afrika (Anonim, Juni 1963: 60).

Kemudian keesokan harinya, diadakan jamuan terakhir di Hotel Homann yang diikuti dengan berbagai hiburan tradisional. Tentu menjadi sebuah kehormatan bagi Kota Bandung untuk kembali memeriahkan solidaritas Asia-Afrika. Urgensi Bandung dalam rangkaian acara KWAA juga ditegaskan oleh Roeslan Abdulgani, yang dalam pidato penutupan konferensi menyatakan bahwa "...Bandung adalah Asia-Afrika bentuk ketjil..." (Anonim, Juni 1963: 60-61). Oleh karena itu, keberadaan Bandung tentu tidak dapat diabaikan begitu saja.

Hingga tahun 1965 – satu dasawarsa pasca-KAA diselenggarakan – Bandung masih memiliki tempat tersendiri dalam benak bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, tepatnya pada Maret 1965. Konferensi ini dihadiri oleh 33 negara, dimana delegasi yang dikirimkan merepresentasikan komunitas Islam di negara masing-masing. Jauh sebelum konferensi ini dilaksanakan, pada Juni 1964, konferensi pendahuluan

telah diselenggarakan di Jakarta dan menghasilkan resolusi mengenai upaya bersama untuk membentuk Organisasi Islam Asia Afrika (Chisaan dalam Lindsay dan Liem, *peny.*, 2012: 289).

Berbagai konferensi internasional yang telah diselenggarakan di Bandung menambah nilai jual Kota Bandung di kancah internasional. Tidak heran jika tokoh-tokoh dari berbagai negara hampir selalu memasukkan Kota Bandung ke dalam daftar kunjungan mereka ketika berada di Indonesia. Kunjungan ke Bandung ini tidak jarang juga menjadi bagian dari “diplomasi informal” antara tokoh-tokoh negara lain dengan Pemerintah Indonesia. Nikita Krushev, Perdana Menteri Uni Soviet, memasukkan Bandung dalam daftar kunjungannya ke Indonesia pada 1960 (*Soviet Premier Arrives in Bandung*, 21 Februari 1960: 16).

Kemudian, Perdana Menteri Aljazair Ferhat Abbas pernah bertandang ke Bandung dalam kunjungannya ke Indonesia pada Januari 1961 (Anonim, Januari 1961:32). Ferhat Abbas bahkan memiliki tujuan khusus ke Bandung, yakni untuk melihat gedung-gedung yang pernah menjadi tempat penyelenggaraan KAA enam tahun sebelumnya. Selain itu, ia juga mendapatkan kesempatan khusus untuk berpidato di hadapan mahasiswa Universitas Padjajaran.

Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar empat puluh menit itu, PM Ferhat Abbas sempat memuji posisi Bandung dengan mengatakan “...Bandung nanti akan mendjadi terindah dari segala ibukota, yakni ibukota kemerdekaan dunia mereka yang tertindas” (Anonim, Januari 1961: 40). Kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka membangkitkan kembali solidaritas Asia Afrika agar mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair.

Kemudian pasca penyelenggaraan *Games of New Emerging Forces* (GANEFO) pada 1963 misalnya, tamu-tamu dari berbagai negara seperti Korea Utara, Kamboja, Arab Saudi, Polandia, dan lain-lain mengadakan *tour* atau sesi wisata ke berbagai kota termasuk Bandung (Departemen Penerangan, Desember 1963: 37). Sementara itu, rombongan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara khusus bahkan menyambangi Kota Bandung untuk bertemu dengan masyarakat lokal disana (Departemen Penerangan, Desember 1963: 37).

Posisi Bandung sebagai tuan rumah berbagai konferensi hingga tempat pertemuan para aktor politik internasional pasca-KAA memang patut dibanggakan. Namun, dibalik kemeriahannya ini, Bandung tidak jauh berbeda dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta atau Surabaya. Di balik kemegahan Bandung dengan segala pembangunan dan keramaiannya selama menjadi tuan rumah berbagai konferensi, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini juga diikuti dengan dampak negatif. Dampak negatif ini berupa masalah sosial hingga ekonomi yang mengakar di Kota Bandung akibat ketidakmampuan beberapa kelompok masyarakat mengakses ruang-ruang modernitas yang telah tersedia.

Sisi Lain Bandung: Masalah-masalah Sosial Hingga Ekonomi

Sebagai kota yang mendapat tempat tersendiri dalam percaturan politik internasional pasca-KAA, pembangunan dan modernitas memang sudah semestinya menjadi bagian dari kehidupan Bandung. Ditambah posisinya sebagai kota politik global dan kota konferensi internasional, Bandung selalu digambarkan sebagai kota yang megah dan modern. Namun, harus disadari bahwa kota ini juga menghadapi masalah-masalah sosial, moralitas, hingga ekonomi yang sangat bertolakbelakang dengan pencapaiannya sebagai kota yang modern pasca-KAA.

Sebagaimana pada umumnya, modernitas sebuah kota akan selalu diikuti dengan perubahan sosial di dalamnya. Perubahan ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Begitu pula dengan Bandung, imajinasi mengenai modernitas Bandung sebagai ruang politik global hingga kota konferensi juga diikuti dengan berbagai permasalahan di dalam kota.

Tidak lama setelah KAA usai, Kota Bandung kembali menjadi sorotan media lokal hingga media internasional akibat isu *Hospitality Committee*. Kuat dugaan bahwa Panitia KAA mendatangkan beberapa perempuan penghibur untuk menemani delegasi dari berbagai negara yang datang ke konferensi akbar tersebut. Sontak, hal ini mengundang protes dari berbagai pihak. Kontroversi yang sama juga terjadi di kalangan pers. Pers oposisi seperti Indonesia Raya dan Pedoman misalnya menjadikan isu *Hospitality Committee* sebagai *headline* (Anwar dikutip oleh Utama, 2017: 152).

Protes yang dilayangkan berbagai pihak tidak hanya menyayangkan adanya isu *Hospitality Committee* sebagai “kecelakaan” bagi moral bangsa Indonesia. Bagaimanapun, banyak pula pihak yang menyayangkan isu tersebut dengan alasan telah menodai citra baik Kota Bandung. Nurdjannah (Juni 1955: 2) menyatakan bahwa,

“Kota Bandung dengan adanya peristiwa ini semakin terkenal – bukan saja dengan dunia kepelisirannya yang terkenal itu, tapi juga akan terkenal dengan adanya hidangan istimewa untuk para tamu yang telah mendapat “kehormatan” yang sangat berlebihan.”

Nurdjannah (Juni 1955: 5) juga menilai bahwa “kehormatan” berupa perempuan penghibur yang diberikan kepada tamu-tamu dari negara lainnya, telah menyinggung perasaan para perempuan di Bandung secara khusus, serta masyarakat Indonesia secara umum. Meskipun pada kenyataannya, banyak pula pihak yang memaklumkan pemberitaan tersebut dengan anggapan bahwa adanya perempuan penghibur dalam sebuah konferensi internasional ataupun pertemuan diplomatik yang besar adalah sesuatu yang wajar.

Kota Bandung memang memiliki sisi kelam berkaitan dengan prostitusi. Di tengah gegap gempita pelaksanaan berbagai konferensi, beberapa pusat prostitusi terus beroperasi di kota ini. Hal ini dapat dibuktikan dari penangkapan perempuan-perempuan penghibur yang dilakukan oleh aparat keamanan secara berkala. Surat kabar *Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode* misalnya, memberitakan bahwa polisi telah menangkap tujuh belas perempuan penghibur di Bandung (*Razzia Door de Zedenpolitie*, 29 Juni 1956). Para perempuan ini kemudian dibawa ke dinas atau panti sosial untuk menjalani pemulihan moral dan psikologis.

Fenomena yang sama juga dijumpai di banyak sudut Kota Bandung hingga tahun-tahun berikutnya. Rata-rata, prostitusi ini menjadi jalan pintas bagi para perempuan yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi, semakin dikenalnya Bandung sebagai kota penyelenggara konferensi di kancah internasional menjadikan arus modernisasi semakin kuat di kota ini. Sementara itu, harus diakui bahwa untuk mengakses ruang-ruang modernisasi juga membutuhkan modal yang tinggi. Mereka yang memiliki kemampuan dan modal hidup yang terbatas, terjebak

pada permasalahan sosial sekaligus degradasi moral seperti prostitusi. Fenomena prostitusi yang menjamur di Bandung ini kemudian mengakibatkan maraknya kaum muda yang mengalami penyakit kelamin (*Gonorrhea*). Secara lebih lanjut, Dr. Satrijo yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI menilai bahwa penyakit ini dapat memicu kebutaan. Dr. Satrijo (April 1963: 257) menyatakan bahwa per tahun 1959, dua puluh persen penyakit kebutaan di wilayah Bandung disebabkan oleh faktor penyakit kelamin.

Selain disibukkan dengan isu prostitusi, Bandung yang pada pertengahan 1950an tengah disorot oleh dunia internasional juga disibukkan dengan memuncaknya gerakan DI/TII. Van Dijk (1981: 102) menyebutkan bahwa pada 1957, gerakan ini memiliki 13.000 pasukan di Jawa Barat. Hal ini menjadikan beberapa wilayah – terutama di luar Kota Bandung – menjadi tidak aman, mengingat kekerasan, perampokan, hingga kerusuhan sering kali terjadi. Menurut Van Dijk (1981), ratusan ribu orang di Jawa Barat bahkan harus mengungsi oleh peristiwa ini. Diantara para pengungsi tersebut, rupanya banyak yang memilih untuk mengamankan diri ke Kota Bandung. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah penduduk di dalam kota dalam waktu yang cukup cepat.

Sayangnya, kenyamanan dan kemewahan Bandung tidak dapat dinikmati para pengungsi ini. Harga tanah dan properti yang mahal misalnya, tentu tidak bisa dijangkau oleh mereka yang datang sebagai pengungsi. Akibatnya, banyak terjadi kasus penggunaan tanah milik orang lain tanpa izin. Permukiman ilegal berdiri di berbagai sudut kota, bertolak belakang dengan wajah Bandung sebagai kota yang indah, bersih, nyaman, dan modern. Tidak jarang kerusuhan juga terjadi di wilayah permukiman ilegal ini, terutama ketika Pemerintah kota Bandung hendak menertibkan permukiman. Karenanya, Pemerintah Kota Bandung harus berurusan dengan para pemukim ilegal yang tidak mudah untuk diatasi.

Masalah trauma akibat DI/TII ini bukan menjadi satu-satunya alasan bagi urbanisasi masyarakat ke pusat Kota Bandung. Masalah-masalah lain seperti kemiskinan di pinggiran kota, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran menyebabkan banyaknya masyarakat yang pindah ke pusat kota. Ada imajinasi yang kuat dalam benak masyarakat bahwa dengan

berhijrah ke Bandung, mereka akan dapat mengakses pekerjaan, pendidikan, hingga hidup dalam ruang-ruang modernitas yang tersedia.

Akibatnya, terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup drastis terutama pada 1960 dimana penduduk meningkat hingga 1.028.245 jiwa dari sebelumnya yang berjumlah 986.880 jiwa pada 1959 (Achdian, ed., 2020: 148). Meskipun Bandung telah menjadi salah satu kota industri terbesar di Jawa, namun peningkatan jumlah penduduk di pusat kota ini jelas mengganggu jalannya kehidupan sosial dan ekonomi. Industrialisasi yang disusul dengan ledakan jumlah penduduk justru tidak diikuti dengan kemajuan sumber daya masyarakatnya. Akibatnya, muncul kemiskinan di beberapa titik permukiman liar yang bahkan masyarakatnya kesulitan untuk membeli bahan makanan pokok.

Bangunan-bangunan kumuh juga mulai memadati Kota Bandung. Hal ini jelas sangat mengganggu citra Bandung sebagai Kota Konferensi Internasional. Akibatnya, petugas keamanan di Kota Bandung secara rutin melakukan patroli untuk menertibkan kebersihan di sekitaran kota. Jika terdapat bangunan yang menyalahi regulasi kebersihan, maka petugas keamanan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi. Dalam sebuah berita yang dimuat di *The Iraq Times* misalnya, disebutkan bahwa sebuah hotel, sebuah pabrik dengan tinggi bangunan enam lantai, dan tujuh puluh bangunan pertokoan ditutup untuk sementara karena mengabaikan aturan kebersihan (*Untidy Buildings Closed Down*, 14 Januari 1960: 6). Bangunan-bangunan tersebut dinilai baru dapat dibuka kembali jika pemiliknya sudah membersihkan dan merapikan semuanya.

Permukiman padat dan lingkungan yang kumuh mengantarkan Bandung pada masalah-masalah lainnya. Krisis air bersih – masalah klasik yang terjadi di berbagai kota – juga pernah dialami masyarakat Bandung. Pada saat yang sama, Bandung juga harus menghadapi gelombang pandemi influenza. Gelombang penyebaran influenza sebenarnya bukanlah hal baru, sebab hal ini juga pernah terjadi ketika masih masa kolonial Hindia Belanda. Namun, kembali mewabahnya influenza di beberapa wilayah di Indonesia – termasuk Bandung – tidak dapat diabaikan. Kasus influenza ini meningkat tajam pada 1957, dimana per pertengahan Juni terjadi peningkatan dari 2158 kasus menjadi 3837 kasus (*6 Noodpoliklinieken: Stijging influenza...*, 24 Juni 1957).

Merespons peningkatan kasus influenza ini, Pemerintah Kota Bandung kemudian memperpanjang jam kerja klinik. Pada sore hari, klinik-klinik ini harus melayani pemeriksaan dan pemberian obat kepada masyarakat yang terkonfirmasi influenza. Bagi masyarakat yang kurang mampu, maka obat-obatan tersebut diberikan secara gratis.

Meskipun menghadapi berbagai permasalahan, Bandung terus membangun diri. Pembangunan di berbagai sudut kota terus menerus dilakukan, hingga pada akhirnya biaya pembangunan membengkak pada tahun 1960an. Pada 1964 misalnya, keuangan Bandung mengalami defisit hingga sekitar tiga ratus juta rupiah sehingga Pemerintah Pusat di Jakarta harus memberikan subsidi untuk kepentingan pembangunan. Hal ini jelas sangat berlawanan dengan arus pariwisata dan bisnis yang sebenarnya cukup berkembang di kota ini. Selain biaya pembangunan yang membengkak, fasilitas di beberapa sudut kota pun tidak dikelola dengan baik. Jalan Asia Afrika misalnya – yang sangat terkenal di kalangan tamu maupun wisatawan asing – kekurangan lampu penerangan.

Kondisi Kota Bandung semakin keruh menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 1960an, ketika Presiden Soekarno terus menerus menyerukan revolusi Indonesia, masyarakat Jawa Barat justru menyerukan gerakan kontra revolusi. Gerakan ini merupakan bentuk protes dan perlawanan dari masyarakat terhadap kekacauan ekonomi pada saat itu. Kekacauan ekonomi kemudian menimbulkan sentimen terhadap etnis Tionghoa yang memang memegang perekonomian di berbagai sektor. Timbul kecurigaan dari masyarakat dan golongan mahasiswa bahwa etnis Tionghoa-lah yang telah menyebabkan mereka mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi, di Kota Bandung sendiri memang cukup banyak pengusaha Tionghoa yang menggelar bisnisnya. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya keyakinan yang tertanam pada bangsa Indonesia secara umum dimana etnis Tionghoa dianggap sebagai orang asing, meskipun banyak dari Tionghoa tersebut yang merupakan Tionghoa peranakan. Akibatnya, terjadi demonstrasi besar-besaran di Jawa Barat pada 1963. Di Kota Bandung, peristiwa ini terjadi pada 10 Mei 1963, sehingga disebut dengan “Peristiwa 10 Mei 1963” (Departemen Penerangan, Mei 1963: 16). Para

mahasiswa sebenarnya juga terlibat dalam peristiwa bersejarah ini. Aksi ini kemudian diikuti dengan penjarahan dan perusakan fasilitas umum hingga perusahaan-perusahaan milik Tionghoa di Kota Bandung (Departemen Penerangan, Mei 1963: 10). Sebenarnya, kerusuhan dan penjarahan ini masih berlanjut pada hari-hari selanjutnya. Di Braga – salah satu pusat perekonomian Kota Bandung – tidak satupun toko-toko milik Tionghoa yang lolos dari penjarahan (*De Braga en Dode Straat...*, 21 Mei 1963).

Selain pusat perekonomian, permukiman Tionghoa juga tidak luput dari aksi penjarahan. Rumah-rumah dirusak, tidak peduli bahwa etnis Tionghoa juga telah berkontribusi dalam membangun perekonomian di Bandung. Akibat dari kerusuhan ini, Pemerintah menangkap beberapa orang yang diduga menjadi dalang dari peristiwa tersebut. Terdapat enam terdakwa yang merupakan mahasiswa dari ITB (Institut Teknologi Bandung) dan Universitas Padjajaran yang dinilai menjadi provokator dalam peristiwa bersejarah ini (Anwar, 2006: 346). Keenam mahasiswa tersebut dijatuhi hukuman penjara, ditambah dengan bukti bahwa mereka dinilai telah melakukan kekerasan terhadap etnis Tionghoa bahkan sebelum peristiwa 10 Mei 1963 berlangsung.

Presiden Soekarno melalui Rapat Umum Wanita Partindo di Senayan pada 19 Mei 1963 kemudian menyatakan bahwa kerusuhan di Bandung tersebut merupakan gerakan kontra revolusi yang didalangi oleh aktivis bekas PSI, Masyumi, PRRI, juga dinilai ada unsur subversi asing (Anwar, 2006:244). Akibatnya, beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi kerusuhan juga ditangkap oleh Pemerintah Pusat.

Kerusuhan kembali terjadi pada tahun 1965, sebagai buntut dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa jenderal. Dalam peristiwa mengerikan ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi pihak yang dituduh sebagai dalang pembunuhan dan pemberontakan. Wieringa dan Katjasungkana (2020: 31) memperjelas, bahwa tuduhan ini pun diperjelas oleh Soeharto dan loyalisnya dengan menamai gerakan ini “G30S/PKI”. Akibatnya, muncul kemarahan publik yang sangat besar sehingga terjadi penangkapan dan penggrebekan di markas-markas PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa ribuan pemuda menyerbu kantor PKI dan afiliasinya di Kota Bandung (*Temporary Ban on Mass Organizations in Indonesia*, 18

Oktober 1965: 1). Kota ini juga turut tercoreng akibat adanya isu bahwa Gerwani telah mengirim perempuan-perempuan Tasikmalaya ke prostitusi yang ada di Bandung (Pusat Penerangan, 1965: 343 dikutip oleh Wieringa dan Katjasungkana, 2020: 125). Isu ini seakan mengungkit kembali wajah Bandung sebagai kota yang menjadi pusat prostitusi, setelah sebelumnya pernah menjadi perbincangan di kancah internasional saat isu *Hospitality Committee* naik ke permukaan.

Masalah-masalah di atas hanya sebagian dari permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Secara umum, antara satu masalah dengan masalah yang lainnya menyebabkan dampak yang sama, yakni adanya ketimpangan baik secara sosial maupun ekonomi. Di pusat kota, di mana berbagai konferensi diselenggarakan, yang terlihat adalah modernitas dengan segala keindahannya. Namun di titik-titik tertentu dimana masyarakat tidak memiliki modal untuk mengakses modernitas di Bandung, mereka hidup dalam kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang rendah.

PENUTUP

Peristiwa diplomatik ternyata tidak hanya mempengaruhi kondisi politik suatu negara atau kawasan tertentu. Lebih dari itu, peristiwa diplomatik dapat mendorong perubahan dan perkembangan kota yang menjadi tuan rumahnya. Hal ini juga terjadi pada Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang ternyata mengubah citra dan kondisi Kota Bandung hingga satu dasawarsa berikutnya. Sejak 1955 hingga 1965, Bandung menjadi kota politik global yang sangat dikenal oleh para negarawan hingga aktor *non-state* seperti para wartawan, penulis, dan lain-lain. Bandung kini menjadi “pusat” dari diplomasi pascakolonial Dunia Ketiga, sebab di Bandung pula terjalin komitmen solidaritas Asia Afrika hingga solidaritas antikolonialisme dan antiimperialisme.

Dikenalnya Bandung ke hampir seluruh penjuru dunia membuat kota ini menjadi salah satu kota yang sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi internasional. Daya tarik Bandung sebagai Kota Konferensi Internasional ini juga didukung oleh fasilitasnya yang cukup lengkap. Pasca-KAA, Pemerintah dengan segala upayanya juga melengkapi Kota Bandung dengan jaringan telekomunikasi yang terhubung ke berbagai kota penting di dunia, hingga fasilitas-fasilitas yang

menunjukkan modernitas mulai dari rumah sakit, sekolah khusus penyandang disabilitas, reaktor nuklir, dan sebagainya sehingga kota ini dinilai layak untuk menerima tamu internasional.

Sayangnya, modernitas Bandung yang dihasilkan pasca-KAA tidak selalu diikuti oleh kemajuan masyarakat lokalnya. Kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya masih membelenggu masyarakat. Modernitas ini juga membawa konsekuensi pada degradasi moral seperti dibuktikan dengan banyaknya pusat-pusat prostitusi akibat gelombang urbanisasi yang meningkat. Namun, masalah sosial, moral, dan ekonomi yang mengakar di Bandung ini sejatinya merupakan konsekuensi dari modernitas yang dicapai.

Bagaimanapun, modernitas dan masalah-masalah sosial dan ekonomi bagaikan dua sisi mata uang yang akan terus melekat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat berlawanan. Terlepas dari masalah-masalah ini, Bandung pada periode 1955 hingga 1965 telah menorehkan sejarahnya sendiri. Apalagi, tidak banyak kota di Indonesia atau bahkan di kawasan Asia yang memiliki tempat dalam percaturan politik internasional. Kajian ini kiranya juga dapat menjadi refleksi bagi Indonesia pada abad ke-21 agar kembali membangkitkan kota-kota lokal selain Jakarta sebagai ruang di mana konektivitas global hidup, sehingga terjadi pertukaran ide, perbincangan politik, kebudayaan, dan aspek-aspek lainnya di dalam kota. Dalam jangka panjang, kota yang menjadi tempat terkoneksi gagasan-gagasan global juga sangat mendukung agar kota menjadi aktor diplomasi (*city diplomacy*), sehingga diplomasi tidak hanya dilakukan di level negara atau pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- 6 Noodpoliklinieken: Stijging influenza in Bandung. 24 Juni 1957. *Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*.
- Abdulgani, Roeslan. 2011. *The Bandung Connection: Konperensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri Indonesia.
- Abdulgani, Roeslan. April-Mei 1965. "Sedjarah Lahirnya KAA I: Mengungkap Kembali Faktor-Faktor jang Mensukseskan Bandung II". *Mimbar Indonesia*. Vol 19. No. 4-5. Hlm. 11-13, 16-17, dan 25-26.
- Achdian, Andi (peny.). 2020. *Geliat Kota Bandung: Dari Kota Tradisional Menuju Modern*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Anonim. 14 Juni 1963. "A Journey Through Industrial Java". *Overseas Trading*. Vol. 15. No. 11. Hlm. 247-249.
- Anonim. 1963. "Kebutaan di Indonesia". *Mimbar Penerangan*. Vol. 14. No. 3. Hlm. 44-47.
- Anonim. 24 April 1955. "Bandung During the Conference". *Bandung Bulletin*. No. 9. Hlm. 16-22.
- Anonim. Januari 1961. "Kundjungan Pejuang Besar Nasional Aljazair Ferhat Abbas di Indonesia". *Mimbar Penerangan*. Vol. 12. No. 1. Hlm. 32-41.
- Anonim. Juli 1956. "Sedikit Kesan Tentang Konferensi Mahasiswa Asia Afrika di Bandung". *Mimbar Penerangan*. Vol. 7. No. 7. Hlm. 442-447.
- Anonim. Juni 1963. "K.W.A.A. Penting bagi Perdjuangan Menentang Imperialisme dan Kolonialisme II". *Mimbar Penerangan*. Vol. 14. No. 2. Hlm. 53-61.
- Anonim. Juni 1964. "Lenyapkan Salah Pengertian tentang Tenaga Atom". *Mimbar Indonesia*. Vol. 18. No. 4. Hlm. 25-28, Hlm. 34.
- Anonim. Mei 1955. "Bandung: That Lovely City". *Wanita*. Vol. 7. Hlm. 221-225.
- ANRI. April 1955. "Artikel/Makalah Mohammad Yamin dalam Surat Kabar Merdeka Jakarta Tanggal 27 April 1955 Mengenai Asia Afrika Tuntut Irian Barat". *Inventaris Arsip Mohammad Yamin*. No. 43.
- ANRI. Januari 1955. "Memorandum dari S. Suryocondro kepada Duta Besar Mengenai Reaksi Pers Amerika Serikat dan Inggris terhadap Rencana Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Tanggal 25 Januari 1955". *Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959*. No. 2199.
- Anwar, Rosihan. 2006. *Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bamboo Used for Science Teaching. 26 November 1957. *The Iraq Times*. Hlm. 5.

- Chisaan, Choirotun. 2012. "In Search of An Indonesian Islamic Cultural Identity, 1956-1965", dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (peny.). *Heirs to World Culture: Being Indonesia 1950-1965*. Leiden: KITLV Press. Hlm. 283-314.
- De Braga en Dode Straat: Javanen in Actie tegen Chinezen. 21 Mei 1963. *De Tijd de Maasbode*.
- De Freytas-Tamura, Mariko. September 2009. "Comparative Global Political Cities: Brussels and Paris", dipresentasikan dalam *The 2009 Annual Meeting of The American Political Science Association*. Toronto, Kanada.
- Departemen Penerangan. Desember 1963. "Ganefo: Mendobrak Susunan Lama". *Mimbar Penerangan*. Vol. 14. No. 5. Hlm. 29-39.
- Departemen Penerangan. Mei 1963. "Waspada terhadap Kontra Revolusi". *Mimbar Penerangan*. Vol. 14. No. 2. Hlm. 10-17.
- Futro, Tiko Dwiantoro. 2012. "Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam Menunjang Pariwisata di Indonesia (1957-1965)". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia.
- KMAA Diperpanjang Sampai Tgl. 7/6. 4 Juni 1956. *Pedoman*. Hlm. 1-2.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Many UNESCO Achievement Mark Past Years Work. 1 Februari 1965. *Baghdad News*. Hlm. 7.
- Muin, Bachtar H.S. Mei 1965. "Home Industri Punja Peranan di dalam Ekonomi Rakjat Tersebar Luas di Masjarakat Jawa Barat". *NEFO*. Vol. 3. No. 14. Hlm. 23.
- Nurdjannah. Juni 1955. "Terlampau Ramah Tamah!" *Dunia Wanita*. Vol. 7. No. 12. Hlm. 2; Hlm. 5.
- Nurwulandari, Rahmia dan Kemas Ridwan Kurniawan. 2020. "Europa in de Tropen": The Colonial Tourism and Urban Culture in Bandung". *Journal of Architectural Design and Urbanism*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 15-23.
- Razzia Door de Zedenpolitie. 29 Juni 1956. *Algemeen Indisch Dagblad: de Preangerbode*.
- Research Centre in Bandung. 22 November 1962. *The Iraq Times*. Hlm. 5.
- Rusnandar, Nandang. 2010. "Sejarah Kota Bandung dari "Bergdessa" (Desa Udik) Menjadi Bandung "Heurin Ku Tangtung" (Metropolitan)". *Patanjala*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 273-293.
- Santoso, Rahmat. Januari 1956. "Djawatan Penerangan dalam Konferensi-Konferensi Internasional di Bandung". *Mimbar Penerangan*. Vol. 7. No. 1. Hlm. 18-21.

- Satrijo. April 1962. "Menteri Kesehatan RI: Kampanje Anti Buta Pada Hari Kesehatan Sedunia". *Mimbar Penerangan*. Vol. 13 No. 4. Hlm. 254-260.
- Soesmojo. Desember 1956. "Goresan Kesan: Ketika Bandung Sibuk Dengan Konferensi Regional FAO Untuk Asia dan Timur Djauh". *Mimbar Penerangan*. Vol. 7. No. 12. Hlm. 782-788.
- Soewardi, R. Odi dan R. Nana Djajasoempena. 1965. *Sedjarah Perkembangan Pembangunan Daerah Djawa Barat Tahun 1945-1965*. Bandung: Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Soviet Premier Arrives in Bandung. 21 Februari 1960. *The Iraq Times*. Hlm. 16.
- Suganda, Her. 2011. *Wisata Parijs van Java: Sejarah, Peradaban, Seni, Kuliner, dan Belanja*. Jakarta: Kompas.
- Temporary Ban on Mass Organizations in Indonesia. 18 Oktober 1965. *Baghdad News*. Hlm. 1.
- Untidy Buildings Closed Down. 14 Januari 1960. *The Iraq Times*. Hlm. 6.
- Utama, Wildan Sena. 2017. *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Van Dijk, C. 1981. *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- Wieringa, Saskia E., dan Nursyahbani Katjasungkana. 2020. *Propaganda dan Genosida di Indonesia: Sejarah Rekayasa Hantu 1965*. Depok: Komunitas Bambu.

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI INDONESIA (2004-2019)¹

THE EFFORTS TO PREVENT AND CONTROL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN INDONESIA (2004-2019)

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

Alumnus Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Email: joshua.jolly.s.c@mail.ugm.ac.id

DOI: 10.36424/jpsb.v7i2.274

Naskah Diterima: 24 Juli 2021 Naskah Direvisi: 30 September 2021

Naskah Disetujui: 01 Oktober 2021

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia pada awal abad ke-21 (2004-2019) beserta dampaknya. Hal ini menjadi penting sebab DBD dinilai sebagai salah satu ancaman ketika Indonesia sedang melawan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, DBD menjadi salah satu penyakit yang telah berada dalam sejarah panjang Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah kesehatan masyarakat. Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber primer berupa surat kabar dan publikasi resmi pemerintah serta sumber sekunder berupa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status DBD yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 2004 menyebabkan perhatian pemerintah atas DBD makin besar. Pemerintah menetapkan kebijakan kesehatan yang meliputi upaya pencegahan dan pengendalian dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian, dampak atas upaya ini adalah jumlah kasus DBD bergerak secara fluktuatif selama lima belas tahun, bahkan meningkat tajam pada 2019.

Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Upaya Pencegahan dan Pengendalian, Kebijakan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kolaborasi Lintas Sektor

Abstract

This article aims to examine efforts to prevent and control dengue hemorrhagic fever (DHF) in Indonesia at the beginning of the 21st century (2004-2019) and their impacts.

¹ Makalah ini, dengan pengubahan seperlunya, pernah dipresentasikan dalam International Conference on Indonesian Culture (ICONIC) 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10-13 November 2020 secara daring. Makalah ini belum pernah dipublikasikan dalam Prosiding ICONIC 2020 dan publikasi lainnya. Apabila di kemudian hari makalah ini dipublikasikan di luar jurnal ini, hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin penulis.

This is important because DHF is considered as one of the threats when Indonesia is fighting the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. In addition, DHF is a disease that has existed in Indonesia's long history. This research is historical research with a public health history approach. The sources used are primary sources in the form of newspapers and government official publications and secondary sources in the form of related literature. The results shows that the status of DHF which had been designated as an Extraordinary Event (EE) in 2004 caused the government to pay more attention to DHF. The government establishes health policies that include prevention and control efforts by involving cross-sectoral collaboration. However, the impact of this effort is that the number of dengue cases has fluctuated for fifteen years, even increasing sharply in 2019.

Keywords: *Dengue Hemorrhagic Fever, Prevention and Controlling Effort, Health Policy, Public Health, Cross-Sectoral Collaboration*

PENDAHULUAN

Pada akhir 2019 hingga memasuki 2020, dunia dikejutkan dengan wabah penyakit Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang disebabkan oleh virus bernama SARS-Cov-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*). Bahkan, wabah penyakit ini telah ditetapkan statusnya sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020 (*Kompas*, 12 Maret 2020). Indonesia tidak luput dari pandemi ini. Bahkan, jumlah pasien penderita Covid-19 di Indonesia makin meningkat hingga mencapai 1.347.026 orang per 2 Maret 2021, tepat satu tahun sejak Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengumumkan dua kasus pertama terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 silam (*Kompas*, 2 Maret 2021).

Di tengah perang melawan pandemi Covid-19, Indonesia justru kembali dihantui oleh penyakit yang sudah lama menjangkiti Indonesia, yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet pada 29 Mei 2020. Ia mengingatkan sejumlah agenda kesehatan yang harus menjadi perhatian juga di tengah gejala pandemi Covid-19, yaitu menurunkan *stunting*, TBC (*tuberculosis*), malaria, demam berdarah, HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*), dan hal-hal yang berkaitan dengan hidup sehat (*Liputan 6*, 29 Mei 2020).

Kewaspadaan ini memiliki dasar yang kuat, sebab jumlah kasus positif DBD di sejumlah wilayah di Indonesia justru meningkat signifikan. Tidak lama setelah pengumuman kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia, *Kompas* merilis data jumlah pasien DBD dengan angka kematian pada dua bulan pertama 2020, yaitu 13.864 kasus dengan 78 orang meninggal. Empat provinsi dengan jumlah kasus DBD yang cukup tinggi adalah Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur (*Kompas*, 6 Maret 2020). Bahkan, tidak lama berselang, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut bahwa hingga triwulan pertama 2020, 16.099 kasus DBD terkonfirmasi dengan 100 orang meninggal. Dengan kata lain, peningkatan hanya dalam waktu sebulan terlihat jelas. Berbagai kalangan menyebut bahwa hal ini berkaitan erat dengan “siklus lima tahunan” DBD (*RRI*, 10 Maret 2020).

Penyakit DBD bukan merupakan hal baru di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Unit Penelitian Dengue di *Eijkman Institute of Molecular Biology*, Dr. Tedjo Sasmono, kasus pertama DBD di Indonesia tercatat ditemukan pada 1968, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Penyebab utamanya adalah infeksi virus dengue dari nyamuk *Aedes aegypti* sebagai vektor atau perantara utama, juga nyamuk *Aedes albopictus* yang sebelumnya dikenal sebagai vektor virus cikungunya dan Zika. Ia menegaskan bahwa setelah setengah abad lebih berlalu, kasus DBD di Indonesia belum dapat hilang sepenuhnya. Sejumlah faktor berpengaruh di dalamnya, seperti iklim, vektor nyamuk, populasi nyamuk, hingga kekebalan komunal (masyarakat). Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan DBD harus dilaksanakan secara multisektor dan dimulai sejak lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Hal paling sederhana, seperti 3M (Menguras, Menutup, Menyingkirkan) plus cara lain, seperti menaburkan bubuk abate harus makin digalakkan (*Kompas*, 12 Februari 2020).

Upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dinilai belum maksimal. Hal ini dapat ditengarai akibat pemerintah lebih berfokus kepada sinkronisasi layanan kesehatan dari pusat hingga daerah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan pengendalian jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB) pada waktu itu (Achmad, 1999: 5–22). Selain itu, data epidemiologis penyakit DBD memperlihatkan

bahwa sejak 1968 hingga memasuki 2000, jumlah kasus dan angka kematian tidak menurun secara signifikan (Karyanti dan Hadinegoro, 2009: 426).

Di samping itu, data terkait upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Indonesia pada periode itu juga tidak memadai. Upaya ini secara eksplisit hanya dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum kebijakan kesehatan di Indonesia pada periode tersebut, seperti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/MENKES/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 92/MENKES/SK/II/1994 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/MENKES/SK/V/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31-VI Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (Pokjanal DBD) Tim Pembina LKMD Tingkat Pusat (Indonesia, 1998: iii–v).

Berdasarkan realitas tersebut, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari penyakit DBD. Indonesia perlu menata ulang upaya untuk terbebas dari penyakit ini. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam artikel ini adalah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Indonesia pada awal abad ke-21 (2004-2019). Rumusan masalah ini dijabarkan dalam tiga pertanyaan penelitian. *Pertama*, bagaimana perjalanan upaya pencegahan penyakit DBD di Indonesia (2004-2019)? *Kedua*, bagaimana perjalanan upaya pengendalian penyakit DBD di Indonesia (2004-2019)? *Ketiga*, apa dampak dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Indonesia (2004-2019)? Batasan temporal dalam penelitian ini adalah sejak 2004 hingga 2019. Tahun 2004 adalah tahun pertama pada abad ke-21 ketika KLB DBD secara nasional diumumkan di Indonesia. Tahun 2019 adalah tahun sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Indonesia yang diwakili oleh sejumlah wilayah.

Konsep pencegahan dan pengendalian sebagai upaya untuk melawan penyakit DBD merupakan rekomendasi WHO. Secara terperinci, dua upaya ini dijabarkan dengan sejumlah poin penting, seperti partisipasi atau pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan layanan kesehatan. Dalam hal pencegahan,

upaya promosi, dan edukasi kesehatan menjadi penting. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan di dalamnya. Dalam hal pengendalian, pemantauan vektor dan penyakit melalui data di lapangan dapat menahan laju penyakit, baik jumlah kasus dan jumlah kematian. Di sinilah letak peran pemerintah dan layanan kesehatan (WHO, 2011b: 127–138). Dengan demikian, sejumlah pemangku kepentingan terlibat di sini, seperti pemerintah dalam hal penetapan dan pengawasan kebijakan, perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan penelitian penyakit, dan masyarakat luas sebagai tidak hanya objek, melainkan subjek dalam upaya pencegahan sekaligus pengendalian penyakit DBD.

Secara umum, pemberantasan penyakit DBD berkaitan erat dengan sejarah pemberantasan penyakit di Indonesia. Sayangnya, buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan memberikan keterangan yang kurang memadai atas pemberantasan penyakit DBD di Indonesia (Direktorat Jenderal PP dan PL, 2007). Secara khusus, sejumlah kajian telah dikerjakan tentang penyakit DBD di Indonesia. Beberapa di antaranya lebih menitikberatkan studi kasus di tingkat puskesmas atau lokal dan dalam periode yang relatif singkat. Dalam skala yang lebih luas (nasional), penelitian tentang penyakit DBD lebih didominasi dari perspektif epidemiologi, seperti Mulya Rahma Karyanti dan Sri Rezeki Hadinegoro (2009), Soedarto (2012), A. Arsunan Arsin (2013), dan Harapan dkk. (2019).

Dengan kata lain, penelitian sejarah untuk membedah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Indonesia dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam periode yang cukup panjang belum tersedia. Oleh sebab itu, artikel ini merupakan penelitian awal untuk menunjukkan capaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Indonesia pada periode kontemporer sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam penetapan kebijakan kesehatan di Indonesia ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Sumber-sumber penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah surat kabar serta publikasi resmi pemerintah, seperti terbitan berkala, modul, dan peraturan

perundang-undangan. Sumber sekunder yang digunakan adalah literatur terkait. Sumber-sumber yang tersedia kemudian diverifikasi dan diinterpretasi dengan metode analisis dan sintesis sehingga menghasilkan fakta-fakta historis. Pada akhirnya, sebuah narasi historis yang kronologis dan komprehensif dihasilkan sebagai hasil akhir penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah kesehatan, secara khusus sejarah kesehatan masyarakat. Virginia Berridge menyatakan bahwa diskusi tentang kesehatan masyarakat saat ini masih belum menyertakan pemahaman penuh tentang faktor penyebabnya (kausalitas). Hal ini tidak lain berasal dari sejarah kesehatan masyarakat yang dapat memberikan perspektif lebih luas tentang kebijakan dan fenomena kekinian. Oleh sebab itu, melalui sejarah kesehatan masyarakat, kebijakan dan respons atas fenomena kesehatan dewasa ini selalu bergerak dinamis, berubah, dan tersedia sejumlah pilihan alternatif (Berridge, Gorsky, dan Mold, 2011: 1–2).

Bagaimana bentuk kebijakan kesehatan yang “belajar dari sejarah”? Kebijakan kesehatan yang menekankan partisipasi/pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan layanan kesehatan, sebagaimana direkomendasikan oleh WHO, adalah poin kunci untuk menghadapi ancaman kesehatan pada periode kontemporer sebagaimana dinyatakan oleh Dorothy Porter (Porter, 1999: 280–302). Lebih lanjut, Judy Orme, Jane Powell, Pat Taylor, dan Melanie Grey menyebut empat hal penting dalam kesehatan masyarakat pada abad ke-21, yaitu kebijakan yang sinkron hingga ke tingkat lokal; partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan komunitas; kepekaan terhadap isu kontemporer, seperti kesetaraan, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, globalisasi, dan jaminan perlindungan; serta evaluasi menyeluruh berdasarkan alat ukur multidisipliner (Orme *et al.*, 2007: 3).

PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Penyakit DBD di Indonesia (2004-2019)

Pepatah berbunyi, “Lebih baik mencegah daripada mengobati”. Hal demikian juga berlaku dalam upaya pencegahan penyakit DBD di Indonesia. Mengingat DBD

belum tertuntaskan di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan sejumlah program pencegahan DBD dengan memberdayakan masyarakat yang disusun dalam kerangka program P2DBD (Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue).

Salah satu program di dalamnya adalah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah memperkenalkan sebuah metode komunikasi atau penyampaian informasi yang menitikberatkan perubahan perilaku berlandaskan kearifan sosial budaya setempat, yaitu metode *Communication for Behavioral Impact* (COMBI) atau Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP). Metode ini telah diperkenalkan oleh WHO pada 2004 dan diterapkan di sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Padang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Hal demikian merupakan salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam kerangka program P2DBD di Indonesia (Indonesia, 2008: 103).

Metode ini didefinisikan sebagai proses penggerakan dan pemberdayaan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat melalui komunikasi sesuai situasi sosial budaya setempat yang mampu memengaruhi lingkungan. Peserta yang terlibat adalah petugas dinas kesehatan (dinkes) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka diberikan pembekalan tentang peran serta masyarakat yang menjadi kunci dari pengendalian bahaya nyamuk, di samping berbagai upaya pengendalian vektor nyamuk. Pada dasarnya, metode ini merupakan pendidikan dan pelatihan dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku masyarakat. Para peserta sosialisasi diharapkan mampu mengadvokasi masyarakat untuk turut serta dalam merumuskan dan mencari pemecahan masalah serta melaksanakannya sehingga pemberdayaan PSN di tengah masyarakat dapat tercapai secara optimal (Direktorat Jenderal PP dan PL, 2008: 64–74).

Di Padang, metode ini diterapkan pada 2009. Berdasarkan studi kasus oleh Elsa Sari Rosa, program COMBI melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor, baik pemerintah, puskesmas, mahasiswa, dan masyarakat. Program ini direalisasikan dengan sejumlah kegiatan, seperti membersihkan lingkungan dalam rangka PSN; pawai kendaraan; pemasangan poster dan stiker; pembagian selebaran, rompi, baju, dan topi; serta melakukan promosi kegiatan melalui media cetak, elektronik, baliho, dan spanduk. Hasilnya, meski partisipasi masyarakat masih terbilang rendah, tingkat pengetahuan,

sikap, dan perilaku masyarakat atas DBD menunjukkan perkembangan yang positif dengan penerapan program COMBI (Rosa, 2009: 17–19, 52–60).

Selain melalui metode COMBI, upaya lain untuk menguatkan gerakan PSN adalah kaderisasi Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Di Kota Denpasar, misalnya, hal ini didorong melalui program “Gema Petik” (Gerakan Mandiri Pemantau Jentik). Melalui gerakan ini, setiap tempat tinggal atau lingkungan memiliki jumantik mandiri sebagai kader penggerak PSN. Gerakan ini serupa dengan G1R1J (Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik) yang digalakkan secara nasional (*Antara Bali*, 11 Oktober 2016).

Jumantik adalah orang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk. Di sisi lain, G1R1J adalah peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit tular vektor, khususnya DBD melalui pembudayaan PSN 3M Plus. Secara hierarkis, setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki koordinator jumantik dan setiap RW (Rukun Warga) atau desa atau kelurahan memiliki supervisor/pengawas jumantik. Secara berkala, masing-masing elemen ini bertanggung jawab melakukan sosialisasi PSN 3M Plus, memantau tempat jentik nyamuk, dan mencatatnya dalam kartu jentik. Hasil pemantauan ini kemudian dijadikan bahan untuk kunjungan dan pelaporan lebih lanjut (Direktorat Jenderal P2P, 2016: 5–15).

Menurut Diana Andriyani Pratamawati, peran jumantik dalam sistem kewaspadaan dini DBD di Indonesia secara umum cukup berhasil, meski terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan evaluasi. Secara umum, keterbatasan tenaga dan dana merupakan kendala utama yang dialami para jumantik sehingga kegiatan mereka tidak berjalan maksimal. Akan tetapi, di daerah endemis DBD, jumantik berperan penting. Hal ini tidak terlepas dari tenaga dan dana yang memadai. Sebagai daerah perkotaan dengan masyarakat yang padat dan bermobilitas tinggi, ditambah lagi merupakan salah satu daerah endemis DBD, Kota Denpasar memperlihatkan peran jumantik yang signifikan dengan penurunan angka kasus dan jumlah kematian DBD sejak 2010 hingga 2012. Akhirnya, kunci dari peran jumantik adalah membangun paradigma sehat yang bersifat proaktif, promotif, dan preventif sehingga pelayanan

kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif tidak menjadi satu-satunya fokus utama (Pratamawati, 2012: 245–247).

Kaderisasi jumantik juga melibatkan siswa Sekolah Dasar (SD), salah satunya di Kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyebut bahwa mereka direkrut menjadi “Jumantik Cilik” yang merupakan “detektif cilik nyamuk”. Alasannya adalah mereka dinilai memiliki semangat untuk mencari jentik-jentik nyamuk di rumah siapa pun. Mereka diberi tanggung jawab untuk melakukan PSN di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini pun dinilai berdampak signifikan, sebab kegiatan PSN yang dilaksanakan secara rutin dan serentak dengan jumlah kader yang mumpuni dapat memberantas DBD secara efektif (*Berita Satu*, 23 April 2015).

Anak sekolah berperan penting dalam pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia karena jumlah mereka sangat banyak hingga 20% meliputi siswa SD, SMP, hingga SMA. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSN menyebabkan anak sekolah dipilih sebagai kader jumantik cilik agar penanaman perilaku PSN dapat dilakukan sedini mungkin. Dalam pelaksanaannya, anak sekolah didampingi oleh guru penanggung jawab PSN dan dibina oleh Kepala Puskesmas setempat. Di tingkat provinsi, Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan PSN anak sekolah (Direktorat Jenderal PP dan PL, 2014: 5–19). Berdasarkan studi Hidayatul Issri Rubandiyah dan Efa Nugroho, pembentukan kader jumantik cilik ini membawa dampak yang positif dalam perkembangan kognisi (pengetahuan) siswa sehingga kaderisasi jumantik cilik sangat diperlukan di sekolah dan masyarakat sekitarnya (Rubandiyah dan Nugroho, 2018: 225).

Tidak hanya siswa SD yang direkrut sebagai kader jumantik, tetapi juga mahasiswa. Dinkes Kalimantan Utara, misalnya, mendorong mahasiswa dan pelajar menjadi tonggak pencegah DBD melalui kader jumantik karena peran mereka dianggap vital. Selain menjadi kader jumantik di rumah masing-masing, Dinkes Kalimantan Utara juga mendorong mahasiswa untuk turun ke daerah-daerah dan mengedukasi masyarakat perihal pencegahan dan penanggulangan DBD di Kalimantan Utara (*Tribun News*, 7 Februari 2019). Selain menjadi kader jumantik, peran mahasiswa juga terlihat dari

peningkatan kapasitas kader jumantik. Beberapa mahasiswa dan dosen Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI) Yogyakarta, misalnya, mengembangkan aplikasi “Jumantik” bagi kader jumantik dan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut bagi mereka di Imogiri sehingga pekerjaan para jumantik makin dimudahkan (*Kedaulatan Rakyat*, 7 Mei 2019).

PSN merupakan salah satu bagian dari upaya besar pemerintah dalam memasyarakatkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, sejumlah upaya promosi kesehatan dan pemasyarakatan PHBS pun dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah pengadaan sejumlah peraga, seperti poster, baliho, spanduk, stiker, dan sejenisnya yang dapat diakses publik pada situs resmi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Direktorat PK dan PM, 2016).

Berdasarkan studi Indah Tri Susilowati dan Endang Widhiyastuti, upaya promosi kesehatan tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Menariknya, tidak hanya seputar PHBS secara umum, masyarakat juga diajak mengembangkan semprotan (*spray repellent*) berbahan dasar herbal yang dapat ditemui di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi penting sebab obat nyamuk yang beredar di pasaran, meski terbilang praktis dan terjangkau, memiliki dampak negatif jika digunakan secara berkepanjangan. Bahan dasar herbal yang digunakan adalah batang serai dan cengkeh. Ibu-ibu sebagai kelompok yang digerakkan dalam pemberdayaan tersebut memberikan tanggapan positif atas hal tersebut. Metode ini dinilai dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat dan ramah lingkungan (Susilowati dan Widhiyastuti, 2019: 238–242).

Selain memasyarakatkan PHBS, promosi kesehatan yang juga penting dilakukan adalah penyebarluasan informasi seputar DBD. Seringkali masyarakat mengalami kesalahpahaman atas penyakit menahun tersebut. Salah satunya adalah fase klinis penyakit DBD. Secara umum, fase klinis DBD terdiri atas tiga fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Pada fase pertama, penderita akan mengalami demam secara tiba-tiba hingga mencapai 40 derajat celcius selama dua hingga tujuh

hari, kulit memerah, nyeri di seluruh tubuh, serta sakit kepala. Pada saat itu, konsumsi air putih lebih banyak sangat disarankan agar suhu tubuh menurun dan menghindari dehidrasi (*Kompas*, 29 Januari 2019).

Pada fase kedua, penderita seakan-akan dikecohkan karena suhu telah turun sehingga mereka abai dan tidak berobat lebih lanjut. Padahal, penurunan trombosit secara drastis dan pendarahan dapat terjadi. Fase kritis pun hanya berlangsung relatif singkat, yaitu 24-38 jam, dan memiliki risiko yang sangat besar hingga dapat mengalami kebocoran pembuluh darah. Setelah fase ini, penderita mengalami fase ketiga. Kondisi penderita akan normal kembali, terutama trombosit dan cairan tubuh. Pengetahuan semacam ini perlu disebarluaskan di tengah masyarakat, sebab akibat fatal DBD (kematian) dapat ditanggulangi jika penanganan terhadap penderita dilakukan secara tepat, terutama saat memasuki fase kritis. Inilah “kunci utama” untuk menekan jumlah kematian akibat DBD (*Kompas*, 29 Januari 2019).

Di samping itu, upaya penyebaran informasi juga dilakukan, terutama untuk menangkal kesalahpahaman atau berita bohong (*hoax*). Jauh sebelum istilah *hoax* dikenal luas, beberapa kesalahpahaman seputar DBD tersebar luas di tengah masyarakat. Harian *Kompas* merangkum bahwa sekurang-kurangnya terdapat lima kesalahpahaman yang tersebar luas dan perlu diklarifikasi agar masyarakat memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam mencegah dan memberantas DBD. *Pertama*, nyamuk *Aedes aegypti* suka bertelur pada air kotor. *Kedua*, nyamuk *Aedes aegypti* tidak akan terbang hingga ke tingkat gedung yang tinggi. *Ketiga*, orang yang sudah sekali terkena DBD akan kebal seumur hidup. *Keempat*, anak yang mengalami DBD harus dibungkus dengan pakaian berlapis-lapis. *Kelima*, pasien DBD membutuhkan transfusi trombosit (*Kompas*, 14 Februari 2019).

Kesalahpahaman tersebut diklarifikasi oleh sejumlah pakar, salah satunya Prof. Saleha Sungkar dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI). Ia menyebut bahwa nyamuk *Aedes aegypti* justru menyukai genangan air jernih sebagai tempat bertelurnya. Nyamuk ini juga dapat terbang hingga jarak 50 sampai 100 meter secara horizontal dan hingga ketinggian 15 sampai 20 meter secara vertikal. Selain itu, kekebalan seseorang tidak dapat terbentuk seumur hidup jika

sudah terserang DBD sebelumnya. Alasannya, terdapat empat serotipe virus berdasarkan tingkat keganasannya di Indonesia, yaitu DEN-3, DEN-2, DEN-1, dan DEN-4. Terkait kesalahpahaman keempat, saran yang tepat adalah penggunaan pakaian yang tipis agar tidak menghambat panas untuk keluar melalui pori-pori kulit. Terakhir, transfusi trombosit bukanlah fokus utama, melainkan kebocoran plasma yang dapat menyebabkan hemokonsentrasi atau pemekatan. Oleh sebab itu, hematokrit (angka pemekatan) itulah yang mendapat penanganan utama (*Kompas*, 14 Februari 2019).

Kekurangpahaman dan kesalahpahaman masyarakat merupakan gambaran langsung atas tingkat pengetahuan masyarakat atas penyakit DBD. Menurut Linda Rohmah, Yulia Susanti, dan Dwi Haryanti, masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mumpuni. Menariknya, tingkat pengetahuan masyarakat yang pernah menderita DBD atas penyakit ini terbilang lebih rendah dibandingkan mereka yang belum. Dengan kata lain, kekurangpahaman dan kesalahpahaman ini kemungkinan besar terjadi justru pada kelompok masyarakat yang pernah menderita DBD. Hal ini pun tidak terlepas dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan masyarakat yang memengaruhi tingkat mobilitas, interaksi, dan informasi masyarakat (Rohmah, Susanti, dan Haryanti, 2019: 26–28).

Persoalan ini tidak semata-mata menjadi “kesalahan” masyarakat, tetapi juga lembaga penelitian dan pemerintah. Charlotte S. Seidman, William M. Silberg, dan Kevin Patrick menyebut bahwa komunikasi ilmiah/saintifik selama ini masih berkulat dalam publikasi jurnal yang kurang dapat diakses dan dicerna oleh masyarakat awam. Hal ini juga berlaku dalam komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan yang efektif harus mampu mengedukasi masyarakat dengan cara yang sederhana, jelas, dan dalam berbagai bentuk. Dunia digital telah memberi ruang yang sangat besar sehingga literasi kesehatan sudah dapat diperoleh melalui media sosial. Tidak sampai di situ, peran pemerintah untuk menjadikan komunikasi kesehatan sebagai alat kebijakan publik juga dipandang mendesak. Di sinilah letak kolaborasi lintas sektor dalam hal peningkatan pengetahuan atau literasi kesehatan melalui media komunikasi yang mutakhir (Seidman, Silberg, dan Patrick, 2013: 171–189).

Upaya Pengendalian Penyakit DBD di Indonesia (2004-2019)

Selain melakukan sejumlah upaya pencegahan, pemerintah melalui Kementerian (dahulu Departemen) Kesehatan melakukan sejumlah upaya pengendalian DBD. Salah satu bentuknya adalah penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pada 2004, Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 406/MENKES/SK/III/2004 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue di Indonesia. Tahun tersebut merupakan tahun pertama pada abad ke-21 ketika DBD dinyatakan sebagai KLB berskala nasional, tidak lagi berskala regional (provinsi atau kabupaten atau kota) sebagaimana lazim pada periode sebelumnya.

Keputusan tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, belum ditemukannya vaksin pencegah dan pengobatannya. *Kedua*, DBD merupakan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. *Ketiga*, pada periode Januari dan Februari 2004 telah terjadi peningkatan kasus DBD secara bermakna di beberapa wilayah di Indonesia. Keputusan ini pun ditetapkan pada 25 Maret 2004 oleh Menteri Kesehatan Dr. Achmad Sujudi (Indonesia, 2004a). Meskipun demikian, hal ini telah diumumkan dalam siaran pers pada 16 Februari 2004 dan dipertegas pada 24 Februari 2004 bahwa 12 provinsi dinyatakan sebagai provinsi KLB yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) (Indonesia, 2006: 36).

Penjabaran atas keputusan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) tertanggal 26 Agustus 2004 (Indonesia, 2004b). Peraturan di atas dilandasi dengan beberapa peraturan sebelumnya, seperti Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tertanggal 22 Juni 1984 (Indonesia, 1984) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular tertanggal 3 Juli 1991 (Indonesia, 1991).

Hampir 15 tahun setelah KLB DBD pertama pada abad ke-21, pemerintah

melalui Kemenkes kembali mengantisipasi peningkatan kasus DBD dengan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor PV.02.01/Menkes/721/2018 pada 22 November 2018 tentang Kesiapsiagaan Peningkatan Kasus DBD (*Berita P2P Kemkes*, 30 Januari 2019). Surat edaran ini pun ditindaklanjuti oleh pimpinan di daerah, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Olly Dondokambey mengeluarkan surat edaran bernomor 443.1/19.148/Sekr-Dinkes tertanggal 9 Januari 2019 tentang Gerakan Serentak Penanggulangan DBD (*Kompas*, 10 Januari 2019).

Satu kebijakan lain yang diambil pemerintah adalah peringatan tahunan Hari Dengue (*Dengue Day*). Peringatan ini tidak terlepas dari kerja sama kawasan Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*) dan WHO. Pada 2011, dua organisasi ini bekerja sama untuk memberantas DBD dari kawasan Asia Tenggara melalui promosi dan dukungan program kesehatan. Beberapa hal yang menjadi poin kunci dari kerja sama ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengajak seluruh elemen untuk bertindak nyata, baik dalam pencegahan maupun pengendalian. *Kedua*, mengubah pendekatan dari reaktif menjadi proaktif. *Ketiga*, meningkatkan kapasitas dalam upaya yang efisien dan berkelanjutan. *Keempat*, bersatu lintas batas melawan virus dengue (WHO, 2011a: 15–17).

Menariknya, peringatan Hari Dengue ini pertama kali dirayakan di Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Dengue Day pada 2011. Berdasarkan hasil pertemuan para menteri kesehatan se-Asia Tenggara di Singapura pada 22 Juli 2010, tanggal 15 Juni 2011 ditetapkan sebagai ASEAN Dengue Day dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Peringatan ini merupakan upaya memperkuat kerja sama dan komitmen regional dalam mengendalikan DBD antarnegara anggota ASEAN. Berbagai bentuk acara diselenggarakan menyongsong puncak peringatan ASEAN Dengue Day, seperti lomba, kampanye, konferensi, hingga dialog nasional (*Berita Kemkes*, 13 Juni 2011). Bagi Indonesia, peringatan ini menjadi penting. Sebagaimana dikutip dari laporan Mely Caballero-Anthony *et al.*, peringatan ini menjadi momentum untuk tidak hanya memperbaiki infrastruktur kesehatan, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaporan kejadian atau kasus penyakit (Caballero-Anthony *et al.*, 2015: 17).

Upaya pengendalian DBD tidak terlepas dari surveilans (pemantauan) dan pengendalian vektor penyakit. Secara umum, masyarakat Indonesia mengenal upaya ini dengan larvasida dan *fogging* (pengasapan). Menurut Paul Reiter, dua upaya ini merupakan bagian dari upaya terpisah untuk pengendalian vektor penyakit DBD, yaitu pengendalian larva (larvasida) dan pengendalian nyamuk dewasa (*fogging*). Dalam hal larvasida, beberapa upaya telah dikembangkan, seperti pemberian bubuk abate dan ekstrak tanaman herbal. Selain itu, *fogging* menjadi tren umum pengendalian nyamuk karena alasan sederhana, yakni nyamuk yang terbang di udara perlu diberantas dengan partikel yang cukup di udara pula. Meskipun demikian, risiko atas *fogging* terbilang tinggi (Reiter, 2014: 490–491).

Contoh pelaksanaan *fogging* adalah di Kota Ambon. Dinkes Kota Ambon melakukan *fogging* di kawasan terindikasi DBD, terutama beberapa kecamatan yang menjadi daerah endemis DBD. Kepala Dinkes Kota Ambon, Treesje Tory, mengatakan bahwa peningkatan kasus DBD di Kota Ambon pada 2016 menyebabkan pengasapan dilakukan secara intensif (*Berita Maluku*, 13 April 2016). Selain itu, larvasida dan pengasapan juga dilakukan di Kabupaten Kupang pada 2019. Kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat penularan DBD yang tinggi di Provinsi NTT. Larvasida dilakukan dengan membagikan bubuk abate oleh puskesmas yang datang langsung ke rumah-rumah warga (*Antara*, 1 Februari 2019).

Sebagaimana disampaikan di atas, upaya *fogging* dinilai tidak begitu ampuh mengendalikan vektor penyakit DBD, meski metode ini masih sering digunakan di tengah masyarakat. Prof. Saleha Sungkar bahkan menyebut bahwa upaya ini tidak pernah berhasil memberantas nyamuk *Aedes aegypti*. *Fogging* juga mengandung zat kimia yang berbahaya bagi manusia. Ditambah lagi, sejumlah laporan menyebut bahwa nyamuk justru kebal (resisten) terhadap zat tersebut. Pada akhirnya, ia menyarankan pengurangan frekuensi pelaksanaan upaya ini (*CNN Indonesia*, 22 Februari 2016). Senada dengan hal itu, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut bahwa dua upaya ini, baik larvasida dan pengasapan, harus dilakukan bersamaan karena sasarannya berbeda (*Liputan 6*, 6 Februari 2019).

Upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan DBD adalah penelitian oleh perguruan tinggi. Salah satu penelitian yang menuai hasil positif adalah pengembangan nyamuk *Aedes aegypti* yang mengandung bakteri Wolbachia. Hal ini dilakukan karena Indonesia pernah menjadi negara dengan kasus tertinggi DBD pada 2011 di kawasan Asia Tenggara. Penelitian dengan pendekatan biologis ini merupakan bagian dari EDP (*Eliminate Dengue Project*) sebagai bentuk kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM), Yayasan Tahija, dan Universitas Monash Australia. Bakteri Wolbachia merupakan bakteri alami yang mampu menghambat perkembangan replikasi virus dengue di tubuh nyamuk sehingga virus tersebut tidak dapat ditularkan kepada manusia. Bakteri ini pun dinilai aman bagi manusia dan lingkungan (*Berita UGM*, 7 Mei 2013).

Salah satu pelopor dalam penelitian ini adalah Adi Utarini, Guru Besar FK UGM. Sejak 2013, ia telah menjadi *Project Leader for World Mosquito Program* (dahulu bernama EDP). Dalam proses yang panjang ini, ia mengaku bahwa upaya sosialisasi langsung hasil penelitian ini ke masyarakat tidaklah mudah. Ketika pola pikir yang terbangun di masyarakat adalah memberantas nyamuk karena takut terkena DBD, ia justru memberikan pengertian kepada masyarakat agar mau terlibat dan “merasa memiliki” nyamuk ber-Wolbachia (*Kompas*, 31 Desember 2019). Di samping itu, upaya ini tidak terlepas dari bantuan filantropi Yayasan Tahija. Ketua Pembina Yayasan Tahija, dr. Sjakon George Tahija, menyebut bahwa gerakan filantropi ini “mengambil risiko” dengan mendanai proyek penelitian yang seringkali dapat menuai kegagalan, tetapi hasilnya akan luar biasa (*Tribun Jogja*, 7 April 2017).

Nyamuk *Aedes aegypti* yang telah mengandung bakteri Wolbachia mulai dilepaskan di sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi nyamuk ini mengalami peningkatan hingga 80 persen karena dibiarkan berkembang biak secara alami melalui perkawinan silang sehingga diharapkan seluruh nyamuk di wilayah tersebut mengandung bakteri Wolbachia. Pelepasan ini bukan berarti tanpa halangan. Pada awalnya, masyarakat menolak upaya ini karena dianggap dapat memperbesar risiko penularan DBD. Namun, setelah skrining dan sosialisasi, indikasi itu justru tidak ditemukan (*Berita UGM*, 25

September 2014). Dengan hasil yang menjanjikan, jumlah nyamuk ber-Wolbachia yang dilepas direncanakan makin besar. Pada 2016, pelepasan sekitar 6.000 ember telur nyamuk ini terjadi di Kota Yogyakarta. Hal ini pun diapresiasi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (*Berita UGM*, 31 Agustus 2016).

Menurut Novyan Lusiya, penerapan Wolbachia sebagai pengendali vektor dapat secara efektif menurunkan harapan hidup dan kemampuan isap nyamuk. Meskipun demikian, hal ini pun menimbulkan pro dan kontra, seperti apakah Wolbachia dapat menginfeksi tubuh manusia, apakah nyamuk hasil kawin silang tidak berbahaya, dan lain-lain (Lusiya, 2014: ii). Senada dengan hal itu, Francesca D. Frentiu, Thomas Walker, dan Scott L. O'Neill menyebut bahwa pengendalian biologis virus dengue melalui strategi Wolbachia memiliki sejumlah keunggulan, seperti berbiaya cukup rendah dan hanya memerlukan sarana dan dukungan minimal. Strategi ini dinilai ramah lingkungan dan aman sehingga berpotensi diterapkan secara efektif dalam skala global (Frentiu, Walker, dan O'Neill, 2014: 544–545).

Upaya penelitian lain yang juga dilakukan adalah penelitian spesies lain dari nyamuk *Aedes aegypti*, yaitu *Aedes aurensius*, yang ditemukan atau teridentifikasi di Papua pada 2015. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Dr. H.M. Subuh, menyatakan bahwa Indonesia sedang melaksanakan penelitian tentang vektor penyakit sehingga penemuan spesies ini pun menjadi penting. Sebagai dugaan awal, nyamuk ini belum teridentifikasi sebagai vektor penyakit tertentu. Meskipun demikian, hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menjadi dasar pemetaan dan perumusan tindakan penanganan apabila terjadi kasus penyebaran penyakit (*Detik*, 15 Desember 2015).

Disamping itu, penelitian lain juga dilakukan yang berkaitan dengan pengembangan vaksin. Hal ini telah didorong sejak 2013, salah satunya oleh Zuber Safawi, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (*Kompas*, 27 Maret 2013). Tiga tahun berselang, vaksin DBD bernama “Dengvaxia” telah dikembangkan oleh Sanofi Pasteur di Tiongkok dan mendapat rekomendasi dari WHO. Vaksin ini merupakan vaksin pertama DBD di dunia. Tepat 25 Oktober 2016, vaksin ini diluncurkan di Indonesia (*Kompas*, 25 Oktober 2016).

Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menyetujui vaksin ini dengan nomor registrasi DKI1659703344A1 yang terbit pada 31 Agustus 2016 (*Kompas*, 10 Desember 2017). Hasil uji klinis telah menunjukkan bahwa vaksin ini aman setelah melibatkan 30 ribu peserta di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, hal itu tidak berarti bahwa seseorang akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terinfeksi DBD. Ketua *Indonesian Technical Advisory Group for Immunization* (ITAGI) sekaligus Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak UI, Prof. Sri Rezeki Hadinegoro, menyebut bahwa kemungkinan untuk terjangkit masih ada, meski dengan gejala yang lebih ringan (*Tirto*, 28 Oktober 2016).

Meski vaksin ini mempunyai prospek yang baik, hal itu bukan berarti tanpa halangan. Sejumlah kontroversi mencuat tidak lama setelah vaksin tersebut dinyatakan legal di Indonesia. Pada 2017, uji klinis atas vaksin tersebut menunjukkan bahwa vaksin dapat efektif kepada orang yang sudah pernah terinfeksi DBD, namun dapat memicu penyakit kepada orang yang belum pernah terinfeksi. Oleh sebab itu, Prof. Sri menegaskan bahwa vaksin ini terus akan dipantau perkembangannya serta penggunaannya (*Kompas*, 8 Desember 2017).

Terlebih lagi, harga vaksin yang dianjurkan berkisar Rp800 ribu hingga Rp1 juta per satu kali suntik, padahal dibutuhkan tiga kali suntik. Oleh sebab itu, dikhawatirkan seluruh lapisan masyarakat tidak dapat memperoleh vaksin secara mudah. Sejumlah kontroversi ini pun menyebabkan vaksin DBD belum menjadi program nasional (*Republika*, 30 Januari 2019). Pada saat inilah, pemerintah harus mengatur harga yang terjangkau serta meredakan perdebatan yang ada dengan sosialisasi yang masif (*Republika*, 5 Desember 2019).

Menurut Dewi Marbawati dan Tri Wijayanti, tantangan pengembangan vaksin yang paling besar adalah mutasi virus dengue. Oleh sebab itu, percepatan penyediaan vaksin telah dilakukan dengan konsorsium internasional. Vaksin dengue dipandang sebagai pendekatan yang efektif dan berkesinambungan dalam mengendalikan DBD. Alasannya, program pengendalian vektor nyamuk yang selama ini menjadi prioritas utama dan lazim digunakan untuk mencegah wabah justru tidak berjalan efektif (Marbawati dan Wijayanti, 2014: 44).

Dengan demikian, upaya pengendalian DBD memerlukan riset dan inovasi teknologi ke depan. Beberapa persoalan di Indonesia adalah sarana, pendanaan, dan pengakuan, di samping kontroversi vaksinasi (*Kompas*, 27 Februari 2019). Oleh sebab itu, David M. Brown dan Anthony A. James menyebut bahwa pemerintah harus memperhatikan berbagai kendala tersebut agar tidak selamanya mengandalkan pendanaan filantropi. Selain itu, menggandeng masyarakat kembali ditekankan agar inovasi demikian dapat diterima sekaligus dipercaya masyarakat sebagai solusi yang lebih efektif dan mutakhir (Brown dan James, 2014: 531).

Dampak Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD di Indonesia (2004-2019)

Dampak upaya pencegahan penyakit DBD di Indonesia melalui program PSN dan PHBS dapat dilihat melalui salah satu indikator keberhasilannya, yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ). ABJ diperoleh dari jumlah rumah/bangunan yang diperiksa bebas jentik dibagi jumlah rumah/bangunan yang diperiksa dikali 100 persen. Sejak 2004 hingga 2019, ABJ di Indonesia bergerak fluktuatif. Bahkan, data ABJ pada beberapa tahun awal tidak dapat mewakili realitas di seluruh Indonesia sebab belum semua provinsi hingga kabupaten/kota memprioritaskan pelaksanaan PSN hingga pemantauan rumah/bangunan bebas jentik. Oleh sebab itu, sebagian besar data yang tersaji di bawah ini merupakan hasil pemantauan di beberapa kota besar di Indonesia. Meskipun demikian, sejak beberapa tahun terakhir, pelaporan ABJ dari daerah ke pusat makin meningkat dan dapat merepresentasikan ABJ di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Angka Bebas Jentik (ABJ) di Indonesia (2004-2019)

Tahun	ABJ
2004	79,9%
2005	77,4%
2006	81,5%
2007	83,5%
2008	85,7%
2009	71,1%
2010	80,2%
2011	76,2%
2012	79,3%
2013	80,1%
2014	24,1%
2015	54,2%
2016	67,6%
2017	46,7%
2018	31,5%
2019	79,2%

(Sumber: Indonesia, 2006–2020)

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal ABJ memiliki kecenderungan meningkat. Meskipun demikian, hal ini hanya bertahan hampir satu dekade ketika ABJ anjlok pada 2014, yaitu sebesar 24,1%. Pergerakan ABJ kembali terlihat progresif setelah 2014 lalu anjlok kembali pada 2017 hingga 2018. Kabar gembiranya adalah ABJ di Indonesia pada 2019 ditutup dengan peningkatan yang signifikan, yaitu 79,2%, lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 31,5%. Di sisi lain, dampak upaya pengendalian penyakit DBD di Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah indikator, seperti jumlah kasus, jumlah kematian, CFR (*case fatality rate*/angka kematian), dan IR (*incident rate*/angka kesakitan/insiden). CFR didefinisikan sebagai persentase jumlah kematian atas jumlah kasus, sedangkan IR didefinisikan sebagai perbandingan jumlah kasus per 100.000 penduduk.

Tabel 2. Jumlah Kasus, Jumlah Kematian, Angka Kematian (CFR), dan Angka Insiden/Kesakitan (IR) DBD di Indonesia (2004-2019)

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	CFR	IR
2004	79.462	± 954	1,20%	37,11
2005	95.279	1.298	1,36%	43,42
2006	114.656	1.196	1,04%	52,48
2007	158.115	1.599	1,01%	71,78
2008	137.469	1.187	0,86%	59,02
2009	158.912	1.420	0,89%	68,22
2010	156.086	1.358	0,87%	65,70
2011	65.725	597	0,91%	27,67
2012	90.245	816	0,90%	37,11
2013	112.511	871	0,77%	45,85
2014	100.347	907	0,90%	39,80
2015	129.650	1.071	0,83%	50,75
2016	204.171	1.598	0,78%	78,85
2017	68.407	493	0,72%	26,10
2018	65.602	467	0,71%	24,75
2019	138.127	919	0,67%	51,48

(Sumber: Indonesia, 2006–2020)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tren IR mengikuti perkembangan jumlah kasus. Oleh sebab itu, pergerakan IR sebanding dengan pergerakan jumlah kasus yang masih fluktuatif dan belum menunjukkan kecenderungan menurun yang konsisten. Di samping itu, tren pergerakan CFR menunjukkan penurunan yang cukup terjaga. Meski jumlah kasus meningkat cukup tajam pada 2019, pada saat yang sama CFR akibat DBD tercatat paling rendah sepanjang dua dekade pada awal abad ke-21, yaitu sebesar 0,67%. Itu berarti, tingkat kematian (mortalitas) akibat DBD dapat makin ditekan, di tengah peningkatan jumlah kasus yang signifikan.

Upaya pengendalian penyakit DBD menyebabkan Indonesia mampu menurunkan jumlah kasus DBD pada 2011. Jika pada 2010 Indonesia mencapai 156.086 kasus DBD yang dilaporkan, pada 2011 jumlah ini bahkan tidak sampai setengahnya, yaitu berkisar 65.725 kasus. Tidak hanya itu, pola perkembangan kasus DBD sejak 2004-2007 menunjukkan kecenderungan peningkatan, sedangkan sejak 2009-2011 menunjukkan kecenderungan menurun (Indonesia, 2012: 84–86).

Meskipun demikian, pola tersebut tidaklah bertahan lama. Pada 2012, jumlah

kasus mulai meningkat tajam hingga 2013. Pada 2014, sebagaimana 2008, jumlah kasus menurun cukup signifikan, tetapi tidak bertahan lama. Jumlah kasus bergerak meningkat sejak 2015 hingga 2016 yang mencapai 204.171, jumlah kasus DBD tertinggi sepanjang dua dekade pertama pada abad ke-21. Menariknya, pada 2017, jumlah kasus menurun sangat drastis, yaitu berkisar 68.407 kasus. Tren penurunan ini juga terlihat pada 2018 yang mencapai 65.602 kasus. Akan tetapi, pola yang sama kembali terulang, yaitu penurunan yang tidak bertahan lama. Sebelum memasuki dekade kedua abad ke-21, Indonesia mencatatkan jumlah kasus DBD meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu mencapai 138.127 kasus.

Dalam *Profil Kesehatan Indonesia* sebagai terbitan berkala resmi Kemenkes, tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa pola perkembangan kasus seperti ini dapat terjadi. Di sisi lain, peningkatan jumlah kasus DBD pada 2019 dapat menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Jokowi pada tahun selanjutnya menyatakan DBD menjadi salah satu persoalan kesehatan yang tidak kalah penting ketika Indonesia sedang berjibaku melawan pandemi Covid-19.

Data lain juga menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah provinsi dan kabupaten atau kota yang terjangkit, kasus DBD telah tercatat melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sejak lima tahun terakhir, seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) telah melaporkan kasus DBD terjadi di wilayahnya. Jumlah kabupaten/kota yang terjangkit di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Bahkan, pada 2019, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 481 kabupaten/kota tercatat dilanda penyakit ini. Hal ini berarti lebih dari 93% kabupaten/kota di Indonesia telah terjangkit DBD, sebuah persentase tertinggi sepanjang dua dekade pada abad ke-21. Selain itu, dalam skala provinsi, provinsi tertinggi yang terjangkit selalu didominasi di Pulau Jawa. Alasannya jelas, yaitu Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi, ditambah lagi dengan tingkat kepadatan dan mobilitas atau pergerakan penduduk yang tinggi. Hal ini merupakan sebuah realitas yang tidak dimiliki di wilayah/pulau lain di Indonesia.

Tabel 3. Jumlah Provinsi Terjangkit (JPT), Jumlah Kabupaten/Kota Terjangkit (JKKT) dan Provinsi Tertinggi yang Terjangkit (PTT) DBD di Indonesia (2004-2019)

Tahun	JPT/JP	%	JKKT/JKK	%	PTT
2004	29/32	90,63	326/416	78,37	DKI Jakarta
2005	32/33	96,97	330/440	75,00	DKI Jakarta
2006	32/33	96,97	330/440	75,00	Jawa Barat
2007	32/33	96,97	361/465	77,63	DKI Jakarta
2008	31/33	93,94	355/495	71,72	DKI Jakarta
2009	32/33	96,97	384/497	77,26	Jawa Barat
2010	33/33	100,00	400/497	80,48	Banten
2011	31/33	93,94	374/497	75,25	Jawa Barat
2012	33/33	100,00	417/497	83,90	Jawa Barat
2013	33/33	100,00	412/497	82,90	Jawa Barat
2014	34/34	100,00	433/511	84,74	Jawa Barat
2015	34/34	100,00	446/514	86,77	Jawa Barat
2016	34/34	100,00	463/514	90,08	Jawa Barat
2017	34/34	100,00	434/514	84,44	Jawa Tengah
2018	34/34	100,00	440/514	85,60	Jawa Barat
2019	34/34	100,00	481/514	93,58	Jawa Barat

(Sumber: Indonesia, 2006–2020)

PENUTUP

DBD merupakan penyakit yang telah berada dalam sejarah panjang Indonesia, terlebih setelah Indonesia merdeka. Sejak ditemukan kasus perdana pada 1968, DBD belum sepenuhnya terberantas dari Indonesia. Terlebih lagi, ketika pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, DBD dinilai menjadi salah satu persoalan kesehatan yang serius. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Dalam upaya pencegahan, masyarakat luas dilibatkan dalam program PSN dengan Gerakan 3M Plus serta kaderisasi jumantik. Di samping itu, pemerintah dan lembaga kesehatan terus memublikasikan promosi kesehatan dan informasi kesehatan yang akurat agar pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk mencegah DBD makin meluas. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal kunci yang ditekankan sepanjang periode ini.

Selain itu, sejumlah upaya pengendalian juga dilakukan, terutama oleh pemerintah. Sejak DBD dinyatakan sebagai KLB nasional pada 2004, pemerintah telah

menyusun dan mengimplementasikan sejumlah regulasi yang pada intinya mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya besar memberantas DBD dari Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menggandeng kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai sesama daerah endemis DBD untuk berkolaborasi memberantas penyakit ini. Upaya lain yang juga digiatkan adalah penelitian, baik untuk pengendalian biologis secara konvensional melalui larvasida dan *fogging* (pengasapan) maupun untuk pengendalian biologis terbaru, seperti pengembangan nyamuk *Aedes aegypti* ber-Wolbachia, penelitian nyamuk spesies baru di Papua, hingga penelitian vaksin DBD. Banyak kalangan menilai bahwa peran pemerintah juga tidak dapat dilepaskan untuk mendukung inovasi pengendalian DBD.

Dampak dari berbagai upaya pencegahan dan pengendalian DBD terlihat dalam data angka bebas jentik maupun jumlah kasus sepanjang lima belas tahun terakhir. Pergerakan yang fluktuatif dan belum memiliki kecenderungan menurun yang konsisten membuktikan bahwa upaya-upaya tersebut belumlah cukup untuk memberantas DBD sepenuhnya dari Indonesia. Pada akhirnya, upaya besar ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, baik oleh pemerintah, layanan kesehatan, institusi riset atau perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- “5 Kesalahpahaman Terbesar tentang DBD”, *Kompas*, 14 Februari 2019, <https://sains.kompas.com/read/2019/02/14/070500923/5-kesalahpahaman-terbesar-tentang-dbd-dan-nyamuknya?page=all>.
- “Adi Utarini Merintis Jalan bagi Dunia untuk Basmi Penyakit Demam Berdarah”, *Kompas*, 31 Desember 2019, <https://www.kompas.id/baca/sosok/2019/12/31/adi-utarini-merintis-jalan-bagi-dunia-untuk-membasmi-penyakit-demam-berdarah/>.
- “Aplikasi Jumantik untuk Memburu Nyamuk *Aedes aegypti*”, *Kedaulatan Rakyat*, 7 Mei 2019, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/aplikasi-jumantik-untuk-memburu-nyamuk-aedes-aegypti/>.
- “Cara Baru Atasi Demam Berdarah, UGM Perluas Pelepasan Nyamuk Ber-Wolbachia”, *Berita UGM*, 25 September 2014, <https://ugm.ac.id/id/berita/9319-cara-baru-atasi-demam-berdarah-ugm-perluas-pelepasan-nyamuk-ber-wolbachia>.
- “DBD Mewabah, Waspada! Siklus Lima Tahunan”, *RRI*, 10 Maret 2020, <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/798850/dbd-mewabah-waspada-siklus-lima-tahunan>.
- “Ditemukan Nyamuk Baru di Papua, Kemenkes Teliti Potensi Penyakitnya”, *Detik*, 15 Desember 2015, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3096178/ditemukan-nyamuk-baru-di-papua-kemenkes-teliti-potensi-penyakitnya>.
- “Djarot: Jumantik Cilik Adalah Detektif Cilik Nyamuk”, *Berita Satu*, 23 April 2015, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/268014/djarot-jumantik-cilik-adalah-detektif-cilik-nyamuk>.
- “EDP Menggandeng Warga untuk Mengasuh Nyamuk *Aedes aegypti* Ber-Wolbachia”, *Berita UGM*, 31 Agustus 2016, <https://ugm.ac.id/id/berita/12400-edp-menggandeng-warga-untuk-mengasuh-nyamuk-aedes-aegypti-ber-wolbachia>.
- “Fogging Hanya Berantas Nyamuk DBD Dewasa”, *Liputan 6*, 6 Februari 2019, <https://www.liputan6.com/health/read/3888252/fogging-hanya-berantas-nyamuk-dbd-dewasa>.
- “Fogging Tak Mampu Berantas Semua Nyamuk”, *CNN Indonesia*, 22 Februari 2016, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222133816-255-112561/fogging-tak-mampu-berantas-semua-jenis-nyamuk>.
- “Gubernur Sulawesi Utara Terbitkan Surat Edaran Penanggulangan DBD”, *Kompas*, 10 Januari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/10/17425171/gubernur-sulawesi-utara-terbitkan-surat-edaran-penanggulangan-dbd>.

- “Indonesia Tuan Rumah ASEAN Dengue Day”, *Berita Kemkes*, 13 Juni 2011, <https://www.kemkes.go.id/article/print/1534/indonesia-tuan-rumah-asean-dengue-day.html>.
- “Jangan Terkecoh, Turun Demam Bukan Berarti Sembuh dari DBD”, *Kompas*, 29 Januari 2019, <https://sains.kompas.com/read/2019/01/29/210200823/jangan-terkecoh-turun-demam-bukan-berarti-semuh-dari-dbd?page=all>.
- “Jokowi Ingatkan Kasus Stunting dan DBD Tak Kalah Penting Meski Fokus Corona”, *Liputan 6*, 29 Mei 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4265935/jokowi-ingatkan-kasus-stunting-dan-dbd-tak-kalah-penting-meski-fokus-corona>.
- “Kemenkes Belum Jadikan Vaksinasi DBD Program Nasional”, *Republika*, 30 Januari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/30/pm58zt349-kemenkes-belum-jadikan-vaksin-dbd-program-nasional>.
- “Kendalikan Infeksi Virus Dengue dengan Wolbachia”, *Berita UGM*, 7 Mei 2013, <https://ugm.ac.id/id/berita/7738-kendalikan-infeksi-virus-dengue-dengan-wolbachia>.
- “Kesiapsiagaan Menghadapi Peningkatan Kejadian Demam Berdarah Dengue Tahun 2019”, *Berita P2P Kemkes*, 30 Januari 2019, dalam <https://p2p.kemkes.go.id/kesiapsiagaan-menghadapi-peningkatan-kejadian-demam-berdarah-dengue-tahun-2019/>.
- “Kita di Antara Korona dan Demam Berdarah”, *Kompas*, 6 Maret 2020, <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/06/kita-di-antara-korona-dan-demam-berdarah/>.
- “Kontroversi Vaksin Demam Berdarah di Indonesia”, *Republika*, 5 Desember 2019, <https://www.republika.co.id/berita/q21nmh349/kontroversi-vaksin-demam-berdarah-di-indonesia>.
- “Kupang Bagikan Larvasida untuk Cegah DBD”, *Antara*, 1 Februari 2019, <https://www.antaranews.com/berita/793917/kupang-bagikan-larvasida-untuk-cegah-dbd>.
- “Lawan Serangan DBD dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik”, *Humas Bandung*, 31 Januari 2019, <https://humas.bandung.go.id/layanan/lawan-serangan-dbd-dengan-gerakan-1-rumah-1-jumantik>.
- “Mencegah Demam Berdarah dengan Vaksin Dengvaxia”, *Tirto*, 28 Oktober 2016, <https://tirto.id/mencegah-demam-berdarah-dengan-vaksin-dengvaxia-bYV3>.

- “Musim DBD, Mahasiswa dan Pelajar Didorong Jadi Jumanik di Lingkungannya”, *Tribun News*, 7 Februari 2019, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/07/musim-dbd-mahasiswa-dan-pelajar-didorong-jadi-jumantik-di-lingkungannya>.
- “Pemkot Denpasar Luncurkan Program Gema Petik”, *Antara Bali*, 11 Oktober 2016, <https://bali.antaranews.com/berita/96992/pemkot-denpasar-luncurkan-program-gema-petik>.
- “Perangi Demam Berdarah dengan Riset”, *Kompas*, 27 Maret 2013, <https://health.kompas.com/read/2013/03/27/22072224/perangi-demam-berdarah-dengan-riset>.
- “Pengendalian DBD Butuh Riset dan Inovasi Teknologi”, *Kompas*, 27 Februari 2019, <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2019/02/27/pengendalian-dbd-butuh-riset-dan-inovasi-teknologi/>.
- “Pernyataan Kemenkes Timbulkan Pertanyaan, Vaksin DBD Belum Beredar”, *Kompas*, 8 Desember 2017, <https://sains.kompas.com/read/2017/12/08/205404523/pernyataan-kemenkes-timbulkan-pertanyaan-vaksin-dbd-belum-beredar>.
- “Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026”, *Kompas*, 2 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/17065031/setahun-covid-19-ri-bertambah-5712-total-kasus-mencapai-1347026?page=all>.
- “Sudah 50 Tahun, Mengapa DBD di Indonesia Sulit Diatasi?”, *Kompas*, 12 Februari 2020, <https://sains.kompas.com/read/2020/02/12/190000723/sudah-50-tahun-mengapa-dbd-di-indonesia-sulit-diatasi-?page=all>.
- “Vaksin DBD di Indonesia, Izin Edar Dipertanyakan”, *Kompas*, 10 Desember 2017, <https://sains.kompas.com/read/2017/12/10/194448823/vaksin-dbd-di-indonesia-izin-edar-dipertanyakan?page=all>.
- “Vaksin Dengue Pertama Tersedia di Indonesia”, *Kompas*, 25 Oktober 2016, <https://health.kompas.com/read/2016/10/25/142214823/vaksin.dengue.pertama.ter.sedia.di.indonesia>.
- “WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global”, *Kompas*, 12 Maret 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- “Yayasan Tahija Komitmen Danai Penelitian untuk Perangi DBD”, *Tribun Jogja*, 7 April 2017, <https://jogja.tribunnews.com/2017/04/07/yayasan-tahija-komitmen>.

[danai-penelitian-untuk-perangi-dbd.](#)

- Achmad, Januar. 1999. *Hollow Development: The Politic of Health in Soeharto's Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anonim. 2010. "Demam Berdarah Dengue di Indonesia Tahun 1968-2009", dalam *Buletin Jendela Epidemiologi*, Vol. 2, hlm. 1–14.
- Arsin, A. Arsunan. 2013. *Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia*. Makassar: Masagena Press.
- Berridge, Virginia, Martin Gorsky, dan Alex Mold. 2011. *Public Health in History*. Berkshire: Open University Press.
- Brown, David M. dan Anthony A. James. 2014. "Dengue Vector Control: New Approaches" dalam Duane J. Gubler *et al.* (eds.), *Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever 2nd Edition*. Oxfordshire: CABI.
- Caballero-Anthony, Mely, Alistair D.B. Cook, Gianna Gayle Herrera Amul, dan Akanksha Sharma. 2015. *Health Governance and Dengue in Southeast Asia*. Singapura: S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS).
- Direktorat PK dan PM. 2016. "PHBS", dalam <https://promkes.kemkes.go.id/phbs>.
- Direktorat Jenderal PP dan PL. 2007. *Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Direktorat Jenderal PP dan PL. 2008. *Modul Pelatihan bagi Pelatih Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah (PSN-DBD) dengan Pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku (Communication for Behavioral Impact)*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Direktorat Jenderal PP dan PL. 2014. *Petunjuk Teknis Jumantik – PSN Anak Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Direktorat Jenderal P2P. 2016. *Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M-Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Frentiu, Francesca D., Thomas Walker, dan Scott L. O'Neill. 2014. "Biological Control of Dengue and *Wolbachia*-based Strategies", dalam Duane J. Gubler *et al.* (eds.), *Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever 2nd Edition*. Oxfordshire: CABI.
- Harapan, Harapan, Alice Michie, Mudatsir Mudatsir, R. Tedjo Sasmono, dan Allison Imrie. 2019. "Epidemiology of Dengue Hemorrhagic Fever in Indonesia: Analysis

of Five Decades Data from the National Disease Surveillance”, dalam *BMC Research Notes*, Vol. 12, No. 1, hlm. 350.

Indonesia. 1984. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*.

Indonesia. 1991. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular*.

Indonesia. 1998. *Kumpulan Surat Keputusan/Edaran tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Indonesia. 2004a. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/MENKES/SK/III/2004 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue di Indonesia*.

Indonesia. 2004b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)*.

Indonesia. 2006. *Profil Kesehatan Indonesia 2004*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Indonesia. 2007a. *Profil Kesehatan Indonesia 2005*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Indonesia. 2007b. *Profil Kesehatan Indonesia 2006*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Indonesia. 2008. *Profil Kesehatan Indonesia 2007*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Indonesia. 2009. *Profil Kesehatan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Indonesia. 2010. *Profil Kesehatan Indonesia 2009*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia. 2011. *Profil Kesehatan Indonesia 2010*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia. 2012. *Profil Kesehatan Indonesia 2011*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia. 2013. *Profil Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia. 2014. *Profil Kesehatan Indonesia 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia. 2016. *Profil Kesehatan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Indonesia. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Indonesia. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Indonesia. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Indonesia. 2020. *Profil Kesehatan Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Karyanti, Mulya Rahma dan Sri Rezeki Hadinegoro. 2009. “Perubahan Epidemiologi Demam Berdarah Dengue di Indonesia” dalam *Sari Pediatri*, Vol. 10, No. 6, hlm. 424–432.
- Lusiyana, Novyan. 2014. “*Wolbachia* sebagai Alternatif Pengendalian Vektor Nyamuk *Aedes sp.*”, dalam *JKKI: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, Vol. 6, No. 3, hlm. i–iii.
- Marbawati, Dewi dan Tri Wijayanti. 2014. “Vaksin Dengue, Tantangan, Perkembangan dan Strategi”, dalam *Balaba*, Vol. 10, No. 1, hlm. 39–46.
- Noshirma, Monika dan Ruben Wadu Willa. 2016. “Larvasida Hayati yang Digunakan dalam Pengendalian Vektor Penyakit Demam Berdarah di Indonesia”, dalam *SEL: Jurnal Penelitian Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, hlm. 31–40.
- Orme, Judy, Jane Powell, Pat Taylor, dan Melanie Grey (eds.). *Public Health for the 21st Century: New Perspectives on Policy, Participation and Practice*. Berkshire: Open University Press.
- Porter, Dorothy. 1999. *Health, Civilization and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times*. London: Routledge.
- Pratamawati, Diana Andriyani. 2012. “Peran Jurun Pantau Jentik dalam Sistem Kewaspadaan Dini Demam Berdarah Dengue di Indonesia”, dalam *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 6, No. 6, hlm. 243–248.
- Reiter, Paul. 2014. “Surveillance and Control of Urban Dengue Vectors”, dalam Duane J. Gubler *et al.* (eds.), *Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever 2nd Edition*. Oxfordshire: CABI.
- Rohmah, Linda, Yulia Susanti, dan Dwi Haryanti. 2019. “Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Demam Berdarah Dengue”, dalam *Community of Publishing in Nursing (COPING)*, Vol. 7, No. 1, hlm. 21–30.
- Rosa, Elsa Sari. 2009. “Perilaku Pencegahan Penyakit DBD Sebelum dan Sesudah Program COMBI di Kota Padang”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas

Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Rubandiyah, Hidayatul Issri dan Efa Nugroho. 2018. “Pembentukan Kader Jumantik sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa di Sekolah Dasar”, dalam *Higeia: Journal of Public Health Research and Development*, Vol. 2, No. 2, hlm. 216–226.
- Seidman, Charlotte S., William M. Silberg, dan Kevin Patrick. 2013. “Contemporary Issues in Scientific Communication and Public Health Education”, dalam James W. Holsinger Jr. (ed.), *Contemporary Public Health: Principles, Practice, and Policy*. Kentucky: The University Press of Kentucky.
- Soedarto. 2012. *Demam Berdarah Dengue Dengue Haemorrhagic Fever*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sumekar, Dyah Wulan dan Wage Nurmaulina. 2016. “Upaya Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue, *Aedes aegypti* L. Menggunakan Bioinsektisida”, dalam *Majority*, Vol. 5, No. 2, hlm. 131–135.
- Susilowati, Indah Tri dan Endang Widhiyastuti. 2019. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue dengan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Pemanfaatan Bahan Herbal”, dalam *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, hlm. 237–243.
- WHO. 2011a. *Action Against Dengue: Dengue Day Campaigns Across Asia*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. 2011b. *Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue and DHF*. New Delhi: World Health Organization.

BIODATA PENULIS



Khaerul Amri, lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, 05 Juli 1992 sementara menempuh Pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin pada Jurusan Ilmu Sejarah setelah menyelesaikan pendidikan SI tahun 2015 di Universitas dan jurusan yang sama. Kecintaan terhadap dunia politik membawanya menjadi konsultan politik di beberapa daerah. Pengalaman menulis dimulai sejak mahasiswa, dengan menulis di sejumlah media baik media online maupun media cetak. Kemampuan menulis menjadikannya pimpinan redaksi pada Majalah Serambi Bulu-Bulu. Tulisan dalam bidang keilmuan yang telah dibukukan diantaranya, *Politik Siassajingenna To Siassajingie: Merajut Sinjai Bersatu dari Konfederasi Kerajaan Menuju Daerah Tingkat II Kabupaten Sinjai*, *Sinjai Nol Kilometer Membaca Sinjai Lampau dan Hari Ini*). Saat ini aktif meneliti dengan fokus kajian sejarah politik.



Dian Mahendra, lahir di Temas, 6 September 1994. Lulus S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram pada tahun 2019. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 pada Program Studi Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Aktif menulis berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bidang keilmuan bahasa dan budaya.



Irfal Mujaffar, lahir di Tasikmalaya, 27 November 1993. Menyelesaikan S-1 di Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung pada 2017. Setelah lulus S-1 bekerja sebagai peneliti di Lembaga Riset Sejarah dan Budaya 'Soekapoera Institute' Tasikmalaya pada 2017-2019. Dalam kurun waktu yang sama, bekerja juga sebagai penulis di sejumlah perusahaan media, *Priangan.com* dan *Initasik.com* khusus untuk artikel sejarah dan naskah-naskah film dokumenter sejarah. Saat ini tengah menempuh pendidikan Magister di Departemen Sejarah Universitas Indonesia, Depok.



Andri Nurjaman, lahir di Ciamis tanggal 01 Agustus 1997 dari pasangan Bapak Kusmawan dan Ibu Teti Trisnawati. Anak pertama dari dua bersaudara. Berdomisili di RT 01 RW 05 Dusun Cikadu Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Adapun riwayat pendidikan formal penulis mulai dari belajar di SDN 6 Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis, Mts Negeri Langkaplancar Kabupaten Ciamis, MA Cilendek Kota Tasikmalaya, UIN Sunan Gunung Djati Bandung program studi Sejarah Peradaban Islam. Penulis juga pernah mengenyam di beberapa lembaga pendidikan pesantren diantaranya; Pondok Pesantren Al-ittihadiyyah Cibitung-Ciamis, Pontren Raudlatul Muta'alimin Cilendek-Kota Tasikmalaya dan Pontren At-tamur Bandung. Kini penulis sedang menempuh studi S2 Sejarah Peradaban Islam di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis juga adalah sebagai pengajar dan pendidik di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ashr Al-Madani dan SMP Plus AM. Tulisan artikel ilmiah penulis sudah terbit di Jurnal Historia Madani pada tahun 2020, dan beberapa artikel sedang proses di beberapa Jurnal, adapun coretan-coretan penulis lainnya berupa opini bisa di lacak di beberapa platform seperti di web resmi LTN NU Jabar (ltnnujabar.or.id), inteligensia.id, NU Online Jabar mubadalah.id. dan Alif.id Pembaca bisa menghubungi penulis melalui surel andrienurjaman99@gmail.com.



Dadan Rusmana, lahir pada 27 Juni 1973, dan sekarang beralamat di Cileunyi Kulon No. 20, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40622. Adapun riwayat pendidikan formal penulis mulai dari belajar di SDN Margaluyu 2 Cimahi Timur, Jawa Barat, SMPN 4 Cimahi Selatan, Jawa Barat, SMA Islam Negeri Cijerah, Bandung, Program Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat. Kini penulis menjadi Dosen dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pembaca bisa menghubungi penulis melalui surel dadan.rusmana@uinsgd.ac.id.



Doli Witro, lahir di Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Adapun riwayat pendidikan formal penulis mulai dari belajar di SDN 063/ XI Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung (2001-2007), SMPN 11 Kota Sungai Penuh (2007-2011), MAN 1 Kerinci, Provinsi Jambi (2011-2014), Institut Agama Islam Negeri Kerinci (2014-2018) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.. Kini penulis sedang menempuh studi S2 Hukum Ekonomi Syari'ah di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pembaca bisa menghubungi penulis melalui surel doliwitro01@gmail.com.



Ayu Wulandari, S.Sej, lahir di Purworejo pada 22 Maret 1999 merupakan sejarawan alumnus Program Studi S-1 Ilmu Sejarah, Faku Itas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Menyelesaikan pendidikan S-1 tahun 2021 dengan skripsi berjudul “Di Balik Meja Perundingan: Tiga Diplomat Perempuan dalam Misi Diplomasi Indonesia (1946-1960an)”. Kajian sejarah yang ditekuni antara lain sejarah perempuan, sejarah diplomasi, sejarah politik, dan sejarah sosial. Berangkat dari minatnya terhadap beberapa kajian sejarah tersebut, hingga saat ini aktif dalam penelitian sejarah dan mempublikasikan beberapa artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal nasional. Selain itu, juga turut aktif dalam berbagai seminar dan konferensi untuk menyumbangkan pemikiran dan hasil penelitian terbaru mengenai kajian sejarah maupun kajian lainnya di bidang ilmu sosial humaniora.



Joshua Jolly Sucanta Cakranegara. Lahir di Manado pada 23 Juli 1999. Ia menempuh pendidikan di Program Studi S1 Sejarah, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak 2017 hingga dinyatakan lulus pada 2021 dengan skripsi “Servatius Subhaga: Potret Imam Putra Sulung Bali (1938-2019) (Naskah Film Dokumenter)”. Ia memiliki minat penelitian sejarah sosial budaya dan pendidikan. Sejak 2018, ia aktif sebagai pembicara sekaligus pemakalah dalam berbagai seminar nasional dan internasional, seperti Seminar Sejarah Nasional 2018, Seminar Sejarah Nasional 2019, Seminar Nasional dan Konferensi Sosiologi Perkotaan 2019, Webinar Sejarah Mahasiswa Nasional 2020, dan International Conference on Indonesian Culture 2020. Tidak hanya itu, ia juga sudah menuliskan hasil penelitiannya dalam berbagai bentuk publikasi, baik berskala lokal maupun nasional sepanjang tiga tahun terakhir.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA SUMATERA BARAT



9 772502 679008